



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota terpilih;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK.95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);

34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
38. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13);
42. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

43. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional;
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
16. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
18. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi, misi Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi adalah :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun Renstra SKPD periode 2010-2015;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program pembangunan periode 2010-2015;
3. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota pada akhir masa jabatan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2010-2015 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. visi, misi, dan program Walikota sebagai Kepala Daerah; dan
 - b. berisikan arahan kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan daerah, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD, disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2010 – 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, dan RKPD.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- d. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- g. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- h. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- i. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- j. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- k. BAB XI PENUTUP

Pasal 6

RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPJMD Tahun 2010 – 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUSI DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dilakukan oleh Gubernur dalam hal penyusunan, pengendalian dan evaluasi RPJMD.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 ini, maka Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 21 Mei 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto,

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto,

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2015

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2010-2015 ini dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan yakni melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi, misi Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012
NOMOR**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR. 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010-2015

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

**DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL**

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar belakang.....	I-1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3 Hubungan antar dokumen.....	I-6
	1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
	1.5 Maksud dan Tujuan.....	I-8
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1 Data dan Informasi Kondisi Umum Daerah.....	II-1
	2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-1
	2.1.2 Topografi.....	II-2
	2.1.3 Geologi.....	II-2
	2.1.4 Hidrologi	II-3
	2.1.5 Klimatologi.....	II-3
	2.1.6 Tata Guna Lahan.	II-3
	2.1.7 Wilayah Rawan Bencana.....	II-4
	2.1.8 Kondisi Demografis Kota Bukittinggi.....	II-5
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-7
	2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-8
	2.2.2 Kesejahteraan Sosial.....	II-14
	2.2.2.1 Pendidikan.....	II-14
	2.2.2.2 Kesehatan.....	II-19
	2.2.2.3 Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja).....	II-21
	2.2.2.4 Kriminalitas.....	II-21
	2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga.....	II-22
	2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-22
	2.3.1 Pendidikan.....	II-22
	2.3.1.1 Pendidikan Dasar.....	II-22
	2.3.1.2 Pendidikan Menengah.....	II-27
	2.3.2. Kesehatan.....	II-29
	2.3.3 Lingkungan Hidup.....	II-35
	2.3.4 Sarana dan Prasarana Umum.....	II-38
	2.3.5 Penataan Ruang.....	II-41
	2.3.6 Perhubungan.....	II-42
	2.3.7 Penanaman Modal.....	II-44
	2.3.8 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM).....	II-47
	2.3.9 Kependudukan.....	II-49
	2.3.10 Ketenagakerjaan.....	II-52
	2.3.11 Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)..	II-54
	2.3.12 Komunikasi dan Informasi.....	II-54
	2.3.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-56
	2.3.14 Perpustakaan.....	II-58
	2.3.15 Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	II-59

2.3.16	Pemuda dan Olahraga.....	II-61
2.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-64
2.4.1	Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-64
2.4.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita.....	II-61
2.4.2	Produktifitas Total Daerah.....	II-65
2.4.3	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur.....	II-66
2.4.3.1	Aksebilitas Daerah.....	II-66
2.4.3.2	Penataan Wilayah.....	II-63
2.4.3.3	Fasilitas Bank dan Non Bank.....	II-67
2.4.3.4	Ketersediaan Restoran.....	II-70
2.4.3.5	Ketersediaan Penginapan.....	II-71
2.4.4	Iklim Berinvestasi.....	II-71
2.4.4.1	Keamanan dan Ketertiban.....	II-67
2.4.5.	Sumber Daya Manusia.....	II-74
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.....	III-1
3.1	Kinerja Keuangan	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-1
3.1.2	Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-4
3.2	Kerangka Pendanaan.....	III-7
3.2.1	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan mengikat serta prioritas utama.....	III-7
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III-13
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1	Aspek Pemerintahan	IV-1
4.1.2	Aspek Sosial Budaya.....	IV-2
4.1.3	Aspek Ekonomi.....	IV-4
4.2	Isu Strategis.....	IV-5
4.2.1	Penyelenggaraan Pemerintahan.....	IV-6
4.2.2	Pendidikan.....	IV-6
4.2.3	Kesehatan.....	IV-7
4.2.4	Ekonomi.....	IV-8
4.2.5	Pencapaian Sasaran Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015.....	IV-9
4.2.6	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.....	IV-12
4.2.7	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015.....	IV-20
4.2.8	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025.....	IV-25
4.2.9	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi.....	IV-26
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-2
5.2.1	Tujuan dan Sasaran	V-2
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Misi I	VI-1
6.2	Strategi dan Arah Kebijakan Misi II	VI-1
6.3	Strategi dan Arah Kebijakan Misi III	VI-2
6.4	Strategi Dan Arah Kebijakan Misi IV.....	VI-2

BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	IX-1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.....	X-1
	10.1 Pedoman Transisi.....	X-1
	10.2 Kaidah Pelaksanaan dan Konsistensi Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD..	X-1
	10.3 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pencapaian Program RPJMD dan Penguatan Kemampuan dan Kapasitas DPRD dan Stakeholder dan Non Pemerintah.....	X-2
BAB XI	PENUTUP	XI-1

DAFTAR TABEL

	<u>halaman</u>
Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi	II - 1
Tabel 2.2. Tata Guna Lahan di Kota Bukittinggi	II - 4
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi menurut Jenis Kelamin.....	II - 5
Tabel 2.4. Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi	II - 5
Tabel 2.5. Penduduk Kota Bukittinggi menurut Kelompok Umur	II - 6
Tabel 2.6. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005 s.d 2009 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kota Bukittinggi (dalam Jutaan)	II - 9
Tabel 2.7. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005 s.d 2009 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Kota Bukittinggi (dalam Jutaan)	II - 10
Tabel 2.8. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005 s.d 2009 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Bukittinggi	II - 11
Tabel 2.9. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Konstan (Hk) Tahun 2009 Kota Bukittinggi ...	II - 12
Tabel 2.10. PDRB Perkapita Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi.....	II - 13
Tabel 2.11. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 15
Tabel 2.12. Perkembangan Angka Partispasi Murni (APM) Kota Bukittinggi	II - 15
Tabel 2.13. Angka Partisipasi Murni Tahun 2009 menurut Kecamatan Kota Bukittinggi	II - 16
Tabel 2.14. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 17
Tabel 2.15. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2009 menurut Kecamatan Kota Bukittinggi	II - 18
Tabel 2.16. Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 18
Tabel 2.17. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi.....	II - 19
Tabel 2.18. Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi	II - 20
Tabel 2.19. Angka Kriminalitas Kota Bukittinggi Tahun 2009.....	II - 21
Tabel 2.20. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2009 Kota Bukittinggi	II - 22
Tabel 2.21. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 23
Tabel 2.22. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 24
Tabel 2.23. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kota Bukittinggi.....	II - 25

Tabel 2.24. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 25
Tabel 2.25. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kota Bukittinggi.....	II - 26
Tabel 2.26. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 27
Tabel 2.27. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 28
Tabel 2.28. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 28
Tabel 2.29. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah per Kecamatan Tahun 2009 Kota Bukittinggi.....	II - 29
Tabel 2.30. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi.....	II - 29
Tabel 2.31. Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2009 Kota Bukittinggi	II - 30
Tabel 2.32. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 30
Tabel 2.33. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2009 Kota Bukittinggi	II - 31
Tabel 2.34. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Penduduk Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 32
Tabel 2.35. Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan Tahun 2009 Kota Bukittinggi.....	II - 33
Tabel 2.36. Jumlah Dokter Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 33
Tabel 2.37. Jumlah Dokter menurut KecamatanTahun 2009 Kota Bukittinggi.....	II - 34
Tabel 2.38. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi ...	II - 35
Tabel 2.39. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 35
Tabel2.40. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2009 Kota Bukittinggi.....	II - 36
Tabel 2.41. Perhitungan Tingkat Pelayanan PDAM Kota Bukittinggi.....	II - 36
Tabel 2.42. Kualitas Bangunan Perumahan Kota Bukittinggi	II - 37
Tabel 2.43. Kegiatan Bedah Rumah Kota Bukittinggi	II - 38
Tabel 2.44. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 39
Tabel 2.45. Gambaran Umum Irigasi Kota Bukittinggi	II - 40
Tabel 2.46. Dokumen Teknis Kota Bukittinggi.....	II - 41
Tabel 2.47. Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2005 s.d 2009.....	II - 42
Tabel 2.48. Rasio Ijin Trayek Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 43

Tabel 2.49. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 44
Tabel 2.50. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 44
Tabel 2.51. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 45
Tabel 2.52. Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 46
Tabel 2.53. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 46
Tabel 2.54. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 47
Tabel 2.55. Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 48
Tabel 2.56. Jumlah BPR/LKM Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 48
Tabel 2.57. Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Kota Bukittinggi Tahun 2009	II - 49
Tabel 2.58. Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Kota Bukittinggi 2009	II - 50
Tabel 2.59. Penduduk 10 Tahun ke atas menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2009 Kota Bukittinggi	II - 52
Tabel 2.60. Penduduk Usia 15 Tahun keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2009 Kota Bukittinggi	II - 52
Tabel 2.61. Rasio Wartel / Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 55
Tabel 2.62. Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 55
Tabel 2.63. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 56
Tabel 2.64. Kelompok Binaan LPM Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi ..	II - 56
Tabel 2.65. Kelompok Binaan PKK Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi...	II - 57
Tabel 2.66. Jumlah LSM Aktif Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi.....	II - 58
Tabel 2.67. Jumlah Perpustakaan Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi....	II - 58
Tabel 2.68. Jumlah Pengunjung PerpustakaanTahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 59
Tabel 2.69. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 60
Tabel 2.70. Rasio Jumlah Pos Siskamling per Kecamatan Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 61
Tabel 2.71. Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 61

Tabel 2.72. Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 62
Tabel 2.73. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 63
Tabel 2.74. Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 63
Tabel 2.75. Angka Konsumsi RT per Kapita (Ribuan) Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 65
Tabel 2.76. Produktivitas per Sektor (jutaan rupiah) Kota Bukittinggi.....	II - 65
Tabel 2.77. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 67
Tabel 2.78. Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2009 Kota Bukittinggi.....	II - 67
Tabel 2.79. Rasio Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi	II - 68
Tabel 2.80. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kota Bukittinggi.....	II - 69
Tabel 2.81. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya Kota Bukittinggi	II - 70
Tabel 2.82. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kota Bukittinggi.....	II - 70
Tabel 2.83. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan / Hotel Kota Bukittinggi ...	II - 71
Tabel 2.84. Angka Kriminalitas Kota Bukittinggi	II - 72
Tabel 2.85. Jumlah Demonstrasi Kota Bukittinggi.....	II - 73
Tabel 2.86. Lama Proses Perijinan Kota Bukittinggi	II - 73
Tabel 2.87. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Bukittinggi...	II - 74
Tabel 2.88. Rasio Ketergantungan Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi ..	II - 75
Tabel 3.1. Rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 s/d 2010 Kota Bukittinggi	III - 3
Tabel 3.2. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Bukittinggi	III - 5
Tabel 3.3. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bukittinggi	III - 5
Tabel 3.4. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bukittinggi	III - 6
Tabel 3.5. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Bukittinggi	III - 8
Tabel 3.6. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Bukittinggi.....	III - 9
Tabel 3.7. Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Bukittinggi.....	III - 10
Tabel 3.8. Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Bukittinggi.....	III - 11
Tabel 3.9. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bukittinggi.....	III - 11
Tabel 3.10. Sisa Lebih (Rill) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Bukittinggi	III - 12

Tabel 3.11. Proyeksi Sisa Lebih (Rill) Pembiayaan Anggaran Kota Bukittinggi.....	III – 13
Tabel 3.12. Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi	III – 14
Tabel 3.13. Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi	III – 15
Tabel 4.1. Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2010 – 2014 ...	IV – 15
Tabel 5.1. Hubungan Hirarkis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	V – 7
Tabel 5.2. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Bukittinggi.....	V – 27
Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi.....	IX - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat perundang-undangan di atas, dan dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi 2006 – 2025 dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006. Disamping itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah memiliki Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Periode 2010 - 2015 hasil pemilihan Kepala Daerah langsung sudah dilantik, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari RPJPD Kota Bukittinggi berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta mengacu kepada RPJM Nasional tahun 2009 - 2013. RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015 ini juga memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015, Pemerintah Kota Bukittinggi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan lebih lanjut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan tanggal 21 Oktober 2010

memuat pedoman teknis penyusunan RPJMD yang merupakan standar bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun dokumen perencanaan tersebut.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4503);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
 25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/ 2010, Nomor PMK.95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
38. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11);

40. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13);
42. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
43. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Bukittinggi merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

RPJMD Kota Bukittinggi merupakan sub sistem dari RPJM Nasional yang memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini RPJMD Provinsi Sumatera Barat telah mengacu pada RPJM Nasional, sehingga kaitan yang lebih spesifik adalah antara RPJMD Kota Bukittinggi terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat terdapat sinergi dalam pencapaian tujuan nasional.

RPJMD Kota Bukittinggi tidak terlepas dari dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006, karena penyusunan dokumen ini merupakan penjabaran dokumen dimaksud berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. RPJMD Kota Bukittinggi digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 juga mengacu pada kebijakan pemanfaatan ruang (RTRW), hal ini terkait dengan kebijakan tata guna lahan dan ruang wilayah dalam penyelenggaraan program kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan kota. Dimana dalam penyusunan RPJMD ini telah memperhatikan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi.

Terkait dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, maka sesuai pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, maka akan dilakukan kajian tersendiri di luar RPJMD ini untuk penyusunan KLHS terhadap RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015.

1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Memuat Latar Belakang penyusunan RPJMD, Dasar Hukum, Hubungan antar dokumen, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan.
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
	Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Kerangka Pendanaan.
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
	Memuat Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah dan Isu-Isu Strategis Daerah.
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
	Menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan Misi, dari Misi 1 sampai Misi 4.
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	Menguraikan tentang Kebijakan Umum dan Program Prioritas, Indikator Kinerja dan target kinerja dan Kebutuhan Pendanaan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan

BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
	Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
	Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
	Bab ini memuat Pedoman Transisi, Kaidah Pelaksanaan RPJMD
BAB XI	PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi, misi Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

1.5.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi adalah :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun Renstra SKPD periode 2010-2015;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program pembangunan periode 2010-2015;
3. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota pada akhir masa jabatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Data dan Informasi Kondisi Umum Daerah

Data dan informasi yang berhubungan dengan gambaran umum kondisi daerah yang mencakup data kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Kota Bukittinggi.

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah 25,239 km², berdasarkan UU No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah. Kota ini relatif kecil, karena hanya 0,06% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Wilayah administratif Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dan 24 kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi
Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km²)
1	Guguk Panjang	7	6,831
2	Mandiingin Koto Selayan	9	12,156
3	Aur Birugo Tigo Baleh	8	6,252

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Tahun, 2010

Secara Geografis Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat dan di tengah-tengah Kabupaten Agam, pada koordinat 100⁰.21'-100⁰.25' Bujur Timur dan 00⁰.19'-00⁰.19' Lintang Selatan. Dengan demikian secara administratif Kota Bukittinggi berbatasan dengan wilayah Kabupaten Agam sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Nagari Gadut dan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang,
- Sebelah Selatan dengan Nagari Banuhampu Kecamatan Banuhampu,
- Sebelah Barat dengan Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang Kec. IV Koto, dan
- Sebelah Timur dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam.

2.1.2. Topografi

Wilayah Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 780 – 950 m dari permukaan laut dengan Topografi wilayah pada umumnya bergelombang dan berbukit, sehingga udaranya sejuk dan menyegarkan. Kondisi daerah seperti ini menyebabkan Kota Bukittinggi menjadi daerah kunjungan wisata dan tempat peristirahatan yang terkenal di Provinsi Sumatera Barat. Namun permukaan wilayah yang bergelombang dan berbukit ini juga berakibat terhadap terbatasnya wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemukiman dan kegiatan pembangunan perkotaan. Konsekuensinya penduduk tidak tersebar merata dalam wilayah kota. Pada wilayah-wilayah tertentu penduduknya sangat padat dan sebaliknya pada wilayah-wilayah tertentu sangat jarang. Walaupun demikian kondisi alam berupa perbukitan dengan lapisan Tuff dari lereng Gunung Merapi ini menyebabkan tanahnya subur sehingga sangat cocok untuk pertanian.

2.1.3. Geologi

Wilayah Kota Bukittinggi didominasi oleh kelompok batuan beku yang berasal dari aktivitas gunung Merapi, gunung Singgalang dan gunung Tandikat serta dari kaldera danau Maninjau, yang umumnya bersifat andesitic.

Jenis batuan yang terdapat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, yaitu:

- a. Batuan Fillit, kwarsit serta batu lanau metamorf (pTu) berwarna merah sekisan, menunjukkan laminasi dan lineasi yang biasanya mendasari bukit-bukit serta merupakan batuan yang paling tua.
- b. Batu Gamping hablur (pTIs). Berwarna putih sampai keabu-abuan pada singkapan segar dan kelabu kotor pada yang lapuk, besar butir 0,5 – 5 mm, umumnya pejal dan berongga. Mempunyai ciri khas membentuk punggung-punggungan tajam dan bukit terisolir.
- c. Batuan lanau bergradasi ke batuan pasir meta lunak yang terdiri dari butir-butir kwarsa dalam masa lempungan. Batuan ini ditemui di wilayah timur laut Kota Bukittinggi.
- d. Kwarsit bersifat kompak yang terdapat di beberapa tempat
- e. Batuan Granit dijumpai di bagian barat Bukittinggi, berupa stok berkompensasi antar granit dan diorte kwarsa
- f. Andesit dan profit dasit, umumnya mengandung horn blende.

Batuan tuft batu apung mempunyai penyebaran sangat luas hampir 65% kawasan Ngarai Sianok dan merupakan batuan penyusun utama dataran tinggi Agam. Secara umum batuan ini mempunyai sifat fisik rapuh/retas dan mudah tergerus, sehingga daya dukung

kurang mantap dan mudah runtuh bila mengalami gangguan, terutama oleh aliran air hujan dan air tanah.

Dari sisi potensi sumber daya alam, di Bukittinggi tidak terdapat kekayaan berupa sumberdaya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian tidak hanya di Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah.

2.1.4. Hidrologi

Kota Bukittinggi dialiri sungai kecil, yaitu Batang Tambuo di sebelah timur dengan lebar 5 – 7 m, Batang Sianok di sebelah Barat dengan lebar 12 – 15 m dan Batang Agam di wilayah kota dengan lebar 5 - 7 m. Sepanjang perbatasan sebelah Barat Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam membentang Ngarai yang disebut dengan Ngarai Sianok yang dibawahnya mengalir Sungai Batang Sianok. Kondisi ini semakin mempercantik Kota Bukittinggi untuk menjadi kota kunjungan dengan objek wisata alamnya.

2.1.5. Klimatologi

Kondisi iklim Kota Bukittinggi termasuk tropis basah dengan kelembaban minimum 82% dan maksimum 92%, suhu udara minimum 16,1⁰ c dan maksimum mencapai 21,9⁰c dan tekanan udara berkisar antara 22 – 25 knots. Kondisi agro klimat di atas menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat sejuk dan sangat cocok untuk peristirahatan.

2.1.6. Tata Guna Lahan

Dari 25,239 km² luas Kota Bukittinggi, 27,38% merupakan permukiman, 26,02% penggunaan untuk lahan sawah, 11,20% penggunaannya untuk ladang. Lebih lanjut komposisi penggunaan lahan/tanah Kota Bukittinggi sampai tahun 2010 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.2.
Tata Guna Lahan di Kota Bukittinggi

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persen Luas (%)
1	Hutan Kota	222.937	8.617
2	Kebun Campuran	247.569	9.569
3	Kolam	2.792	0.108
4	Ladang	301.561	11.656
5	Sawah	700.982	27.095
6	Semak Belukar	156.823	6.062
7	Lapangan Olahraga dan Rekreasi	9.913	0.383
8	Permukiman	737.561	28.509
9	Perdagangan dan Jasa	98.899	3.823
10	Fasilitas Pendidikan	52.027	2.011
11	Fasilitas Kesehatan	5.797	0.224
12	Fasilitas Peribadatan	1.712	0.066
13	Fasilitas Sosial Budaya	3.827	0.148
14	Perkantoran	18.986	0.734
15	Pemerintahan	7.447	0.288
16	Militer	11.584	0.448
17	Industri	6.710	0.259

Sumber: Hasil Analisis, 2010 RTRW Kota Bukittinggi

Tabel di atas memperlihatkan, bahwa wilayah Kota Bukittinggi yang relatif kecil sudah dimanfaatkan dan dibangun untuk menunjang fungsi kota. Dengan demikian ini menunjukkan, bahwa lahan yang tersedia sangat terbatas, dan potensi permasalahan yang disebabkan oleh keterbatasan lahan juga sangat besar.

2.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi alam dan lingkungan Kota Bukittinggi, maka wilayah kota Bukittinggi termasuk daerah/kawasan rawan bencana berupa gempa bumi dan longsor. Kawasan yang rawan bencana longsor berada sepanjang bibir Ngarai Sianok meliputi ketiga kecamatan yang ada. Pada tanggal 6 Maret 2007, di Bukittinggi terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,2 pada skala richter yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada beberapa infrastruktur kota dan masyarakat. Bibir Ngarai selebar 2 meter runtuh ke dasar Ngarai pada beberapa lokasi, sehingga terjadi pendangkalan aliran sungai di beberapa titik dan bergesernya daerah aliran sungai yang berpotensi mengikis tebing ngarai. Untuk itu

perlu diupayakan normalisasi aliran sungai Batang Sianok, sehingga tidak mengikis tebing ngarai, baik ke wilayah Kota Bukittinggi ataupun Kabupaten Agam.

2.1.8. Kondisi Demografis Kota Bukittinggi

Pada tahun 2009, penduduk Kota Bukittinggi berjumlah 107.805 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk adalah 1,78%. Laju pertumbuhan penduduk ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2008 yang sebesar 1,79%. Perkembangan dan dinamika kondisi demografis Kota Bukittinggi ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin

NO.	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)			LAJU PERTUMBUHAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.	2009	52.234	54.571	107.805	1,78
2.	2008	52.366	53.679	106.045	1,79
3.	2007	51.496	52.782	104.278	1,81
4.	2006	50.491	51.737	102.228	1,78

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2010

Tabel di atas memperlihatkan bahwa komposisi antara penduduk laki-laki dengan perempuan hampir seimbang. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2000 – 2009 rata-rata 1,78% pertahun. Pertumbuhan jumlah penduduk juga diikuti dengan meningkatnya kepadatan penduduk di Kota Bukittinggi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi

NO.	TAHUN	LUAS WILAYAH (km ²)	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa)
1.	2009	25,239	107.805	4.271
2.	2008	25,239	106.045	4.202
3.	2007	25,239	104.278	4.132
4.	2006	25,239	102.228	4.050

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2010

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata kepadatan penduduk Kota Bukittinggi tahun 2009 adalah 4,271 jiwa/km, naik dibandingkan tahun 2008 yang hanya 4,202 jiwa/km. Namun kepadatan ini tidak merata di seluruh kecamatan. Kecamatan Guguk Panjang adalah kecamatan terpadat, yakni 5,774 jiwa/km diikuti Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 3,896 jiwa/km dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 3,620 jiwa/km.

Selanjutnya ditinjau menurut kelompok umur, penduduk kelompok umur 15-19 tahun adalah yang tertinggi di Kota Bukittinggi, yakni sebanyak 13,623 jiwa. Diikuti penduduk kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 11.942 jiwa. Komposisi penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	6.118	5.824	11.942
2	5-9	5.528	5.169	10.697
3	10-14	5.542	5.181	10.633
4	15-19	6.643	6.980	13.623
5	20-24	4.563	5.409	9.972
6	25-29	4.601	5.045	9.646
7	30-34	4.158	4.196	8.354
8	35-39	3.923	3.799	7.722
9	40-44	3.368	3.237	6.605
10	45-49	2.640	2.360	5.000
11	50-54	1.667	1.629	3.296
12	55-59	1.383	1.514	2.097
13	60-64	1.180	1.374	2.554
14	65 +	2.010	2.854	4.864

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2010

Dengan tingginya jumlah penduduk yang berusia 15 – 19 tahun, berarti penduduk Kota Bukittinggi usia sekolah juga relatif besar. Dengan demikian kebijakan bidang pendidikan harus memperoleh porsi lebih besar. Dan untuk kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang akan terjadi peningkatan penduduk berusia produktif 20 - 29. Artinya, harus ada upaya peningkatan lapangan kerja baru agar penduduk produktif tersebut dapat

tertampung pada lapangan kerja yang ada, sehingga tidak terjadi peningkatan jumlah pengangguran.

Disamping penduduk tetap yang berdomisili dan ber KTP Bukittinggi sebagaimana diuraikan di atas, ada situasi yang menarik dari demografis Kota Bukittinggi. Tingkat mobilitas penduduk cukup tinggi antara Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan lokal dan regional yang mempunyai daya tarik (*magnitude*) terhadap daerah *commuter* dan *hinterlandnya*, maka proyeksi penduduk Kota Bukittinggi pada siang hari di perkirakan mencapai 350.000 jiwa. Migrasi penduduk sementara ke dalam Kota Bukittinggi pada tahun 2007 mengindikasikan kecenderungan meningkat antara lain disebabkan banyaknya bermunculan pedagang kaki lima musiman, meningkatnya pelayanan kesehatan, pendidikan serta kunjungan lain seperti : studi banding, seminar/ konferensi, serta kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Kota, maka sebetulnya sasaran dari setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah penduduk pada siang hari yang berjumlah kurang lebih 350.000 jiwa, terutama pada sektor perdagangan dan jasa dan pariwisata. Berkaitan dengan hal ini, maka sudah suatu keharusan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk melakukan kerjasama dengan daerah sekitar termasuk Pemerintah Provinsi dalam membangun Kota Bukittinggi, karena hasil atau dampak pembangunan Kota Bukittinggi tidak hanya untuk masyarakat Kota Bukittinggi tapi juga untuk masyarakat daerah sekitar.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang maksimal tentunya diperlukan aparatur yang berkualitas. Pada saat sekarang ini aparatur Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah 2.167 orang. Dilihat dari komposisi tingkat pendidikan PNS Kota Bukittinggi didominasi oleh tingkat pendidikan S1 dengan besaran 34,06% atau berjumlah 738 orang. Kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan SMU sebanyak 714 orang atau setara dengan 32,95% dari total PNS Kota Bukittinggi. Jika dilihat menurut golongan, PNS Kota Bukittinggi yang terbanyak ada pada golongan III/a yakni sebanyak 305 orang, kemudian Golongan III/b sebanyak 299 orang,

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran umum dalam aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan suatu negara dan daerah. Adapun indikator kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari data PDRB, PDRB perkapita dan indeks Gini/Koefisien Gini.

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

Tabel 2.6.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005 s.d 2009
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Kota Bukittinggi (dalam jutaan)

NO	Sektor	2005		2006		2007		2008		2009	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	20.783,83	2,73	20.977,34	2,59	20.015,60	2,32	18.797,50	2,05	18.821,59	1,94
2	Pertambangan dan Penggalian	346,25	0,05	196,71	0,02	118,03	0,01	60,80	0,01	24,66	0,00
3	Industri Pengolahan	84.048,75	11,02	87.898,18	10,86	92.863,53	10,77	98.146,25	10,68	100.534,32	10,37
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	18.655,10	2,45	19.038,27	2,35	20.494,34	2,38	21.525,46	2,34	21.442,02	2,21
5	Bangunan	28.986,90	3,80	30.248,00	3,74	32.024,12	3,71	33.961,57	3,70	35.452,24	3,66
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	158.240,77	20,75	168.109,99	20,76	180.653,66	20,95	195.556,50	21,28	207.549,34	21,41
7	Angkutan dan Komunikasi	176.127,57	23,10	190.110,82	23,48	204.077,40	23,67	218.972,64	23,83	233.020,28	24,03
8	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	74.894,88	9,82	79.585,38	9,83	85.124,28	9,87	91.404,36	9,95	98.019,44	10,11
9	Jasa-jasa	200.349,02	26,28	213.448,93	26,36	226.786,58	26,30	240.489,61	26,17	254.727,00	26,27
	PDRB	762.433,07	100	809.613,62	100	862.157,54	100	918.914,68	100	969.590,89	100

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2005-2009) sektor jasa-jasa, sektor angkutan dan komunikasi, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan merupakan yang paling besar memberikan kontribusi untuk PDRB Kota Bukittinggi. Hal ini sesuai dengan pengembangan sektor ekonomi Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan sebagai rencana pembangunan kota.

Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa sektor pertanian semakin mengalami penurunan dari tahun 2005 hingga 2009 mencapai sebesar 1,94% dengan laju penurunan sebesar 0,79%. Hal ini sesuai jika dilihat dari segi ekonomi, struktur mata pencaharian kota termasuk non-agraris, didominasi oleh perdagangan, jasa dan lain-lain. Penurunan kontribusi sektor pertanian ini diiringi dengan kenaikan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan dan sektor jasa-jasa.

Struktur ekonomi suatu daerah sangat tergantung dari seberapa besar kemampuan sektor-sektor dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin besar nilai tambah yang

dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi, maka semakin besar pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sektor ekonomi tersebut.

Tabel 2.7.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005 s.d 2009
Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bukittinggi (dalam jutaan)

NO	Sektor	2005		2006		2007		2008		2009	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	31.802,02	2,93	36.198,28	2,85	38.679,30	2,69	41.043,23	2,42	42.806,29	2,28
2	Pertambangan dan Penggalian	547,25	0,05	377,82	0,03	227,04	0,02	154,57	0,01	68,76	0,00
3	Industri Pengolahan	109.150,19	10,05	125.694,40	9,91	147.590,36	10,28	175.356,67	10,32	183.225,45	9,74
4	Listrik,Gas dan Air bersih	34.771,35	3,20	36.688,18	2,89	40.532,19	2,82	43.510,51	2,56	44.482,09	2,36
5	Konstruksi	46.587,84	4,29	54.485,72	4,29	62.857,26	4,38	75.018,99	4,42	83.913,46	4,46
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	215.337,29	19,82	251.973,63	19,86	295.345,88	20,57	363.770,82	21,41	412.956,01	21,95
7	Pengangkutan dan Komunikasi angkutan dan Komunikasi	245.746,26	22,62	300.393,98	23,68	331.533,45	23,09	388.019,07	22,84	427.394,24	22,72
8	Keuangan, sewa, dan Js. Perusahaan	128.648,22	11,84	146.485,84	11,55	166.875,57	11,62	198.000,84	11,65	225.415,98	11,98
9	Jasa-jasa	273.894,79	25,21	316.361,05	24,94	352.098,36	24,52	414.138,88	24,38	460.925,64	24,50
	PDRB	1.086.485,21	100	1.268.658,90	100	1.435.739,41	100	1.699.013,58	100	1.881.187,92	100

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa PDRB atas dasar harga berlaku dapat menunjukkan pergeseran serta struktur ekonomi suatu daerah, maka dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2005-2009 untuk sektor pertanian, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-jasa mengalami fluktuasi. Sedangkan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor konstruksi mengalami peningkatan yang signifikan. Terjadinya peningkatan atau menurunnya masing-masing sektor ekonomi yang berperan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi disebabkan antara lain karena terjadinya pergeseran dalam struktur perekonomian masyarakat di Kota Bukittinggi. Akibat pengaruh resesi ekonomi secara nasional, serta seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Bukittinggi, masyarakat mencoba mencari alternatif-alternatif baru yang mungkin bisa dikembangkan,

hal ini akan terus berlanjut sesuai dengan tingkat kemampuan serta tradisi masyarakat itu sendiri.

Kemudian jika dilihat dari nominal PDRB atas dasar berlaku mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu Rp.1.086.485,21 pada tahun 2005 menjadi Rp.1.881.187,92 pada tahun 2009. Walaupun secara riil naik cukup besar, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadi peningkatan produktivitas, karena didalamnya masih terdapat pengaruh inflasi.

Untuk melihat peranan masing-masing sektor dalam perekonomian suatu daerah, maka penyajian PDRB dalam bentuk persentase distribusi sektoral terhadap total PDRB sangat penting. Persentase distribusi sektoral terhadap total PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang merupakan rangkuman dari dua tabel sebelumnya.

Tabel 2.8.
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005 s.d 2009
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk)
Kota Bukittinggi

NO	Sektor	2005		2006		2007		2008		2009	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	2,93	2,73	2,85	2,59	2,69	2,32	2,42	2,05	2,28	1,94
2	Pertambangan dan Penggalan	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	10,05	11,02	9,91	10,86	10,28	10,77	10,32	10,68	9,74	10,37
4	Listrik,Gas dan Air bersih	3,20	2,45	2,89	2,35	2,82	2,38	2,56	2,34	2,36	2,21
5	Konstruksi	4,29	3,80	4,29	3,74	4,38	3,71	4,42	3,70	4,46	3,66
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,82	20,75	19,86	20,76	20,57	20,95	21,41	21,28	21,95	21,41
7	Pengangkutan dan Komunikasi	22,62	23,10	23,68	23,48	23,09	23,67	22,84	23,83	22,72	24,03
8	Keuangan, sewa, dan Js. Perusahaan	11,84	9,82	11,55	9,83	11,62	9,87	11,65	9,95	11,98	10,11
9	Jasa-jasa	25,21	26,28	24,94	26,36	24,52	26,30	24,38	26,17	24,50	26,27
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi

Tabel 2.9.
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan harga Konstan (Hk) Tahun 2009
Kota Bukittinggi

NO	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian	2,28	1,94
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	9,74	10,37
4	Listrik, Gas dan Air bersih	2,36	2,21
5	Konstruksi	4,46	3,66
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,95	21,41
7	Pengangkutan dan Komunikasi	22,72	24,03
8	Keuangan, sewa, dan Jasa Perusahaan	11,98	10,11
9	Jasa-jasa	24,50	26,27
	PDRB	100	100

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi

Tabel di atas mengemukakan bahwa dalam struktur perekonomian Kota Bukittinggi pada tahun 2009 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,51%, peran terbesar ditempati oleh lima sektor utama, yaitu sektor jasa-jasa, sektor angkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor industri pengolahan.

b. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. Disamping itu juga ada indikator lain yang lebih menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk, yaitu Pendapatan Regional Perkapita, dimana Pendapatan Regional Perkapita diperoleh setelah PDRB dikurangi dengan penyusutan dan Pajak Tak Langsung

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2005 PDRB Perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dan sekaligus relatif rendahnya pertumbuhan penduduk jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan PDRB. Pada tahun 2009 PDRB Perkapita Kota Bukittinggi mencapai 17,44 juta rupiah atau naik sebesar 8,91% dari tahun sebelumnya yaitu setara dengan nominal

1,42 juta rupiah. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10.
PDRB Perkapita Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
Nilai PDRB (Rp)	1.086.485.210.000	1.268.658.900.000	1.435.739.410.000	1.699.013.580.000	1.881.187.920.000
Jumlah Penduduk (jiwa)	101.276	102.228	104.278	106.045	107.805
PDRB perkapita (Rp/jiwa)	10.727.963,33	12.375.348,97	13.768.382,69	16.021.628,37	17.449.913,45

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi

c. Indeks Gini/Koefisien Gini

Untuk melihat distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dihitung dengan koefisien gini . Hal ini ditetapkan sebagai rasio dengan nilai antara 0 dan 1, koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. 0 berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis) dan 1 berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (di mana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Ketimpangan dikatakan sangat tinggi apabila nilai koefisien gini berkisar antara 0,71-1,0. Ketimpangan tinggi dengan nilai koefisien gini 0,5-0,7. Ketimpangan sedang dengan nilai gini antara 0,36-0,49, dan ketimpangan dikatakan rendah dengan koefisien gini antara 0,2-0,35. Jika dilihat perbandingan antara desa dan kota, angka koefisien gini di pedesaan selalu lebih rendah daripada di perkotaan. Koefisien gini Indonesia tahun 2008 sekitar 0,343 atau 34,3 %.

Keuntungan dengan menggunakan indeks gini sebagai ukuran ketidakmerataan adalah :

- Koefisien Gini menunjukkan ukuran ketidaksetaraan melalui sebuah alat analisis rasio, daripada variabel tidak representatif dari sebagian besar masyarakat, seperti pendapatan per kapita atau produk domestik bruto.
- Dapat digunakan untuk membandingkan distribusi pendapatan penduduk di berbagai sektor maupun negara, misalnya koefisien Gini untuk daerah perkotaan yang berbeda dari daerah pedesaan di banyak negara (walaupun di negara Amerika Serikat nilai koefisien gini di wilayah perkotaan dan pedesaan hampir sama).
- Indeks gini dapat membandingkan lintas daerah atau lintas negara dan mudah diinterpretasikan. PDB statistik sering dikritik karena tidak mewakili perubahan bagi seluruh penduduk. Indeks gini akan menunjukkan seberapa besar pendapatan perkapita ternyata mengalami ketimpangan. Jadi meskipun pendapatan perkapita naik, namun apabila indeks gini masih tinggi artinya kemiskinan bisa jadi masih ada dalam masyarakat.
- Koefisien Gini yang dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana distribusi pendapatan telah berubah dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, sehingga sangat mungkin untuk melihat apakah ketidakmerataan meningkat atau menurun.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

Indikator kesejahteraan sosial digambarkan dengan kondisi pendidikan dan kesehatan sebagai indikator pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau yang disebut juga dengan Human Development Index (HDI).

2.2.2.1. Pendidikan

Indikator pendidikan yang disajikan dalam hal Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang ditamatkan.

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari.

Tabel 2.11.
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah penduduk usia diatas 10 tahun yang bisa membaca dan menulis	-	80.410	81.478	82.852	84.489
2	Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas	-	80.720	82.389	83.779	85.166
3	Angka melek huruf	-	99,52	99,89	98,89	99,20

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kota Bukittinggi

Dari tabel di atas terlihat Angka Melek Huruf di Kota Bukittinggi sejak tahun 2006 s/d Tahun 2009 memperlihatkan angka yang cukup tinggi yaitu mendekati angka 100%, hal ini menunjukkan bahwa sejak Tahun 2006 seluruh penduduk Kota Bukittinggi telah mampu bisa membaca dan menulis dan menyerap informasi dari berbagai media serta memiliki potensi perkembangan intelektual yang tinggi sekaligus kontribusi terhadap pembangunan Kota Bukittinggi

b. Angka Partisipasi murni

APM merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Secara umum capaian APM periode tahun 2006-2008 meningkat disemua jenjang pendidikan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.12.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	12.520	11.379	12.615	12.643	13.380
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	11.274	12.532	12.329	12.329	12.329
1.3.	APM SD/MI	111,05	90,80	102,32	102,55	108,52
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun	5.525	5.700	5.495	5.649	5.807

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
	yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5.185	5.480	5.799	5.896	6.104
2.3.	APM SMP/MTs	106,56	104,0	97,4	93,2	92,5
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	7.955	7.295	7.555	7.040	7.421
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	12.757	7.228	5.538	5.538	5.438
3.3.	APM SMA/MA/SMK	62,36	101,05	136,42	127,12	136,47

Sumber: Profil Pendidikan Kota Bukittinggi Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Dari tabel diatas terlihat bahwa APM pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dari Tahun 2005 s/d Tahun 2009 diatas 100%, hal ini menunjukkan semua penduduk usia 7-12 Tahun sudah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar, hal ini disebabkan oleh karena sekolah dasar di Kota Bukittinggi banyak diminati oleh penduduk hinterland Kota Bukittinggi. APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami penurunan pada tahun 2009 sedangkan APM SMA/MA/SMK semakin tinggi di Tahun 2009 yang mana hal ini menunjukkan bahwa anak usia 13-15 tahun dari luar Kota Bukittinggi banyak yang bersekolah di Kota Bukittinggi melebihi dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi yang berusia 13-15 Tahun.

Tabel 2.13.
Angka Partisipasi Murni Tahun 2009 menurut Kecamatan
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18th	APM
1	Guguk Panjang	6.185	4.412	140,16	763	1.973	38,67	1.622	1.973	234,26
2	Mandiangan Koto Selayan	3.798	3.961	99,88	1.582	2.047	77,28	4.802	1.598	112,77
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3.317	3.956	83,85	855	1.779	48,06	997	1.867	53,40
	Jumlah	13.300	12.329	107,88	3.200	5.779	55,37	7.421	5.438	136,47

Sumber: Profil Pendidikan Kota Bukittinggi Tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI yang tertinggi adalah pada Kecamatan Guguk Panjang yakni 140,16 kemudian Kecamatan Mandiangin Koto Salayan 99,98 dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 83,85. Pada tingkat SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni tertinggi berada pada Kecamatan Mandiangin koto Salayan yakni 77,28, kemudian Kecamatan Aur Birugo Tigo baleh 48,06 dan Kecamatan Guguk Panjang 38,67. Selanjutnya pada tingkat SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni Kecamatan Guguk Panjang tertinggi dengan angka 234,26, kemudian Kecamatan Mandiangin Koto Salayan 112,77 dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 53,40. Hal ini mencerminkan sebaran keberadaan sekolah pada ketiga kecamatan tersebut. Kecamatan MKS memiliki wilayah yang relatif lebih luas dengan kepadatan sedang, dengan jumlah sekolah yang lebih banyak, menyebabkan pelajar dari kecamatan lain bersekolah di MKS, sehingga APM-nya lebih tinggi.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Untuk SD/MI Kota Bukittinggi tahun 2009 telah mencapai 125,04, kemudian APK SMP/MTs telah mencapai 133,69 dan APK SMA/MA/SMK telah mencapai 199,34. Lebih lengkap perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	14.373	13.222	13.125	14.724	15.416
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	11.274	12.532	12.329	12.329	12.329
1.3.	APK SD/MI	127,49	105,5	118,87	119,43	125,04
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	6.883	6.475	7.298	6.896	7.753

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5.185	5.980	5.799	5.799	5.799
2.3.	APK SMP/MTs	132,75	108,28	125,85	119,23	133,69
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	12.326	9.769	10.799	10.810	10.840
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	12757	7.228	5.538	5.538	5.438
3.3.	APK SMA/MA/SMK	96,62	135,15	194,99	195,20	199,34

Sumber: Profil Pendidikan Kota Bukittinggi Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Dilihat berdasarkan Angka Partisipasi Kasar menurut kecamatan, pada jenjang pendidikan SD/MI yang tertinggi berada pada Kecamatan Guguk Panjang yakni 161,04 kemudian Kecamatan Mandiangin Koto Salayan 113,66 dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 96,28. Selanjutnya Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan SMP/MTs yang tertinggi berada pada Kecamatan Guguk Panjang yakni 245,16, selanjutnya pada Kecamatan Mandiangin Koto Salayan 112,85 dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 34,06. Sedangkan APK pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK tertinggi berada pada Kecamatan Guguk Panjang 326,96 selanjutnya Kecamatan Mandiangin Koto Salayan 191,05 dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 71,56. Lebih jelas mengenai APK ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15.
Angka Partisipasi Kasar
Tahun 2009 menurut kecamatan Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	jumlah penduduk usia 13-15 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/SMK	jumlah penduduk usia 16-18th	APK
1	Guguk Panjang	7.105	4.412	161,04	4.837	1.973	245,16	6.451	1.973	326,96
2	Mandiangin Koto Salayan	4.502	3.961	113,66	2.310	2.047	112,85	3.053	1.598	191,05
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3.809	3.956	96,28	606	1.779	34,06	1.336	1.867	71,56
	Jumlah	15.416	12.329	125,04	7.753	5.799	133,70	10.840	5.438	199,34

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kota Bukittinggi

Seperti halnya APM, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada kecamatan MKS lebih tinggi, karena tersebar beberapa sekolah dari SD sampai SMA, yang memungkinkan siswa dari kecamatan lain sekolah di MKS.

d. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan, seperti pada table berikut:

Tabel 2.16.
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)
Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	APT	2005	2006	2007	2008	2009
1.	SD	11,67	11,91	11,91	11,91	23,51
2.	SMP	11,67	11,91	11,91	11,91	23,51
3.	SMA	5,31	6,53	6,53	6,53	11,06
4.	Perguruan Tinggi	5,77	6,28	6,28	6,28	10,41

Dari data tersebut terlihat, bahwa penduduk Kota Bukittinggi masih didominasi oleh penduduk yang berijazah SD dan SMP, sementara penduduk dengan ijazah SMA dan Perguruan Tinggi cenderung meningkat.

2.2.2.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan dilihat dari beberapa indikator berikut:

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Situasi derajat kesehatan dapat di lihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator adalah Angka Kematian Bayi. Pada tahun 2009 AKB cukup tinggi yaitu 17, kemudian mengalami penurunan sebesar 52,9 %menjadi 9 pada tahun 2010 dapat di

artikan bahwa program kesehatan Ibu dan Anak sebagai program prioritas pembangunan telah berhasil dalam menurunkan angka kematian bayi. Angka Kematian Bayi berdasarkan target Indonesia Sehat 2010 adalah 40 per 1000 kelahiran hidup. Indikator tersebut seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kota Bukittinggi

Hasil Sensus Penduduk				
Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
5	10	7	17	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

b. Angka usia harapan hidup

Usia harapan hidup penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 1980 adalah 54,4 angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1990 angka tersebut meningkat menjadi 61,6, tahun 2000 mencapai 67,4. Pada tahun 2010 usia harapan hidup penduduk Kota Bukittinggi mencapai usia 70,1 tahun, Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Bukittinggi mempunyai usia yang cukup panjang yaitu 70 tahun, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Angka Harapan Hidup
Kota Bukittinggi

Hasil Sensus Penduduk				
Tahun 1970	Tahun 1980	Tahun 1990	Tahun 2000	Tahun 2010
-	54,4	61,6	67,4	70,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

c. Persentase balita gizi buruk

Jumlah balita gizi buruk (dengan marasmus/kwasiorkor) pada tahun 2009 : nihil. Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan tidak ada nya balita yang menderita gizi buruk maka dapat dikatakan bahwa gizi balita di Kota Bukittinggi cukup baik sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kota Bukittinggi cukup baik.

2.2.2.3 Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja aktif dan penduduk yang sedang mencari Pekerjaan, yang merupakan pengangguran terbuka. Diluar dari itu adalah merupakan bukan angkatan kerja yang merupakan penduduk yang masih bersekolah, rumah tangga, purnakarya dan lain-lain. Untuk Pembangunan kesempatan kerja sasaran yang ingin dicapai adalah terbukanya informasi seluas-luasnya mengenai ketenagakerjaan dan ketersediaan lapangan kerja yang dapat diisi bagi masyarakat Kota Bukittinggi yang belum mendapatkan pekerjaan/tenaga kerja produktif untuk menurunkan tingkat pengangguran.

2.2.2.4 Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)

Secara umum angka kriminalitas di Bukittinggi masih relatif rendah, untuk ukuran kota kecil yang berpenduduk dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi. Namun angka kriminalitas Kota Bukittinggi yang tercatat di Polres Bukittinggi masih tergabung dengan wilayah Kabupaten Agam bagian timur. Kasus yang mendominasi adalah pencurian, penganiayaan dan pemerkosaan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19.
Angka Kriminalitas Kota Bukittinggi
Tahun 2009

Kasus	Diterima	Diputuskan
Pembunuhan	2	1
Penganiayaan Berat	18	11
Penculikan	0	0
Pencurian dengan Kekerasan	4	3
Pencurian dengan Pemberatan	56	22
Pencurian Ranmor	17	6
Pencurian Kawat Telepon	0	0
Pemerkosaan	18	17
Pembakaran	0	0
Senpi/Handak	0	0
Pemerasan	0	0
Penyelundupan	0	0
Kejahatan Terhadap Kepala Negara	0	0
Jumlah	115	60

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi tahun 2009

Kasus pembunuhan yang dilaporkan pada tahun 2009 sebanyak 2 kasus, sementara yang berhasil di tangani sebanyak 1 kasus. Kasus Penganiayaan Berat yang terjadi selama tahun 2009 adalah 18 kasus dan yang berhasil di tangani sebanyak 11 kasus. Pencurian dengan kekerasan terjadi sebanyak 4 kasus, hanya 1 kasus yang tidak berhasil diputuskan. Kasus yang paling banyak terjadi adalah pencurian dengan

pemberatan yaitu sebanyak 56 kasus, berhasil di tangani oleh pihak yang berwenang sebanyak 22 kasus. Pencurian kendaraan bermotor yang di laporkan terjadi sebanyak 17 kasus dan yang berhasil di tangani sebanyak hanya 6 kasus. Kasus pemerkosaan yang dilaporkan terjadi pada tahun 2009 sebanyak 18 kasus, hampir semua kasus dapat ditangani, hanya 1 kasus yang tidak dapat di selesaikan.

2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Ketersediaan sarana dan prasarana seni budaya dan olah raga di Kota Bukittinggi pada tahun 2009 relatif memadai, namun perlu peningkatan, seiring perkembangan jumlah penduduk dan mendukung fungsi kota. Tabel berikut menggambarkan kondisi tersebut.

Tabel 2.20.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2009
Kota Bukittinggi

No	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah Sarana Prasarana olahraga per 10.000 penduduk
1	35	4	14,38	25,5

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Tinjauan aspek pelayanan umum digambarkan dalam bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi. Gambaran pelayanan ditampilkan berupa rasio pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terhadap jumlah penduduk.

2.3.1. Pendidikan

Pelayanan pendidikan yang disajikan di sini meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

2.3.1.1 Pendidikan Dasar

Pelayanan umum pendidikan dasar di Kota Bukittinggi dilihat dari beberapa indikator yang disajikan berikut ini.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah

murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Secara kuantitatif APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Angka Partisipasi Sekolah pendidikan dasar di Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	12.520	11.379	12.615	12.643	13.380
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	11.274	12.532	12.329	12.329	12.329
1.3.	APS SD/MI	1.110,5	907,99	1.023,2	1.025,5	1.085,2
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	5.525	5.700	5.495	5.649	5.807
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5.185	5.480	5.799	5.896	6.104
2.3.	APS SMP/MTs	1.065,57	1.040,0	974,0	932,0	925,0

Tabel tersebut memperlihatkan APS yang relatif stabil untuk jenjang pendidikan SD, namun pada jenjang SMP cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 1000 penduduk usia 13 – 15 tahun ada anak yang tidak bersekolah. Banyak faktor yang menyebabkannya, seperti kemiskinan keluarga, sehingga anak diandalkan dalam ekonomi, anak drop out dari sekolah dan menelantarkan pendidikannya. Beberapa upaya terus dilakukan pemerintah, seperti membuka program paket B untuk SMP dan Pusat Kegiatan Belajar.

c. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah di Bukittinggi untuk pendidikan dasar terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22.
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah
Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	62	64	63	63	64
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	11.274	12.532	12.329	12.329	12.329
1.3.	Rasio	54,99	51,09	51,09	51,09	51,91
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	16	16	16	16	18
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5.185	5.980	5.799	5.799	5.799
2.3.	Rasio	30,86	26,76	27,59	27,59	31,04

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi

Tabel di atas memperlihatkan bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD relatif baik, sementara untuk SMP terus ditingkatkan untuk mendukung daya tampung siswa SMP.

Sementara itu dilihat dari kecamatan yang ada, dibandingkan jumlah penduduk, maka di Kecamatan MKS jumlah sekolah relatif lebih banyak untuk jenjang SD dan di Kecamatan Guguk Panjang untuk jenjang SMP. Hal ini untuk Kota Bukittinggi terutama SMP tidak terlalu bermasalah, karena wilayah yang kecil sehingga jarak yang relatif dekat untuk sekolah di lintas kecamatan. Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23.
Ketersediaan sekolah dan penduduk
usia sekolah menurut kecamatan
Kota Bukittinggi

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Guguk Panjang	25	4.412	56,66	11	1.973	55,75
2	Mandiingin Koto Selayan	25	3.961	63,11	5	2.047	24,43
3	Aur Birugo Tigo Baleh	14	3.956	35,39	2	1.779	11,24
	Jumlah	64			18		

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kota Bukittinggi

c. Rasio guru/murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi Bukittinggi tahun 2005 – 2009 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.24.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	764	843	1052	1052	1078
1.2.	Jumlah Murid	17240	15304	14978	14975	15094
1.3.	Rasio	44.32	55.08	70.24	70.25	71.42
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	605	586	738	733	741
2.2.	Jumlah Murid	5629	6970	9816	9594	9188
2.3.	Rasio	107.48	84.07	75.18	76.40	80.65

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk SD jumlah guru sudah ideal dengan keberadaan guru kelas, dan bidang studi, sehingga sudah mencukupi, walaupun hal ini perlu dilihat lebih jauh, terutama dengan guru bidang studi. Sementara di jenjang SMP, dengan program bidang studi, sudah terjadi kelebihan jumlah guru, dimana pada tahun 2009, satu orang guru menghadapi 12 orang anak. Dengan demikian perlu optimalisasi dalam pembagian bidang studi, sehingga tidak ada guru yang menghadapi kekurangan jam mengajar.

Ditinjau dari kecamatan yang ada, maka terlihat penumpukan guru di kecamatan MKS, sementara di kecamatan ABTB dan GP relatif sama. Untuk itu, perlu dilakukan redistribusi guru, sehingga terjadi pemerataan. Sebaliknya data ini juga menunjukkan, terjadinya penumpukan guru diluar kecamatan MKS, sehingga perlu difikirkan pemerataannya. Kondisi pada kecamatan yang ada seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.25.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
menurut Kecamatan
Kota Bukittinggi

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
-1	-2	-3	-4	(5=3/4)	-6	-7	(8=6/7)
1	Guguk Panjang	347	7469	46.46	361	4772	75.65
2	Mandiangan Koto Selayan	555	3968	139.87	321	3816	84.12
3	Aur Birugo Tigo Baleh	176	3657	48.13	59	600	98.33
	Jumlah	1.078	15.094	71.42	741	9188	80.65

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kota Bukittinggi

d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Untuk Kota Bukittinggi, pada jenjang SD 1 orang guru rata-rata menghadapi 23 orang murid, namun karena ruang belajar belum mencukupi, sehingga 1 ruang kelas memiliki 30 – 32 orang murid, yang menyebabkan terjadinya kelebihan guru, untuk itu sebagian SD menerapkan guru bidang studi. Demikian pula halnya di SMP, rata-rata guru menghadapi 13 orang murid, namun karena keterbatasan ruang kelas, rombongan belajar di SMP masih berjumlah 32 – 35 orang, sehingga ada kelebihan guru dan kekurangan jam mengajar.

2.3.1.2. Pendidikan Menengah

Pelayanan umum pendidikan menengah di Kota Bukittinggi dilihat dari beberapa indikator yang disajikan berikut ini.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Untuk Kota Bukittinggi data lima tahun terakhir menunjukkan APS terus meningkat seiring dengan APM yang terus meningkat, dimana siswa SMA tidak hanya dari hinterland Bukittinggi, tetapi juga dari luar Provinsi Sumatera Barat. Data tersebut disajikan seperti tabel berikut:

Tabel 2.26.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SMA/MA/SMK					
1.1.	Jumlah murid usia 16-18 thn	7.955	7.295	7.555	7.040	7.421
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	12.757	7.228	5.538	5.538	5.438
1.3.	APS SMA/MA/SMK	623,6	1.010,5	1.364,2	1.271,2	1.364,7

b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa dari jumlah sekolah relatif mencukupi, namun tidak semua sekolah diisi oleh siswa secara merata. Minat untuk bersekolah di SMA lebih tinggi dibandingkan SMK, apalagi sekolah swasta. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah
Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SMA/MA/SMK					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	29	29	28	28	28
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	12.757	7.228	5.538	5.538	5.438
1.3.	Rasio	22,73	40,12	50,56	50,56	51,49

c. Rasio guru terhadap siswa

Rasio guru terhadap siswa adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah siswa pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal siswa untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berdasarkan data lima tahun terakhir, rasio jumlah guru terhadap siswa pada SMA dan SMK di Bukittinggi sudah sangat mencukupi, bahkan berlebih. Dari data rasio jumlah guru terhadap siswa, rata-rata satu orang guru menghadapi 10 orang siswa. Namun dengan pelaksanaan bidang studi dan manajemen sekolah dilakukan penataan jam mengajar guru. Namun masih terdapat guru yang mengalami kekurangan jam mengajar untuk mata pelajaran tertentu. Data rasio guru berbanding jumlah siswa tersebut seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.28.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SMA/MA/SMK					
1.1.	Jumlah Guru	1.333	1.115	1.300	1.281	1.312
1.2.	Jumlah Murid	11.150	11.133	11.761	11.869	12.059
1.3.	Rasio	119,55	100,15	110,53	107,93	108,80

Apabila dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, maka guru terbanyak itu berada di kecamatan MKS, sementara di dua kecamatan lainnya relatif sama. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan redistribusi guru dan penataan kembali untuk mencapai jumlah ideal

berdasarkan mata pelajaran yang ada. Data distribusi guru di kecamatan pada jenjang pendidikan menengah seperti tabel berikut:

Tabel 2.29.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah per Kecamatan
Tahun 2009 Kota Bukittinggi

NO	KECAMATAN	SD/MI		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Guguk Panjang	774	6.530	118,53
2	Mandiingin Koto Selayan	1.167	3.878	300,93
3	Aur Birugo Tigo Baleh	165	1.351	122,13
	Jumlah			

2.3.2. Kesehatan

a. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pembangunan Kesehatan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Kerja sama tersebut berbentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Salah satu UKBM tersebut adalah posyandu. Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Rasio posyandu per satuan balita menggambarkan jumlah balita yang dapat di layani oleh satu posyandu. Rasio Posyandu dan Balita di Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30.
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah posyandu	116	118	121	124	125
2.	Jumlah balita	5.317	5.575	6.401	11.744	11.942
3.	Rasio	45,8	47,2	52,9	94,7	95,5

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kota Bukittinggi

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio tersebut meningkat setiap tahun nya. Hal ini dapat di artikan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah balita yang dilayani oleh setiap posyandu. Pada tahun 2005 rasio nya adalah 54,8, pada tahun 2006 meningkat

menjadi 47,2, kemudian pada tahun 2007 terus mengalami peningkatan menjadi 52,9, pada tahun 2008 mencapai angka 94,7. Pada tahun 2009 rasio adalah 95,5, dapat di artikan bahwa setiap posyandu melayani 95,5 balita.

Berdasarkan wilayah kecamatan, Rasio posyandu terhadap balita di kecamatan Guguk Panjang adalah 82,7, di kecamatan Mandiangin Koto Salayan adalah 118,5 dan di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebesar 96,7. Dapat di kata kan bahwa setiap posyandu pada kecamatan Mandiangin Koto Salayan melayani paling banyak balita yaitu 118, 5 orang. Dengan demikian posyandu di kecamtan MKS perlu diprogramkan peningkatannya untuk memenuhi jumlah ideal. Informasi tersebut berangkat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.31.
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Tahun 2009
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Guguk Panjang	52	4.300	82,7
2	Mandiangin Koto Selayan	42	4.979	118,5
3	Aur Birugo Tigo Baleh	27	2.663	98,6
	Jumlah	121	11.942	96,7

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi tahun 2009

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada masyarakat kota dan bahkan luar kota terlihat dari jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu berikut:

Tabel 2.32.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun 2005 s.d .2009 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Puskesmas	5	6	6	6	6
2.	Jumlah Poliklinik	-	-	-	-	2
3.	Jumlah Pustu	15	14	14	14	14
4.	Jumlah Penduduk	101.276	102.228	104.278	106.045	107.805
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,049	0,058	0,057	0,056	0,055
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	-	-	-	-	0,018
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,148	0,137	0,134	0,132	0,129

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kota Bukittinggi

Rasio puskesmas persatuan penduduk mengalami peningkatan setiap tahun nya. Pada tahun 2005 rasio tersebut adalah 0,049 kemudian meningkat menjadi 0,058 pada tahun 2006, 0,057 pada tahun 2007, pada tahun 2008 mencapai 0,056. Tahun 2009 rasio puskesmas terhadap penduduk adalah 0,55. Sementara itu poliklinik di Kota Bukittinggi hanya berjumlah 2 (dua) pada tahun 2009. Rasio poliklinik terhadap jumlah penduduk adalah 0,018. Sedangkan rasio pustu terhadap penduduk menunjukkan angka yang lebih besar yaitu 0,148 pada tahun 2006, angka ini terus menurun setiap tahun sehingga menjadi 0,129 pada tahun 2009, hal ini disebabkan karena jumlah puskesmas pembantu yang berkurang setiap tahun sementara jumlah penduduk terus meningkat. Dengan demikian perlu program penambahan posyandu sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.33.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Tahun 2009
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
1	Guguk Panjang	39.439	2	0,05	2	0,05	3	0,076
2	Mandiangan Koto Selayan	44.007	3	0,068	-	-	8	0,18
3	Aur Birugo Tigo Baleh	24.359	1	0,041	-	-	3	0,12
	Jumlah	107.805	6	0,056	2	-	14	0,13

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kota Bukittinggi

Rasio puskesmas persatuan penduduk pada Kecamatan Guguk Panjang adalah 0,05, pada kecamatan MKS adalah 0,068 dan pada kecamatan ABTB adalah 0,041. Rasio paling tinggi adalah pada Kecamatan MKS yaitu 0,068. Rasio poliklinik terhadap jumlah penduduk sebesar 0,05 pada tahun 2009 terdapat pada Kecamatan Guguk Panjang. Sedangkan rasio pustu terhadap jumlah penduduk paling tinggi juga terdapat pada Kecamatan MKS yaitu sebesar 0,18.

c. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk berkisar pada angka 0,04 setiap tahunnya. Jumlah Rumah Sakit di Kota Bukittinggi sebanyak 5 (lima) RS, di mana tidak ada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. Rumah Sakit yang ada adalah milik:

1. Rumah Sakit Pemerintah Pusat, RSUP yang sekarang dikembangkan menjadi RSSN (Rumah Sakit Stroke Nasional)
2. Rumah Sakit Tentara yang dimiliki oleh TNI/ AD
3. Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu RSAM (Rumah Sakit Ahmad Muchtar)
4. Rumah Sakit Swasta yaitu Yayasan Rumah Sakit Ibnu Sina dan Rumah Sakit Madina, tabel berikut menggambarkan jumlah rumah sakit di Bukittinggi.

Tabel 2.34.
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	2	2	2	2	2
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Rumah Sakit Swasta	2	2	2	2	2
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	5	5	5	5	5
6.	Jumlah Penduduk	101.276	102.228	104.278	106.045	107.805
7.	Rasio	0,049	0,049	0,048	0,047	0,046

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kota Bukittinggi

Karena luas wilayah Kota Bukittinggi yang relatif kecil sehingga seluruh rumah sakit dapat dengan mudah dijangkau dari seluruh kecamatan yang ada. Keberadaan rumah sakit yang ada di Bukittinggi juga dengan mudah diakses oleh penduduk luar kota, dan bahkan luar Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian distribusi perkecamatan tidak menjadi persoalan dalam pelayanan masyarakat, seperti tabel berikut:

Tabel 2.35.
Jumlah Rumah Sakit
menurut Kecamatan tahun 2009
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Guguk Panjang	39.439	1	0,025	-	-	-	-	-	-	2	0,10	3	0,126
2	Mandiingin Koto Selayan	44.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Aur Birugo Tigo Baleh	24.359	1	0,041	-	-	1	0,041	-	-	-	0,041	2	0,123
	Jumlah	107.805	2	0,018	-	-	1	0,009	-	-	2	0,046	5	0,074

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kota Bukittinggi

Rasio Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk pada Kecamatan Guguk Panjang adalah 0,126, pada Kecamatan MKS tidak ada dan pada Kecamatan ABTB sebesar 0,074. Dapat dikatakan bahwa sebaran rumah sakit tidak merata pada Kota Bukittinggi.

Kondisi tenaga medis dokter dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36.
Jumlah Dokter Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Dokter	9	9	12	25	137
2	Jumlah Penduduk	101.276	102.228	104.278	106.045	107.805
3	Rasio	0,088	0,088	0,115	0,235	1,271

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi

Jumlah dokter pada tahun 2005 dan 2006 adalah 9 orang, pada tahun 2007 meningkat menjadi 12, pada tahun 2008 sebanyak 25 dan mengalami kenaikan jumlah yang cukup besar pada tahun 2009 yaitu sebanyak 137 orang. Rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2009 adalah 1,271. Dengan meningkatnya rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Apabila dilihat berdasarkan distribusi dokter perkecamatan, maka jumlah dokter paling banyak pada Kecamatan Guguk Panjang sebanyak 70 orang dengan rasio 1,77, pada Kecamatan MKS sebanyak 48 orang dengan rasio 1,09 dan paling sedikit pada Kecamatan ABTB sebanyak 19 orang dengan rasio 0,78. Namun distribusi perkecamatan ini tidak menjadi permasalahan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota ataupun hinterland dan pengunjung kota. Tabel berikut menggambarkan distribusi dokter perkecamatan.

Tabel 2.37.
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2009
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Guguk Panjang	39.439	70	1,77
2	Mandiangan Koto Selayan	44.007	48	1,09
3	Aur Birugo Tigo Baleh	24.359	19	0,78
	Jumlah	107.805	137	1,27

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kota Bukittinggi

d. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Tabel berikut memperlihatkan jumlah tenaga medis yang ada di Bukittinggi.

Tabel 2.38.
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Tenaga Medis	111	98	125	194	137
2	Jumlah Penduduk	101.276	102.228	104.278	106.045	107.805
3	Rasio	1,096	0,958	1,198	1,829	1,27

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kota Bukittinggi

Jumlah tenaga medis di kota Bukittinggi pada tahun 2009 adalah 137 orang dengan rasio 1,27. Jumlah ini sudah mencukupi untuk pelayanan kepada masyarakat, dan dapat ditingkatkan untuk pemenuhan kebutuhan, sesuai perkembangan dan dinamika penduduk.

2.3.3. Lingkungan Hidup

a. Persentase penanganan sampah

Gamabran persentase penanganan sampah yang ada di Bukittinggi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.39.
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah sampah yang ditangani	4.524	4.227,84	5.220	3.000,6	3.721,44
2.	Jumlah volume produksi sampah	4.860	5.284,8	5.404,2	5.355,24	5.748
3.	Persentase	93,08	80	96,59	56,03	64,74

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi sampah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup berarti ini dikarenakan karena meningkatnya aktifitas masyarakat terutama di lingkungan pasar, hal lain yang menjadi penyebabnya

adalah produk yang dikonsumsi masyarakat semuanya memakai kemasan baik itu berupa plastik, kertas, karton dll. Dilihat dari Jumlah produksi sampah yang selalu meningkat setiap tahunnya selama ini kurang diimbangi oleh penanganannya baik itu yang ditanggulangi oleh masyarakat maupun oleh SKPD terkait.

Dari kecamatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi penanganan sampah dengan persentase yang tinggi terjadi di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh diikuti oleh Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Bukittinggi
Menurut Kecamatan Tahun 2009

NO	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Guguk Panjang	1.508,68	2.116,08	71,29
2	Mandiangin Koto Selayan	818,71	2.223,72	36,81
3	Aur Birugo Tigo Baleh	1.394,05	1.408,2	98,99
	Jumlah	3.721,44	5.748,9	64,74

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi

b. Persentase penduduk berakses air minum

Pengelolaan Air Bersih sebagai sumber air minum dalam Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum. Saat ini PDAM Kota Bukittinggi telah memiliki dan melayani sebanyak 9.788 Pelanggan, yang menjangkau seluruh Kelurahan yang ada dalam Kota Bukittinggi sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.41.
Perhitungan Tingkat Pelayanan PDAM Kota Bukittinggi

No.	Jenis Pelanggan	Banyak Langganan	Perkiraan Jumlah Orang Terlayani	Jumlah Layanan
1.	Rumah Tangga	7.530	6	45.180
	Niaga Kecil	1.064	6	6.384
	RT. Kubang Putih	211	6	1.266
	RT. ABRI/ POLRI	481	6	2.886
2	Industri Kecil	32	10	320
	Niaga Khusus	2	10	20

No.	Jenis Pelanggan	Banyak Langganan	Perkiraan Jumlah Orang Terlayani	Jumlah Layanan
	Niaga Besar	61	10	610
	Kolam Renang	1	10	10
3	Kantor	76	20	1.520
	Pemerintah Daerah	15	20	300
	ABRI/ POLRI	18	20	360
4	Sekolah	76	100	7.600
	Rumah Sakit	18	100	1.800
	WC, HU, MCK, KU	59	50	2.950
	Sosial	80	50	4.000
	Hotel	64	50	3.200
	Jumlah	9.788	474	78.406

Sumber: PDAM Kota Bukittinggi

Kemampuan PDAM Kota Bukittinggi dalam pelayanan air bersih adalah sebesar 72,72%. Adapun data Jaringan Pipa Kota Bukittinggi yaitu:

1. Pipa Transmisi/ Pipa Induk Pembawa dimana panjang pipa 44,897 m dengan kondisi 79, 28 % baik
2. Pipa distribusi dengan panjang pipa 542.570 m dengan dalam kondisi 99,57 % baik

c. Persentase luas permukiman yang tertata

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 12 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008, Urusan Perumahan ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dibawah koordinasi Bidang Cipta Karya dengan di bantu oleh Subid Keciaptakaryaan, bidang Perencanaan. Dalam urusan perumahan, kualitas dari perumahan perlu diperhatikan. Adapun pendataan bangunan perumahan dilihat berdasarkan kualitas bangunannya antara lain:

Tabel 2.42.
Kualitas Bangunan Perumahan Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kualitas Bangunan Perumahan		
		Permanen	Semi Permanen	Tidak Permanen
1	Kec. Aur Birugo Tigo Baleh	3713	922	309
2	Kec. Mandiangin Koto Selayan	2540	3402	848
3	Kec. Guguk Panjang	4888	1504	995

Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik, yang merupakan salah satu kewenangan pekerjaan umum, sesuai dengan kewenangan PP

No. 38 Tahun 2007 sudah dilaksanakan berupa kegiatan bedah rumah, dimana sampai saat ini telah dilaksanakan kegiatan bedah rumah sebagai berikut :

Tabel 2.43.
Kegiatan Bedah Rumah Kota Bukittinggi

No.	Lokasi	Realisasi
1	Kelurahan Koto Selayan	Rp.26.000.000,-
2	Kelurahan Campago Guguk Bulek	Rp.26.000.000,-
3	Kelurahan Pulai Anak Air	Rp.26.000.000,-

Kewenangan tentang Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi, baru dilaksanakan sebatas wacana, hal ini disebabkan karena terbatasnya lahan yang dapat dikelola oleh Pemerintah terkait dengan kondisi tanah di Kota Bukittinggi cenderung pada tanah pemilikan adat / ulayat.

Penyusunan Rencana Kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kabupaten/Kota yang merupakan salah satu kewenangan bidang Pekerjaan Umum, pada Tahun 2010 sudah berada pada tahap perencanaan, dimana RP4D merupakan salah satu dokumen yang di persyaratkan dalam rangka Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.

Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang, sudah saatnya dilakukan pengkajian dan dijadikan suatu Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

2.3.4. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang digambarkan berikut meliputi jaringan jalan dan irigasi.

a. Jaringan Jalan

Kondisi jalan di Kota Bukittinggi digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.44.
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Kondisi Baik	141.04	127.98	129.21	143.18	156.03
2.	Kondisi Sedang Rusak	31.14	31.99	32.30	41.07	28.91
3.	Kondisi Rusak	10.22	5.32	4.08	3.08	2.39
4.	Kondisi Rusak Berat	0	0	9.89	6.90	6.90
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	182.4	165.29	165.59	194.23	194.23

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi

Dalam kurun waktu tahun 2005-2009 panjang jaringan jalan Kota Bukittinggi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bila dilihat tahun 2009, panjang jalan Kota Bukittinggi sepanjang 217,8 km, hal ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2005, dimana pada tahun 2005 panjang jalan Kota Bukittinggi hanya 182,5 km. Hal ini berarti dalam kurun waktu 4 tahun terjadi peningkatan panjang jalan di Kota Bukittinggi sepanjang 35,4 km atau setara dengan 19%. Kondisi jalan Kota Bukittinggi yang dalam kondisi baik dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, sedangkan yang dalam kondisi rusak parah dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Secara umum pada tahun 2009, jalan Kota Bukittinggi sepanjang 156,03 km atau 72% dari seluruh jalan dalam kondisi baik, sedangkan yang dalam kondisi rusak berat hanya 6,9 km atau hanya sebesar 3,2% dari seluruh panjang jalan Kota Bukittinggi.

b. Jaringan Irigasi

Jaringan Irigasi yang merupakan salah satu Prasarana Sumber Daya Air untuk Penyediaan Air Baku Pertanian dalam kesatuan daerah Irigasi:

1. Yang dipertahankan di Kota Bukittinggi terdiri atas:
 - a. Daerah Irigasi Semi Teknis Bandar Garegeh, Kelurahan Garegeh Kec. MKS dengan luas $\pm$ 78 Ha.
 - b. Daerah Irigasi Semi Teknis Bandar Pulai, Kel. Garegeh Kec. MKS dengan luas DI $\pm$ 87 Ha.
 - c. Bandar Durian Kel. Birugo Kec. ABTB dengan luas 210.5 Ha.
 - d. Bandar Rakik, Kel. Aur Kuning Kec. ABTB 117,10 Ha.
 - e. Bandar Kubu Banda, Kel. Pakan Labuah, Kel. Kubu Tanjung, Kel. Ladang Cakiah Kec. ABTB dengan luas 612 Ha.
 - f. Batu Hampa, Kel. Aur Kuning Pakan Kurai Tarok Dipo, Campago Ipuh, Manggis Ganting dengan luas 138,50 Ha.
2. Daerah Irigasi dengan kewenangan Pemerintah Kota
 - a. Daerah Irigasi Bandar Rumah Potong dengan luas 60 Ha.
 - b. Daerah Irigasi Surian dengan luas 69 Ha.
 - c. Daerah Irigasi Gulai Bancah dengan luas 45 Ha.

Areal persawahan yang masih aktif dan dikelola oleh masyarakat Kota Bukittinggi sampai pada tahun 2010 ini adalah 700,982 Ha. Jaringan irigasi / pengairan yang sudah tersedia adalah sepanjang 3,7 km yang mampu mengairi 28% persawahan yang ada di Kota Bukittinggi.

Gambaran Umum Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi sampai tahun anggaran 2010 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.45.
Gambaran Umum Irigasi Kota Bukittinggi

No	Uraian	Panjang (Km)
1.	Irigasi dengan konstruksi permanen	1,80
2.	Irigasi Tanah / Alami	2,80
3.	Irigasi kondisi layak pakai	2,40
4.	Irigasi Kondisi Rusak	1,20
5.	Irigasi Permukaan	0,80
6.	Irigasi Lokal	5,30
7.	Kebutuhan Jaringan Irigasi saat ini	12,90

Sumber: Bidang Pengairan dan Drainase DPU Kota Bukittinggi

Sungai yang berada dilingkungan Kota Bukittinggi ada 3 yaitu Batang Tambuo, Batang Sianok, Batang Agam.

2.3.5. Penataan Ruang

Penyelenggaraan program penyusunan perencanaan tata ruang, tata guna tanah dan tata guna lahan dalam arti melaksanakan penyusunan dokumen teknis rencana tata ruang dan wilayah, rencana teknik ruang kota dan rencana tata bangunan dan lingkungan, merupakan tugas pokok dan fungsi dari Seksi Perencanaan Tata Ruang, bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum. Sebagaimana amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kota Bukittinggi pada tahun 2010 sudah memasuki tahap persetujuan Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang penataan ruang, penataan bangunan dan perizinan dan pengawasan bangunan dalam arti melaksanakan pengawasan, pengendalian peremajaan kota, pengembangan fisik kota serta penyebarluasan standar-standar teknis pemanfaatan rencana tata ruang dan produk-produk pada wilayah dan kawasan yang telah direncanakan serta melakukan dan mengolah data pemetaan menjadi data digital dan mengevaluasi serta monitoring perkembangan data sesuai dengan perkembangan Tata Ruang Kota sesuai dengan yang telah diamanahkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi.

Dalam penyiapan Dokumen Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas dan urusan serta kegiatan ke-PU-an dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan instansi terkait, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai arah kebijakan dan pedoman yang legal. Adapun Dokumen Teknis yang telah dibuat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.46.
Dokumen Teknis Kota Bukittinggi

No.	Nama Dokumen	Status	Keterangan
1.	Master Plan Jaringan Jalan dan Jembatan	Belum ada	
2.	Master Plan Jaringan Drainase	Sedang proses	2010
3.	Master Plan Jaringan Irigasi	Belum ada	
4.	Master Plan Jaringan Air Bersih	Ada	2009
5.	Master Plan Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya	Ada	2006
6.	RTRW Kota Bukittinggi	ada	2011

7.	RP4D	Dalam proses	
8.	Sistem Informasi Jaringan Jalan	Ada	2009
9.	Petunjuk teknis pengelolaan fasilitas umum	Ada	2009
10.	Kawasan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan Gulai Bancah	Ada	2005
11.	Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran	ada	2006
12.	Perencanaan Penataan Ruang Kawasan Wisata Ngarai Sianok Prop. Sumatera Barat	Ada	2008
13.	Penataan Revitalisasi Kawasan Pasar Atas	Ada	2005
14.	RIPJM	Ada	2009

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi

2.3.6. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi. Sampai tahun 2009, kinerja penyelenggaraan urusan ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Dengan luas wilayah Kota Bukittinggi yang terbatas, seluas 25,239 km², Kota Bukittinggi hanya melayani penumpang bis antar kota dan antar Provinsi pada satu terminal dengan penumpang bis dari tahun 2005 sampai tahun 2009 seperti tabel berikut:

Tabel 2.47.
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah penumpang Bis	5.285	5.315	2.885	4.930	5.721
2.	Jumlah penumpang Kereta api	-	-	-	-	-
3.	Jumlah penumpang Kapal laut	-	-	-	-	-
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara	-	-	-	-	-
5.	Total Jumlah Penumpang	5.285	5.315	2.885	4.930	5.721

Setiap tahun, terlihat penambahan jumlah penumpang bis yang dilayani di Kota Bukittinggi, baik dalam Provinsi ataupun antar Provinsi, kecuali tahun 2007 dan tahun 2008, yang mengalami penurunan, terkait dengan bencana gempa yang melanda Kota Bukittinggi dan Sumatera Barat umumnya. Hal ini menunjukkan kecenderungan orang berkunjung ke Bukittinggi selalu meningkat dengan menggunakan angkutan bis, walaupun tidak terlalu signifikan, karena angkutan pribadi dan wisata lainnya juga cukup berkembang di Bukittinggi dan daerah lainnya di sekitar Bukittinggi.

b. Rasio ijin trayek

Untuk melayani masyarakat Kota Bukittinggi, semenjak tahun 2005 – 2009 tidak terdapat penambahan jumlah trayek, walaupun terjadi penambahan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan luas wilayah perkotaan kecil, sehingga sudah terlayani dengan trayek yang ada. Jumlah trayek dan perkembangan jumlah penduduk semenjak tahun 2005 – 2009 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48.
Rasio Ijin Trayek
Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Izin Trayek perkotaan	24	24	24	24	24
2.	Jumlah penduduk	101.276	102.228	104.278	106.045	107.805
3.	Rasio Izin Trayek	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

c. Jumlah uji kir angkutan umum

Peningkatan keselamatan transportasi angkutan penumpang umum dan bus dilakukan melalui uji KIR kendaraan, yang semuanya dilakukan uji KIR dari jumlah kendaraan wajib KIR yang ada. Walaupun ada kecenderungan yang signifikan jumlah angkutan penumpang umum dan mobil bus cenderung menurun, namun semuanya dilakukan uji KIR. Penurunan jumlah angkutan penumpang umum dan bus umum cenderung berkurang akibat berkurangnya jumlah penumpang karena menggunakan pesawat ataupun kendaraan pribadi. Perkembangan penumpang umum dan bus umum serta yang dilakukan uji KIR dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49.
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi

No	Angkutan Umum	2005			2006			2007			2008			2009		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1.	Mobil penumpang umum	812	812	100	825	825	100	33	33	100	30	30	100	31	31	100
2.	Mobil bus	1.297	1.297	100	1.297	1.297	100	784	784	100	762	762	100	777	777	100
	Jumlah	2.109	2.109	100	2.122	2.122	100	817	817	100	792	792	100	808	808	100

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Sampai tahun 2009 jumlah terminal bus di Kota Bukittinggi tidak mengalami peningkatan, dengan jumlah tetap satu buah. Kencenderungan yang ada sekarang, jumlah ini tidak akan mengalami penambahan, sehingga pemerintah hanya melakukan peningkatan pelayanan untuk kenyamanan dan kepuasan pengguna jasa transportasi umum yang menggunakan terminal bus di Kota Bukittinggi. Jumlah terminal bis dari tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50.
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah pelabuhan laut	0	0	0	0	0
2.	Jumlah pelabuhan udara	0	0	0	0	0
3.	Jumlah terminal bis	1	1	1	1	1
	Jumlah	1	1	1	1	1

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka

2.3.7. Penanaman Modal

Penanaman modal (investasi) merupakan faktor yang sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal dapat dibagi atas dua bagian utama yaitu penanaman modal swasta (*private investment*) dan penanaman modal pemerintah (*public investment*). Penanaman modal swasta merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta seperti pendirian pabrik baru, peralatan dan penambahan faktor produksi baru. Penanaman modal ini bisa dilakukan oleh pihak swasta

dalam negeri (PMDN), swasta asing (PMA) dan rumah tangga. Sedangkan penanaman modal pemerintah merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur , transportasi, komunikasi, listrik, irigasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Penanaman modal pemerintah biasanya selalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula menimbulkan dampak inflasioner yang tinggi terhadap perekonomian. Dengan demikian untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan peran swasta nasional dan swasta asing untuk menanamkan modalnya di daerah.

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Kondisi penanaman modal oleh investor baik dalam ataupun luar negeri di Kota Bukittinggi pada lima tahun terakhir terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51.
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
Kumulasi sampai tahun 2009	PMDN: (1) PT. Dymens Hotel, (2) PT. Patax, (3) PT. Grahama Citra Wisata, (4) PT. Pusako Tarinka, (5) PT. Rajawali Indonesia dan Co, (6) PT. Maizar Hasan, (7) NV. Himsar, (8) PT. Hudaya Firdaus Utama, (9) PT. Cakrawala Andalas Televisi. PMA: (1) PT. Jasa Katom, (2) PT. Shaan Wisata, (3) PT. Lativi Media Karya.	9	3	12

Sumber: Database Penanaman Modal Kota Bukittinggi, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hingga tahun 2009 di Kota Bukittinggi terdapat sejumlah investor baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menanamkan modalnya di Kota Bukittinggi dan lebih banyak PMDN yang menanamkan modalnya di Kota Bukittinggi. Ada beberapa kriteria yang harus dijadikan patokan dalam mendorong investasi yang berasal dari PMA di Kota Bukittinggi, diantaranya adalah investasi yang akan dilakukan haruslah dalam pengembangan industri olahan produk pertanian, atau industri hilir secara umum, bukan pada industri hulu. Investasi yang dikehendaki adalah investasi yang padat kapital bukan yang padat karya, karena investasi yang padat kapital ini membutuhkan kemampuan teknologi yang tinggi, sehingga terjadi alih teknologi dalam proses pembangunan di Kota Bukittinggi. Untuk PMDN lebih diarahkan

investasi yang padat karya, yang tentunya akan membuka kesempatan kerja yang luas, untuk menyerap tenaga kerja yang jumlahnya terus meningkat.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah dan nilai investasi yang ditanamkan di Bukittinggi sampai tahun 2009 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52.
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN	Nilai Investasi (Rp. Juta)
Kumulasi Sampai Tahun 2009	12	73.233,36	7	79.262,81

Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi penanaman modal lebih besar daripada saat terjadi persetujuan penanaman modal. Realisasi PMDN berasal dari sektor perdagangan besar, eceran, rumah tangga dan hotel, sedangkan realisasi PMA berasal dari sektor Angkutan, perdagangan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa.

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Kondisi lima tahun terakhir di Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	359	387	399	399	408
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	10	11	12	12	13
3	Rasio daya serap tenaga kerja	35.90	35.18	33.25	33.25	31.38

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Kota Bukittinggi rasio daya serap tenaga kerja untuk tahun 2009 adalah 31,38. Data ini menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun menurunnya angka daya serap tenaga kerja. Hal ini perlu terobosan tahun kedepannya yaitu meningkatkan jumlah PMA/PMDN di bukittinggi untuk dapat menyerap angkatan kerja yang selalu meningkat setiap tahunnya.

2.3.8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

a. Persentase koperasi aktif

Perkembangan koperasi di Kota Bukittinggi kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 secara umum mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2006 jumlah koperasi meningkat namun pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan. Sedangkan untuk jumlah koperasi aktif kurun waktu yang sama juga mengalami penurunan. Pada tahun 2006 dan 2007 penambahan jumlah koperasi sebanyak 5 koperasi diiringi dengan penurunan jumlah koperasi aktif sebanyak 2 koperasi. Pada tahun 2008 jumlah koperasi mengalami penurunan sebanyak 3 koperasi namun jumlah koperasi yang aktif tetap. Untuk tahun 2009, penurunan jumlah koperasi sebanyak 5 koperasi juga diiringi penurunan jumlah koperasi aktif sebanyak 7 koperasi. Secara umum persentase koperasi aktif dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2005 persentase koperasi aktif mencapai 80,6%, pada tahun 2009 turun menjadi 74,3%. Lebih jelas mengenai perkembangan koperasi di Kota Bukittinggi tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54.
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah koperasi aktif	87	85	85	85	78
2	Jumlah koperasi	108	113	113	110	105
3	Persentase koperasi aktif	80,6	75,2	75,2	77,3	74,3

Sumber: Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Bukittinggi

b. Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Tabel 2.55.
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah seluruh UKM	-	21.528	-	-	-
2	Jumlah BPR/LKM	49	49	49	49	49
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	-	21.528	-	-	-

Sumber: Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Bukittinggi

c. Jumlah BPR/LKM

Perkembangan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bukittinggi selama tahun 2006-2009 tidak mengalami pertumbuhan, dimana dalam kurun waktu tersebut jumlah BPR yang beroperasi tetap berjumlah 3 unit. Demikian juga halnya untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) jugatidak mengalami penambahan jumlahnya. Pada kurun waktu yang sama jumlah LKM yang beroperasi tetap berjumlah 46 unit, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56.
Jumlah BPR/LKM Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah BPR	3	3	3	3	3
2	Jumlah LKM	46	46	46	46	46
3	Jumlah BPR dan LKM	49	49	49	49	49

Sumber Dinas Koperindag Kota Bukittinggi

2.3.9. Kependudukan

2.3.9.1. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk kota Bukittinggi sampai pada tahun 2010 selalu meningkat, jika dibandingkan dengan hasil sensus tahun 2000 dengan data proyeksi, pada tahun 2006 jumlah penduduk 102.228 jiwa menjadi 107.805 pada tahun 2009, dan sampai pada sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2010 berjumlah 110.954 orang naik sebesar 1,89 persen. Dari laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya relatif tidak mengalami perubahan yang berarti. Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan yang tertinggi adalah kecamatan Mandiangin Koto Selayan selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Guguk panjang. Secara umum di Kota Bukittinggi laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh banyaknya kompleks perumahan yang baru.

2.3.9.2. Pengelompokan Penduduk

a. Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan umur

Sex Ratio antara penduduk laki-laki dan perempuan Kota Bukittinggi dari tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih tinggi dibanding dengan penduduk laki-laki. Sex Ratio penduduk Kota Bukittinggi hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah paling rendah yaitu 93,9 persen angka sex ratio dibawah dari 100 persen berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih rendah dibanding jumlah penduduk perempuan, dari analisa yang ada hal ini disebabkan karena adanya 8 Perguruan Tinggi di bidang Kesehatan lebih banyak di Kota Bukittinggi yang didominasi oleh mahasiswi. Untuk perbandingan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.57.
Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur
Kota Bukittinggi Tahun 2009

Kelompok Umur	2004	2005	2006	2007	2008	2009
0-4	5.693	5.745	5.798	5.915	6.016	6.118
5-9	5.210	5.192	5.244	5.348	5.440	5.528
10-14	4.629	5.118	5.166	5.271	5.363	5.452
15-19	5.563	6.256	6.313	6.432	6.537	6.643

Kelompok Umur	2004	2005	2006	2007	2008	2009
20-24	4.803	4.293	4.334	4.418	4.492	4.563
25-29	4.316	4.327	4.369	4.454	4.529	4.601
30-34	4.090	3.904	3.940	4.017	4.089	4.158
35-39	3.500	3.683	3.715	3.792	3.855	3.923
40-44	3.224	3.165	3.195	3.258	3.313	3.368
45-49	2.670	2.477	2.503	2.552	2.595	2.640
50-54	1.860	1.568	1.580	1.614	1.642	1.667
55-59	1.102	1.296	1.308	1.332	1.355	1.383
60-64	2.902*	1.110	1.122	1.144	1.162	1.180
65-69		1.890	1.904	1.949	1.978	2.010
Jumlah	49.562	50.024	50.491	51.496	52.366	53.234

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi

*Catatan : *Umur 60+ untuk tahun 2004*

Tabel 2.58.
Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur
Kota Bukittinggi 2009

Kelompok Umur	2004	2005	2006	2007	2008	2009
0-4	5.374	5.468	5.519	5.630	5.728	5.824
5-9	4.920	4.847	4.892	4.996	5.082	5.169
10-14	4.450	4.880	4.926	5.008	5.095	5.181
15-19	5.999	6.550	6.612	6.762	6.874	6.980
20-24	5.519	5.086	6.134	5.231	5.323	5.409
25-29	4.513	4.736	4.783	4.878	4.961	5.045
30-34	3.980	3.938	3.981	4.058	4.128	4.196
35-39	3.672	3.569	3.600	3.677	3.738	3.799
40-44	2.992	3.031	3.064	3.128	3.181	3.237
45-49	2.493	2.217	2.239	2.285	2.320	2.360
50-54	1.654	1.530	1.543	1.573	1.604	1.629
55-59	1.218	1.429	1.439	1.470	1.491	1.514

Kelompok Umur	2004	2005	2006	2007	2008	2009
60-64	*3.987	1.291	1.303	1.325	1.349	1.374
65-69		2.680	2.702	2.761	2.805	2.854
Jumlah	50.771	51.252	51.737	52.782	53.679	54.571

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka

*Catatan : *Umur 60+ untuk tahun 2004*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2005 -2009 penduduk laki-laki dan perempuan usia 15 – 19 tahun paling tinggi jumlahnya. Pada kelompok umur 15 – 19 tahun yang merupakan usia sekolah lebih banyak penduduk perempuan dibanding dengan penduduk laki-laki. Ini merupakan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, Dari jumlah tersebut dapat diproyeksikan bahwa jumlah penduduk perempuan akan selalu lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki.

b. Pengelompokan penduduk berdasarkan Persebaran Penduduk/geografis

Pengelompokan penduduk di Kota Bukittinggi yang tersebar pada tiga kecamatan adalah tertinggi pada kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 40,82 persen. Ini adalah karena luas wilayah kecamatan mandiangin paling tinggi yaitu 12,156 km². Tingginya tingkat penyebaran penduduk di kecamatan Mandiangin Koto Selayan ditandai dengan banyaknya prmbangunan perumahan baik yang dilakukan oleh perusahaan pengembang maupun oleh perorangan.

c. Pengelompokan penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan jumlah penduduk usia 10 tahun keatas menurut ijazah yang dimiliki persentase tertinggi berada pada level jenjang pendidikan perguruan tinggi, untuk tahun 2010 sebesar 65,41 %. Artinya penduduk Kota Bukittinggi Tingkat Sumber daya manusia nya cukup tinggi. Diharapkan dengan kekuatan sumber daya manusia yang tersedia yang inovatif, kreatif dan professional dapat mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan di Kota Bukittinggi, dengan segala kemampuan dan keterampilan sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimiliki seperti terlihat padatabel berikut:

Tabel 2.59.
Penduduk 10 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2009
Kota Bukittinggi

No	Pendidikan Yang Ditamatkan	jumlah	Persentase (%)
1	Pra Sekolah	13.246	11,82
2	SD/MI	13.365	11.93
3	SMP	6.230	5,56
4	SMA	5.889	5,25
5	Perguruan Tinggi	73.263	65,41
	Jumlah	111.993	100

Sumber: Database Penanaman Modal Kota Bukittinggi tahun 2010

2.3.10. Ketenagakerjaan

a. Angkatan Kerja (*labor force*)

Penduduk dengan usia 15 tahun keatas untuk sektor ketenagakerjaan dapat menggambarkan kondisi ekonomi kota Bukittinggi dibanding dengan jumlah penduduk. Artinya tingginya tingkat angkatan kerja di Kota Bukittinggi yang dapat menyerap kemampuan pasar kerja yang berkualitas sehingga dapat meminimalkan jumlah pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk perbaikan kemasa depannya perlunya peningkatan pengembangan kesempatan kerja, perlindungan dan pengendalian tenaga kerjaterhadap jaminan social bagi tenaga kerja serta peningkatan produktifitas tenaga kerja dalam berbagai bidang serta peningkatan penerimaan devisa dari pengiriman tenaga kerja keluar negeri.

Tabel 2.60.
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja
dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2009
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	Bekerja	30.407	24.824	55.231
	Pengangguran	28.055	2.516	30.571
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	58.462	27.340	85.802
2	BUKAN ANGKATAN KERJA			
	Sekolah	6.602	5.546	12.148
	Mengurus RT	426	7.406	7.832

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Lainnya	2.388	2.195	4.583
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	9.416	15.147	24.563
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	67.878	42.487	110.365
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	-	-	-
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	-	-	-

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka

b. Produktivitas Tenaga Kerja

Perlu adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi yang bertujuan untuk mendorong kemampuan masyarakat untuk berkarya dengan peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan teknis tenaga kerja.

c. Kesempatan kerja

Program Pengembangan kesempatan kerja perlu ditingkatkan untuk masa depan yang bertujuan untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Bukittinggi dengan membuka seluas-luasnya lapangan kerja. Permasalahan terhadap ketenagakerjaan di Kota Bukittinggi sampai beberapa tahun kedepannya adalah terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang selalu bertambah dan diiringi oleh lambatnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja dan lapangan kerja yang terbatas. Permasalahan ini diatasi dengan melaksanakan beberapa program perluasan kesempatan kerja, dengan melakukan langkah awal dengan pembangunan infrastruktur secara umum disamping juga program pengembangan dan diversifikasi usaha produktif diberbagai sektor.

d. Pengangguran

Kota Bukittinggi selalu melakukan program untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan berbagai upaya disetiap sektornya. Jumlah penduduk yang bertambah banyak juga akan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Berbagai upaya yang dapat dilakukan secara bertahap untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Bukittinggi dengan peningkatan keterampilan dan bimbingan usaha.

2.3.11. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)

a. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2009 adalah 3 s/d 4. Besarnya jumlah masyarakat yang berhasil diajak berkeluarga berencana merupakan salah satu sasaran program KB. Rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga pada tahun 2009 adalah 3 sampai dengan 4 orang anak. Hal ini menggambarkan bahwa program Keluarga Berencana telah hampir mencapai sasaran nya yaitu 2 orang anak lebih baik.

b. Rasio akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah 65,79%. Rasio akseptor KB menggambarkan jumlah peserta KB aktif dengan jumlah Pasangan Usia Subur. Rasio 65,79% dapat di artikan bahwa sebanyak 65,79 % PUS menjalani program KB dan aktif menjadi akseptor KB.

2.3.12. Komunikasi Dan Informasi

Urusan komunikasi dan informasi merupakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi. Penyelenggaraan urusan ini telah menunjukkan capaian kinerja seperti yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan di Bukittinggi. Pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Jumlah wartel dan warnet di Kota Bukittinggi bertumbuh terbalik, dimana warnet sampai tahun 2009 berjumlah 250 unit dengan rasio 1 : 413,22, sedangkan wartel sampai tahun 2009 tidak ada lagi yang beroperasi di Kota Bukittinggi. Seperti hal nya kota-kota lain, jumlah warnet ini cenderung meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat, sementara wartel berkurang karena layanan telekomunikasi seluler sudah tersedia pada seluruh wilayah dan dianggap lebih efektif dan efisien. Perkembangan jumlah wartel dan warnet dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61.
Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Kota	2009				
		Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel	Rasio Warnet
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11=9/8)	(12=10/8)
1.	Bukittinggi	107.805	-	250	-	1 : 413,22
	Jumlah	107.805	-	250	-	1 : 413,22

b. Jumlah surat kabar nasional/lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain.

Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Keberadaan Bukittinggi sebagai kota kunjungan dan transportasi yang relatif lancar, maka media nasional dan daerah dapat diakses masyarakat tepat waktu. Surat kabar nasional dan lokal yang beredar di Kota Bukittinggi adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.62.
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	Tahun 2009
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	4
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	5
3	Total jenis surat kabar (1+2)	9

Dari tabel di atas terlihat, bahwa di Bukittinggi beredar empat media cetak nasional dan lima media cetak lokal. Media ini umumnya adalah media yang diterbitkan di ibukota Provinsi. Sementara itu jumlah penyiaran radio lokal, nasional TV lokal dan nasional relatif masih sedikit, terutama media elektronik TV nasional yang hanya 4 buah. Dibandingkan dengan Kota Padang jumlah ini relatif lebih sedikit, namun dibandingkan dengan beberapa daerah kabupaten/ kota di Sumatera Barat relatif sama. Kewenangan penyiaran TV nasional ini mutlak kebijakan media terkait, karena tidak dapat dilepaskan dari unsur profit

yang akan didapatkan. Jumlah lembaga penyiaran radio dan televisi di Bukittinggi adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.63.
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	Tahun n-5	Tahun n-1
1	Jumlah penyiaran radio lokal	-	11
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	1	2
4	Jumlah penyiaran TV nasional	3	4
5	Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)	5	18

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi

2.3.13 Pemberdayaan masyarakat dan desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan

Berdasarkan jumlah kecamatan yang ada di Bukittinggi, semua kecamatan telah memiliki LPM sesuai kelurahan, namun LPM tersebut belum memiliki kelompok binaan yang ditetapkan, walaupun sebenarnya di masing-masing kelurahan ada kelompok binaan. Untuk itu perlu penataan dan pengarahan, sehingga semua kelompok di kelurahan dikoordinasikan dan dibina oleh LPM, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.64.
Kelompok Binaan LPM Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2005			2006			2007			2008			2009		
		Jumlah LPM	Jumlah kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)
1.	Guguk Panjang	7	-	-	7	-	-	7	-	-	7	-	-	7	-	-
2.	Mandiingin Koto Selayan	9	-	-	9	-	-	9	-	-	9	-	-	9	-	-
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	8	-	-	8	-	-	8	-	-	8	-	-	8	-	-
4.	Jumlah	24	-	-	24	-	-	24	-	-	24	-	-	24	-	-

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Nagari Kota Bukittinggi

a. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan

Dari ketiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi, PKK sudah ada pada setiap kelurahan dengan jumlah 1 sampai 2 PKK. Namun PKK tersebut belum secara resmi memiliki kelompok binaan, walaupun pada kenyataannya kelompok tersebut ada dan beraktivitas. Untuk itu perlu penataan, sehingga koordinasi sampai ketingkat kelurahan dapat dilakukan. Kondisi PKK tersebut seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.65.
Kelompok Binaan PKK Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2005			2006			2007			2008			2009		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata- rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/ 15)
1.	Guguk Panjang	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-
2.	Mandiangan Koto Selayan	12	-	-	12	-	-	12	-	-	12	-	-	12	-	-
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	11	-	-	11	-	-	11	-	-	11	-	-	11	-	-
4.	Jumlah	33	-	-	33	-	-	33	-	-	33	-	-	33	-	-

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Nagari Kota Bukittinggi

b. Jumlah LSM yang aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Di Kota Bukittinggi terdapat banyak LSM yang berkontribusi dalam pembangunan. LSM tersebut sudah terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Namun belum terdata dan terpantau tingkat keaktifannya di lapangan. Untuk itu perlu dilakukan

pemantauan dan monitoring aktivitas LSM yang terdaftar di Kota Bukittinggi seperti tabel berikut:

Tabel 2.66.
Jumlah LSM aktif Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah LSM terdaftar	78	85	103	121	133
2.	Jumlah LSM tidak aktif	-	-	-	-	-
3.	Jumlah LSM aktif (1-2)	78	85	103	121	133

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas Kota Bukittinggi

2.3.14 Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

a. Jumlah perpustakaan

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Perpustakaan yang ada di Kota Bukittinggi adalah Perpustakaan Daerah milik Pemda sebanyak 1 perpustakaan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.67.
Jumlah Perpustakaan Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	-
3.	Total Perpustakaan (1+2)	1	1	1	1	1

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka kota Bukittinggi

b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Jumlah pengunjung pada Perpustakaan paling tinggi pada tahun 2008 yaitu 179.698 pengunjung. Secara signifikan dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pengunjung ke perpustakaan, dapat diartikan bahwa minat baca masyarakat Kota Bukittinggi semakin meningkat, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	26.651	40.108	106.419	106.419	190.280
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	-
3.	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	26.651	40.108	106.419	106.419	190.280

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi

2.3.15 Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

a. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah.

Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Bukittinggi meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2009 sebanyak 89 orang yang mempunyai tugas menyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat. Rasio jumlah polisi pamong praja terhadap 10.000 penduduk pada tahun 2009 adalah 0,825. Hal ini menunjukkan bahwa untuk ukuran kota yang

memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dan jumlah kunjungan yang tinggi masih termasuk dalam kategori sedang. Karena itu perlu ditingkatkan seiring dinamika dan perkembangan kota, terlebih lagi untuk menyikapi persoalan hinterland kota yang bisa merambat ke kota. Gambaran rasio Polisi Pamong Praja tersebut seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah polisi pamong praja	28	51	82	80	89
2.	Jumlah penduduk	101.276	102.228	104.278	106.045	107.805
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,276	0,498	0,786	0,75	0,825

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi

b. Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap kelurahan. Rasio pos siskamling terhadap jumlah kelurahan pada kecamatan Guguk Panjang menunjukkan angka yang sama setiap tahun yaitu 4. Dapat di artikan bahwa pada setiap kelurahan terdapat 4 pos siskamling. Pada Kecamatan MKS juga menunjukkan angka yang sama setiap tahun yaitu 2,375. Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan di kecamatan ABTB sebesar 3,89 setiap tahun nya. Dapat di katakan bahwa rasio pos siskamling terhadap jumlah kelurahan menunjukkan angka yang sama setiap tahun, hal ini karena jumlah pos siskamling yang tidak berubah, sehingga perlu untuk peningkatan jumlah dan aktivitasnya sesuai dinamika yang ada di masyarakat. Rasio jumlah pos siskamling di Kota Bukittinggi seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.70.
Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2005			2006			2007			2008			2009		
		Jmlh siskamling	Jmlh Kel	Rasio	Jmlh siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh Siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siskamling	Jmlh Desa	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)	(9)	(10)	(11=9/10)	(12)	(13)	(14=12/13)	(15)	(16)	(17=15/16)
1.	Guguk Panjang	28	7	4	28	7	4	28	7	4	28	7	4	28	7	4
2.	Mandiingin Koto Selayan	19	8	2,375	19	8	2,375	19	8	2,375	19	8	2,375	19	8	2,375
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	35	9	3,89	35	9	3,89	35	9	3,89	35	9	3,89	35	9	3,89
	Jumlah	82	24	3,41	82	24	3,41	82	24	3,41	82	24	3,41	82	24	3,41

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kota Bukittinggi

2.3.16 Pemuda dan Olah raga

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Kondisi Kota Bukittinggi berdasarkan kecamatan yang ada seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.71.
Jumlah Organisasi Pemuda
Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2005	2006	2007	2008	2009
1.	MKS	20	21	23	23	23
2.	GGP	14	15	15	16	16
3.	ABTB	13	13	13	14	14
	Jumlah	47	49	51	53	53

Dari tabel tersebut terlihat peningkatan jumlah organisasi pemuda pada ketiga kecamatan. Hal ini menunjukkan pemberdayaan dan partisipasi pemuda semakin

meningkat, dengan demikian wadah untuk pembinaan generasi muda juga terus bertambah.

b. Jumlah Organisasi Olahraga

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Jumlah organisasi olahraga dihitung dari jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Kondisi sampai akhir tahun 2009 di Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72.
Jumlah Organisasi Olahraga
Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2005	2006	2007	2008	2009
1.	MKS	47	49	53	55	58
2.	GGP	45	47	51	53	56
3.	ABTB	37	41	44	43	41
	Jumlah	129	137	148	151	155

Dari tabel tersebut terlihat peningkatan jumlah organisasi olah raga yang ada di kecamatan. Hal ini menunjukkan kegiatan keolahragaan berkembang di tengah masyarakat untuk pembinaan dan wadah olah raga bagi masyarakat.

c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau "event" kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Sementara itu, Kepemudaan di sini bermakna segala hal tentang pemuda. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Dan untuk Kota Bukittinggi berdasarkan kecamatan yang ada, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.73.
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Tahun 2005 s.d 2009 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2005	2006	2007	2008	2009
1.	MKS	22	23	24	24	26
2.	GGP	13	14	16	18	19
3.	ABTB	13	14	15	16	16
	Jumlah	48	52	55	58	61

Dari tabel tersebut terlihat peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan setiap tahunnya pada ketiga kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemudaan di Bukittinggi relatif aktif dan dinamis dalam berbagai even dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan. Untuk itu di Bukittinggi tersedia fasilitasi melalui SKPD terkait dan pembiayaan dalam bentuk bantuan social.

d. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau "event" olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau "event" olahraga dalam periode 1 (satu) tahun. Untuk Kota Bukittinggi berdasarkan kecamatan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74.
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2005	2006	2007	2008	2009
1.	MKS	15	13	14	15	17
2.	GGP	10	14	13	13	16
3.	ABTB	16	11	10	12	10
	Jumlah	41	38	37	40	42

Dari tabel di atas terlihat fluktuasi jumlah kegiatan keolahragaan yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kegiatan keolahragaan di Kota Bukittinggi relatif aktif dan mampu terus dikembangkan dalam pembinaan keolahragaan, baik pemuda, pelajar ataupun masyarakat.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

2.4.1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin *atraktif* bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih, bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Kondisi Kota Bukittinggi belum dapat menggambarkan pertumbuhan tahunan, karena yang tersedia baru data tahun 2009. Rasio konsumsi rumah tangga perkapita menunjukkan angka yang cenderung tinggi, sehingga dapat dikatakan tingkat konsumsi penduduk kota relatif tinggi. Kondisinya seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75.
Angka Konsumsi RT per Kapita (ribu)
Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Total Pengeluaran RT	-	-	-	-	16.525.318,51
2.	Jumlah RT	-	-	-	-	24.833
3.	Rasio (1./2.)	-	-	-	-	665.458

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kota Bukittinggi

2.4.2. Produktivitas total daerah

PDRB Kota Bukittinggi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika dilihat produktivitas per sektor; sektor jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, serta Perdagangan hotel dan restoran masih merupakan sektor yang produktif, dimana ketiga sektor tersebut sangat erat kaitannya dengan potensi unggulan kota yang telah dijalankan. Ketiga sektor tersebut juga mengalami pertumbuhan yang baik bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. kontribusi sektor jasa-jasa dalam pembentukan PDRB pada tahun 2009 sebesar 24,50%, sektor pengangkutan dan komunikasi 22,72% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 21,95%. Sedangkan sektor yang tidak produktif dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian, hal ini tentunya cukup dimaklumi karena memang tidak adanya pertambangan di Kota Bukittinggi. Kemudian sektor pertanian kontribusi terhadap PDRB semakin menurun, hal ini tentunya disebabkan oleh semakin berkembangnya kota yang mengakibatkan semakin menyempitnya lahan pertanian yang ada. Untuk lebih jelas produktivitas per sektor perekonomian Kota Bukittinggi dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76.
Produktivitas Per Sektor (jutaan rupiah)
Kota Bukittinggi

NO	Sektor	2005		2006		2007		2008		2009	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	PDRB	1.086.485,21	100	1.268.658,90	100	1.435.739,41	100	1.699.013,58	100	1.881.187,92	100
1.1	Pertanian	31.802,02	2,93	36.198,28	2,85	38.679,30	2,69	41.043,23	2,42	42.806,29	2,28
1.2	Pertambangan dan Penggalian	547,25	0,05	377,82	0,03	227,04	0,02	154,57	0,01	68,76	0,00
1.3	Industri	109.150,19	10,05	125.694,40	9,91	147.590,36	10,28	175.356,67	10,32	183.225,45	9,74

NO	Sektor	2005		2006		2007		2008		2009	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	Pengolahan										
1.4	Listrik, Gas dan Air bersih	34.771,35	3,20	36.688,18	2,89	40.532,19	2,82	43.510,51	2,56	44.482,09	2,36
1.5	Konstruksi	46.587,84	4,29	54.485,72	4,29	62.857,26	4,38	75.018,99	4,42	83.913,46	4,46
1.6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	215.337,29	19,82	251.973,63	19,86	295.345,88	20,57	363.770,83	21,41	412.956,01	21,95
1.7	Pengangkutan dan Komunikasi	245.746,26	22,62	300.393,98	23,68	331.533,45	23,09	388.019,07	22,84	427.394,24	22,72
1.8	Keuangan, sewa, dan Js. Perusahaan	128.648,22	11,84	146.485,84	11,55	166.875,57	11,62	198.000,83	11,65	225.415,98	11,98
1.9	Jasa-jasa	273.894,79	25,21	316.361,05	24,94	352.098,36	24,52	414.138,88	24,38	460.925,64	24,50

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi

2.4.3. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah

2.4.3.1. Aksesibilitas daerah

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah di Kota Bukittinggi dihitung dengan berdasarkan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Di Bukittinggi, rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan terus berkurang setiap tahunnya. Hal ini berarti pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan penambahan panjang jalan. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya titik kemacetan sehingga mengganggu lalu lintas. Karena keterbatasan wilayah kota, maka Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya dalam manajemen lalu lintas dan pengaturan kendaraan masuk kota. Kondisi tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77.
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Panjang Jalan	182,4	165,29	165,59	194,23	194,23
2.	Jumlah Kendaraan	863	968	1.489	770	1.020
3.	Rasio	0,21	0,17	0,11	0,25	0,19

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi

2.4.3.2. Penataan wilayah

Penataan wilayah di Bukittinggi digambarkan dengan indikator berikut:

a. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Di Kota Bukittinggi, wilayah industry lebih luas dibandingkan dengan luas seluruh wilayah budi daya. Hal ini menunjukkan, bahwa di Bukittinggi sektor industri lebih berkembang dibandingkan daerah untuk budi daya. Kondisinya seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78.
Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2009
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2009
1.	Luas Wilayah Industri	67.100
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	1.636,16
3.	Rasio (1./2.)	41

Sumber: Database Penanaman Modal Kota Bukittinggi

b. Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa luas wilayah perkotaan lebih luas dibandingkan luas seluruh wilayah budi daya. Hal ini berarti, bahwa wilayah Kota Bukittinggi telah dimanfaatkan untuk membangun sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung infrastruktur perkotaan. Kondisinya seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79.
Rasio Luas Wilayah Perkotaan
Kota Bukittinggi Tahun 2009

NO	Uraian	2009
1.	Luas Wilayah Perkotaan	10.239
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	1.636,16
3.	Rasio (1./2.)	15,425

Sumber: Database Penanaman Modal Kota Bukittinggi

2.4.3.3. Fasilitas bank dan non bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya.

a. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

Perkembangan jenis dan jumlah bank di Kota Bukittinggi telah mengalami kemajuan yang berarti dalam mendukung potensi unggulan daerah. Pada tahun 2009 terdapat 19 bank di Kota Bukittinggi, yang terdiri dari Bank Umum konvensional 10 unit, Bank Umum Syariah 6 unit dan BPR Konvensional 3 unit. Bila dibandingkan dengan tahun 2005, di Kota Bukittinggi baru terdapat 14 unit bank, yang terdiri dari 9 unit Bank Umum Konvensional, 2 unit Bank Umum Syariah dan 3 unit BPR. Pertumbuhan jumlah bank yang dominan dalam kurun waktu 2005-2009 adalah pada Bank Umum Syariah yang bertambah sebanyak 4 unit, sedangkan Bank Umum Konvensional hanya bertambah 1 unit dan BPR tidak mengalami penambahan jumlah. Perkembangan jumlah bank di Kota Bukittinggi tentunya sangat mendukung upaya pengembangan fungsi Kota Bukittinggi yang berbasiskan empat potensi unggulan kota. Khusus untuk perkembangan Bank Umum syariah, ini menandakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah di Kota Bukittinggi telah meningkat. Dan ini semua tentunya sangat sejalan dengan filosofi Minangkabau, dimana setiap sendi kehidupan harus berlandaskan nilai-nilai agama dan adat. Perkembangan jenis dan jumlah Bank Kota Bukittinggi tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80.
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
Kota Bukittinggi

NO	Sektor	Jumlah				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Bank Umum					
1.1.	Konvensional	9	9	9	10	10
1.2.	Syariah	2	2	4	6	6
2.	BPR					
2.1.	Konvensional	3	3	3	3	3
2.2.	Syariah	-	-	-	-	-
Jumlah		14	14	16	19	19

b. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan asuransi di Kota Bukittinggi dari tahun 2005 sampai tahun 2009 tidak mengalami pertumbuhan jumlahnya. Dimana jumlah perusahaan asuransi kerugian konvensional berjumlah 5 unit dan Perusahaan asuransi jiwa konvensional juga berjumlah 5 unit. Jumlah yang relatif tetap ini menunjukkan bahwa asuransi di Bukittinggi relatif mencukupi untuk melayani penduduk. Namun tidak tertutup juga asumsi, bahwa asuransi belum memasyarakat, sehingga animo untuk berasuransi masih rendah. Karena itu perlu peningkatan sosialisasi dan pengembangan manfaat program, sehingga masyarakat dapat bergabung dengan program jaminan kerugian asuransi. Kondisi perkembangan asuransi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81.
Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya
Kota Bukittinggi

NO	Sektor	Jumlah				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Perusahaan Asuransi Kerugian					
1.1.	Konvensional	5	5	5	5	5
1.2.	Syariah	-	-	-	-	-
2.	Perusahaan Asuransi Jiwa					
2.1.	Konvensional	5	5	5	5	5
2.2.	Syariah	-	-	-	-	-
Jumlah		10	10	10	10	10

2.4.3.4. Ketersediaan restoran

a. Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas)

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Perkembangan jumlah restoran sesuai kelasnya di Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82.
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2005		2009	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1.	Usaha restoran golongan tertinggi	-	-	-	-
2.	Usaha restoran golongan menengah	-	-	-	-
3.	Usaha restoran golongan terendah	-	-	-	-
4.	Usaha rumah makan kelas A	2	352	7	1.137
5.	Usaha rumah makan kelas B	1	179	7	665
6.	Usaha rumah makan kelas C	5	399	15	311
7.	Usaha rumah makan kelas D	18	823	15	474
8.	Usaha rumah makan kelas E	6	135	6	135
9.	Jenis Usaha Restoran Non Kelas	-	-	-	-
10.	Jenis Usaha Rumah Makan	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi

Tabel tersebut menunjukkan, bahwa jumlah restoran di Bukittinggi relatif stabil, namun cenderung terjadi peningkatan kelas restoran. Hal ini mengikuti perkembangan tingkat kunjungan ke Bukittinggi, dan terdapat juga kasus ditutupnya beberapa restoran karena kalah bersaing dan tidak mampu mempertahankan kualitas. Namun secara umum untuk melayani pengunjung ke Bukittinggi sudah dapat di layani dengan baik.

2.4.3.5. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke suatu daerah. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Di Bukittinggi, jumlah hotel dan penginapan telah mampu mendukung tingkat kunjungan yang terus meningkat. Bahkan Bukittinggi telah teruji untuk melayani kunjungan dan melaksanakan even berskala nasional dan internasional. Jumlah hotel dan penginapan di Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83.
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kota Bukittinggi

No	Jenis Penginapan/Hotel	2005			2009		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	Hotel Bintang 5	-	-	-	-	-	-
2.	Hotel Bintang 4	2	263	395	2	263	399
3.	Hotel Bintang 3	1	60	83	2	93	163
4.	Hotel Bintang 2	2	61	110	2	104	175
5.	Hotel Bintang 1	3	102	197	7	212	376
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	47	717	1.325	46	608	1.075
7.	Total Jumlah penginapan/Hotel	55	1.203	2.110	59	1.280	2.190

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi

2.4.4. Iklim Berinvestasi

Bukittinggi belum begitu dilirik untuk berinvestasi oleh perusahaan asing ataupun nasional. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan lahan dan persoalan tanah

ulayat yang relatif sama di Sumatera Barat. Faktor lain yang juga menjadi perhatian adalah Tingkat Keamanan dan ketertiban.

Tingkat keamanan dan ketertiban di Kota Bukittinggi relatif baik. Selain yang ditangani Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) juga ditangani oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Kondisi keamanan dan ketertiban di Bukittinggi diuraikan sebagai berikut:

a. Angka kriminalitas

Tabel 2.84.
Angka Kriminalitas
Kota Bukittinggi

No	Jenis Kriminal	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah kasus Narkoba	37	33	24	43	22
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	4	3	2	1	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	19	17	16	26	16
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	125	138	164	232	212
5.	Jumlah kasus Pencurian	207	211	235	315	225
6.	Jumlah kasus Penipuan	60	46	53	62	59
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	712	644	606	896	898
9.	Jumlah Penduduk	101.276	102.228	104.278	106.045	107.805
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	70,3	62,99	58,11	84,49	83,29

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas

Tabel di atas memperlihatkan tingkat kriminalitas yang tidak terlalu tinggi untuk ukuran kota, namun beberapa kasus memang menonjol di Bukittinggi seperti pencurian, penganiayaan, penipuan dan narkoba. Untuk kasus ini sangat sulit dibedakan yang menjadi kasus murni di Kota Bukittinggi, karena wilayah kepolisian Bukittinggi mencakup kota Bukittinggi dan wilayah Kabupaten Agam bagian Timur. Namun demikian, keberadaan Kota Bukittinggi di daerah persimpangan dan simpul Sumatera Barat bagian utara, maka tingkat kriminalitas menjadi perhatian penting.

b. Jumlah Demonstrasi

Kasus demonstrasi realtif jarang terjadi, hal ini karena memang masyarakat Bukittinggi yang relatif homogen (masyarakat Minang) dan warga yang berasal dari luar masyarakat Minang pun relatif mampu beradaptasi. Demikian pula halnya dalam bidang lain, biasanya lebih dominan adalah urusan pasar, yang sampai saat ini memang masih

menjadi persoalan dan tetap difasilitasi pemerintah. Jumlah demonstrasi di Kota Bukittinggi dari tahun 2005 samapai 2009 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.85.
Jumlah Demonstrasi
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Bidang Politik	9	1	-	1	3
2	Ekonomi	8	10	-	1	2
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	40	30	-	30	60

c. Kemudahan perizinan

Melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Bukittinggi, sudah diupayakan pendekatan dan kemudahan pelayanan perizinan. Hal ini terlihat dengan tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik dalam Bidang Perizinan. Dengan demikian proses pelayanan perizinan sudah memiliki standar waktu seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86.
Lama Proses Perijinan
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	SIUP HO (TDP, TDI, IUJK)	12	9	6.000.000
2.	SIUP NON HO (TDP, TDI, IUJK)	4	9	Tidak dipungut biaya
3.	IMB	15	7	10.000.000

d. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Untuk mendukung iklim investasi sudah diterbitkan beberapa peraturan daerah, walaupun masih perlu beberapa regulasi pendukung lagi di tataran peraturan daerah. Sampai tahun 2009 Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerbitkan 3 (tiga) peraturan daerah di bidang perizinan, walaupun belum tersedia peraturan daerah terkait lalu lintas barang dan jasa serta ketenagakerjaan. Hal ini karena pemerintah daerah menganggap masih dapat diatur dengan aturan yang lebih tinggi dari pemerintah. Jumlah peraturan daerah dimaksud terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87.
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Perda terkait perijinan	2	1	1	3	3
2.	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	0	0	0	0	0

Sumber: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi

2.4.5. Sumber Daya Manusia

Arah Pembangunan bidang pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia tujuannya yaitu (1) Terbukanya akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, (2) menciptakan peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang berpartisipasi, kreatif, inovatif dan berkewirausahaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan Kota Bukittinggi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Penduduk dengan usia sekolah harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, akhir tahun 2015 penduduk usia sekolah tidak ada lagi yang tidak bersekolah wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan perlu diarahkan untuk mencapai mutu pendidikan yang semakin meningkat dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Disamping itu peningkatan kualitas lulusan disetiap jenjang pendidikan perlu terus ditingkatkan untuk mencapai daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan di Kota Bukittinggi semakin tinggi kualitas tenaga kerja yang dihasilkan.

Hal lain yang menggambarkan kondisi sumber daya manusia adalah ringkasan ketergantungan. Dari data rasio ketergantungan Kota Bukittinggi dari tahun 2005 sampai tahun 2009 terlihat bahwa beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang berusia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif rata-rata rasionya adalah 54,72 persen dari rasio ini terlihat gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi, dimana Kota Bukittinggi tergolong satu berbanding satu artinya tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Gambaran rasio ketergantungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88.
Rasio Ketergantungan Tahun 2005 s.d 2009
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	31.250	31.545	32.168	32.724	33.272
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	4.570	4.606	4.710	4.783	4.864
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) dan (2)	35.820	36.151	36.878	37.507	38.136
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	65.456	66.077	67.400	68.538	69.669

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum peningkatan pendapatan daerah Kota Bukittinggi sebagaimana diuraikan pada bab di atas mencerminkan bahwa kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada kurun waktu 2006-2010 relatif cukup efektif dalam pelaksanaannya, terutama kebijakan yang mengarah pada intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah, serta kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan yaitu dana bagi hasil pajak/ bukan pajak termasuk dana tugas perbantuan maupun dana dekonsentrasi.

Dilihat dari pertumbuhannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (kecuali untuk tahun 2010) dengan rata-rata pertumbuhan berkisar 8,50 persen. Untuk Dana Perimbangan hampir setiap tahun juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,32 persen pada periode 2006-2010. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,85 persen pertahunnya.

Gambaran kondisi seperti di atas ditinjau dari aspek kemandirian kemampuan keuangan daerah, memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2010 masih memiliki ketergantungan yang cukup besar pada alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini juga menegaskan perlunya upaya-upaya dan terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2011-2015 terutama berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa datang sebagai sumber utama pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lambat laun dapat dikurangi. Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi, kondisi pendapatan daerah Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat dalam Tabel

3.1, tahun 2007 pendapatan daerah Kota Bukittinggi mengalami peningkatan sebesar 19,24 persen, tahun 2008 meningkat sebesar 10,56 persen, dan tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 4,21 persen. Sementara pada tahun 2010 pendapatan daerah Kota Bukittinggi mengalami penurunan sebesar 1,27 persen dari tahun sebelumnya. Namun demikian secara rata-rata pendapatan daerah Kota Bukittinggi selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 8,19 persen.

Akibat dari pertumbuhan sumber dana perimbangan lebih tinggi dari pendapatan asli daerah, maka komposisi pendapatan daerah Kota Bukittinggi pun mengalami perubahan yang cukup mendasar, dimana pada tahun 2006 komposisi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih rendah daripada dana perimbangan, yaitu Rp.24.397.363.460 (9,86%) berbanding Rp.213.521.575.647 (86,29%). Sebaliknya, pada tahun 2009, komposisinya sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan lebih besar daripada pendapatan asli daerah, yaitu Rp.291.185.853.995 (11,44%) berbanding Rp. 291.185.853.995 (86,60%). Hal ini berarti, bahwa pada tahun 2009 ketergantungan Kota Bukittinggi terhadap sumber dana dari Pemerintah Pusat masih tetap tinggi. Komposisi sumber pendapatan seperti ini kurang menguntungkan untuk pengembangan daerah yang lebih baik.

Penurunan komposisi pendapatan asli daerah dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya tidak hanya dialami Kota Bukittinggi, tetapi ini juga terjadi pada daerah-daerah lain seperti kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, ketergantungan terhadap pemerintah pusat pada masa datang pun tidak dapat diharapkan banyak. Karena, pemerintah pusat pada akhir-akhir ini juga mengalami kesulitan keuangan. Hal ini, dapat dilihat dengan peningkatan penerimaan dana alokasi umum (DAU) pada banyak daerah hanya berkisar 5% saja. Untuk itu, pada masa datang harus diupayakan bagaimana meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari potensi yang dimiliki daerah sendiri.

Sumber pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi yang paling besar berasal dari pajak daerah, yang dalam kurun waktu 2005-2009 mengalami pertumbuhan sebesar 10-15%. Namun demikian, jika dibandingkan penerimaan tahun 2008 dengan tahun 2009, terjadi peningkatan yaitu dari Rp.33.828.542.849 menjadi Rp.38.891.935.383. Peningkatan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah juga terjadi pada tahun 2009. Namun ke depan, pemerintah Kota Bukittinggi harus lebih mengupayakan peningkatan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, yang didukung pula dengan adanya perubahan tentang undang-undang yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu dari UU No. 34 tahun 2000 menjadi UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah dan pertumbuhan rata-rata per tahun dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.
Rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2006 s/d 2010
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2006 (Rp)	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	PENDAPATAN	247,440,847,087.00	295,060,241,230.00	326,212,067,289.98	339,931,743,992.56	335,621,663,723.21	8.19
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	24,397,363,460.00	27,774,996,744.00	33,828,542,849.97	38,891,935,383.56	32,427,629,137.21	8.50
1.1.1.	Pajak daerah	7,157,992,140.00	7,266,492,541.00	8,690,766,267.00	10,336,714,308.00	11,588,734,560.00	13.04
1.1.2.	Retribusi daerah	10,131,799,732.00	9,352,341,520.00	9,851,572,691.00	11,048,262,776.00	11,330,751,732.00	3.09
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	751,997,078.00	794,879,970.00	1,084,306,177.00	1,374,582,277.00	1,829,523,928.00	25.50
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	6,355,574,510.00	10,361,282,713.00	14,201,897,714.97	16,132,376,022.56	7,678,618,917.21	15.32
1.2.	Dana Perimbangan	213,521,575,647.00	254,191,358,056.00	283,656,384,152.00	291,185,853,995.00	279,481,878,176.00	7.32
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/ bukan pajak	13,071,575,647.00	15,223,558,056.00	17,409,970,152.00	17,966,696,995.00	18,988,138,176.00	9.93
1.2.2.	Dana alokasi umum	183,130,000,000.00	211,433,000,000.00	236,403,814,000.00	236,106,157,000.00	242,306,440,000.00	7.44
1.2.3.	Dana alokasi khusus	17,320,000,000.00	27,534,800,000.00	29,842,600,000.00	37,113,000,000.00	18,187,300,000.00	10.18
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9,521,907,980.00	13,093,886,430.00	8,727,140,288.01	9,853,954,614.00	23,712,156,410.00	39.43
1.3.1.	Hibah	-	22,000,000.00	-	-	-	(25.00)
1.3.2.	Dana darurat	-	92,820,000.00	57,000,000.00	-	-	(34.65)
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	5,406,587,980.00	5,486,334,401.00	7,112,447,955.01	8,451,431,860.00	7,747,456,510.00	10.40
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	115,320,000.00	5,000,000,000.00	-	-	-	1,033.94
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	4,000,000,000.00	865,285,675.00	550,933,333.00	-	307,600,000.00	(53.67)
1.3.6.	Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya	-	1,627,446,354.00	1,006,759,000.00	1,402,522,754	-	(15.17)
1.3.7.	Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	15,657,099,900	-

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi, 2011

Penggalian sumber-sumber pendapatan dari aset dan potensi daerah yang dimiliki dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu terus ditingkatkan, agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi. Untuk itu, perubahan undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah harus sesegera mungkin dioptimalkan pelaksanaannya. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan dan pendataan ulang keakuratan data obyek pajak.

Ditinjau dari struktur pendapatan daerah Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi selama tahun 2006 s.d 2010 rata-rata sebesar 10,15 persen per tahun. Dana Perimbangan merupakan penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi yaitu rata-rata sebesar 85,67 persen per tahun selama 5 (lima) tahun terakhir. Sementara pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata memberikan kontribusi sebesar 4,19 persen per tahun selama periode 2006–2010.

3.1.2. Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan pembangunan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, serta dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Pada tahun anggaran 2010 jumlah belanja tidak langsung Pemerintah Kota Bukittinggi lebih lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung, yaitu Rp.232.783.921.527,- berbanding Rp.130.452.272.279,- terjadi peningkatan dibandingkan belanja tahun anggaran 2009 untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.206.462.890.621,- dan belanja langsung sebesar Rp.140.227.893.161,-. Pertumbuhan komponen belanja langsung yang terbesar terjadi untuk belanja barang dan jasa, sedangkan belanja langsung untuk pegawai mengalami penurunan yang relatif kecil, pertumbuhan belanja langsung rata-rata sebesar 8,67 % per tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi telah berupaya untuk memperbaiki komposisi belanja kearah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan memperbesar jumlah belanja modal

publik. Sedangkan belanja tidak langsung, khususnya untuk belanja pegawai mengalami peningkatan yang relatif lebih rendah, bahkan untuk belanja langsung pegawai mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008, tetapi tetap lebih tinggi dibanding tahun 2009. Tabel 3.2. berikut memperlihatkan jumlah dan pertumbuhan realisasi belanja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2008 – tahun 2009.

Tabel 3.2.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
A.	Belanja Tidak Langsung	54,33%	59.55%	64.09%
1	Belanja Pegawai	51,84%	51.81%	57.69%
2	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%
3	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%
4	Belanja Hibah	0,23%	4.84%	2.45%
5	Belanja Bantuan Sosial	2,08%	2.54%	3.67%
6	Belanja Bagi Hasil	0,00%	0,00%	0,00%
7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0.09%	0.00%
8	Belanja Tidak Terduga	0,17%	0.28%	0.28%
B.	Belanja Langsung	45.67%	40.45%	35.91%
1	Belanja Pegawai	7.68%	7.51%	8.21%
2	Belanja Barang dan Jasa	14.40%	13.48%	14.51%
3	Belanja Modal	23.59%	19.46%	13.19%

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi, 2011

Tabel 3.3.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2008 (Rp.)	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)
A.	Belanja Tidak Langsung	157,755,160,965.00	206,462,890,621.00	232.783.924.527
1	Belanja Pegawai	150,550,822,723.00	179,623,274,461.00	209.549.305.264
2	Belanja Hibah	670,000,000.00	16,765,340,000.00	8.897.878.673
3	Belanja Bantuan Sosial	6,046,950,406.00	8,802,134,988.00	13.328.869.690
4	Belanja Bantuan Keuangan	-	300,000,000.00	
5	Belanja Tidak Terduga	487,387,836.00	972,141,172.00	1.007.867.900
B.	Belanja Langsung	132,633,706,519.00	140,227,893,161.00	130.452.272.279
1	Belanja Pegawai	22,315,106,852.00	26,030,221,758.00	29.824.976.178
2	Belanja Barang dan Jasa	41,830,278,279.00	46,722,990,808.00	52.709.480.286
3	Belanja Modal	68,488,321,388.00	67,474,680,595.00	47.917.815.815
	JUMLAH BELANJA	290.388.867.484	346.690.783.782	363.236.193.806

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi, 2011

Pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar jumlah belanja untuk aparatur, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, termasuk belanja untuk anggota DPRD dan Kepala Daerah serta belanja modal yang diperuntukkan bagi aparatur. Semakin tinggi proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Terjadi sedikit fluktuasi proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur antara tahun 2008-tahun 2009. Pada tahun 2008, proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan belanja aparatur ini adalah 59,33%, dan turun menjadi 59,32% pada tahun 2009. Tetapi, pada tahun 2010 proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur ini meningkat kembali dan jauh lebih tinggi yaitu menjadi 65,90%. Hal ini terutama terjadi karena adanya peningkatan belanja tidak langsung akibat peningkatan gaji dan jumlah pegawai serta peningkatan belanja modal untuk aparatur yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya karena Gempa 30 september 2009 maka jumlah belanja yang dapat direalisasikan pada tahun 2009 ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2008. Akibatnya, komposisi pemenuhan kebutuhan belanja aparatur mengalami peningkatan. Tabel 3.4. berikut menyajikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Rp	Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) Rp	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2008	172,865,929,575.00	291,358,011,691.14	59.33
2	Tahun Anggaran 2009	205,653,496,219.00	346,695,326,499.13	59.32
3	Tahun Anggaran 2010	239,374,281,442.00	363,256,148,806.00	65.90

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi, 2011

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah dana yang dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat cukup terbatas, oleh sebab itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus dapat meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi belanja baik dari segi ketepatan sasaran kegiatan yang harus didanai untuk mencapai sasaran tertentu maupun menerapkan konsep *value for money* dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat dicapai melalui tersedianya sumberdaya aparatur yang berkualitas sehingga akan mampu menyusun perencanaan yang berkualitas, dan penyusunan analisis standar belanja untuk kegiatan rutin serta

menyusun standar harga yang lebih baik dan akurat serta penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

3.2. KERANGKA PENDANAAN

3.2.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor dan sejenisnya. Pengeluaran mengikat bermakna pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan, seperti tunjangan fungsional guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk menganalisis jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan karena kewajiban, pemerintah baik karena peraturan maupun karena ada perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Keadaan akhir tahun 2010 Pemerintah Kota Bukittinggi tidak memiliki pinjaman, maka tidak memiliki anggaran sebagai dana cadangan, tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka panjang, maka pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama terbatas pada belanja tidak langsung; gaji dan tunjangan pegawai, belanja Dewan dan Kepala Daerah, belanja bagi hasil, serta belanja langsung; Belanja tunjangan fungsional PNS guru dan tenaga medis, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, dan belanja jasa kantor.

Hasil perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama menunjukkan jumlah yang cukup besar, yaitu Rp.3,355,866,019.- pada tahun 2008 dan meningkat menjadi Rp.3,572,072,415,- pada tahun 2010. Hal ini berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,57 %. Dengan demikian, pemerintah Kota Bukittinggi minimal harus menyediakan dana sebesar jumlah tersebut di atas sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.5.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2008 Rp	2009 Rp	2010 Rp	Rata-rata Pertumbuh an %
A	Belanja Tidak Langsung	150,550,822,723.00	179,623,274,461.00	209,549,305,264.00	17.99
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	149,746,822,723.00	178,817,274,461.00	208,694,305,264.00	18.06
2.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	804,000,000.00	806,000,000.00	855,000,000.00	3.16
3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
4.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
B	Belanja Langsung	3,355,866,019.00	3,781,562,684.00	3,572,072,415.00	3.57
1.	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	600,142,000.00	736,989,200.00	284,727,053.00	(19.28)
2.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	535,000,000.00	686,320,000.00	775,600,000.00	20.65
3.	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon, dan sejenisnya)	2,220,724,019.00	2,358,253,484.00	2,511,745,362.00	6.35
4.	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-
5.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-
C	Pembiayaan Pengeluaran			-	
1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
2.	Pembayaran pokok utang	106,240,384.14	4,542,717.13	-	(97.86)
	TOTAL (A+B+C)	154,012,929,126.14	183,409,379,862.13	213,346,377,679.00	17.64

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi, 2011

Berdasarkan tabel 3.6. berikut, proyeksi belanja tidak langsung dari tahun 2008 s/d 2010 terjadi rata-rata pertumbuhan sebesar 17,99% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada lima tahun berikutnya akan terjadi pertumbuhan yang relatif sama dengan asumsi stabilnya indikator makro ekonomi, kebijakan pembiayaan daerah dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi belanja tidak langsung dan belanja pendidikan serta tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat dan prioritas utama yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah.

Tabel 3.6.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Bukittinggi

No	Uraian	2008 Rp	2009 Rp	2010 Rp	Rata-rata Pertumbuhan %
A	Belanja Tidak Langsung	150,550,822,723.00	179,623,274,461.00	209,549,305,264.00	17.99
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	149,746,822,723.00	178,817,274,461.00	208,694,305,264.00	18.06
2.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	804,000,000.00	806,000,000.00	855,000,000.00	3.16
3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
4.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
B	Belanja Langsung	3,355,866,019.00	3,781,562,684.00	3,572,072,415.00	3.57
1.	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	600,142,000.00	736,989,200.00	284,727,053.00	(19.28)
2.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	535,000,000.00	686,320,000.00	775,600,000.00	20.65
3.	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon, dan sejenisnya)	2,220,724,019.00	2,358,253,484.00	2,511,745,362.00	6.35
4.	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-
5.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-
C	Pembiayaan Pengeluaran	106,240,384.14	4,542,717.13	-	(97.86)
1.	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
2.	Pembayaran pokok utang	106,240,384.14	4,542,717.13	-	(97.86)
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	154,012,929,126.14	183,409,379,862.13	213,346,377,679.00	17.64

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi, 2011

Analisis sumber penutup defisit riil dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup riil anggaran daerah. Pengurangan atau pengkajian lebih lanjut terhadap pengeluaran pembiayaan daerah untuk menutupi defisit anggaran melalui berbagai pos pengeluaran pembiayaan antara meliputi :

- a. Investasi pemerintah daerah pada Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari Sumatera Barat).
- b. Investasi pemerintah daerah pada perusahaan yang dinilai sehat dan diperkirakan mampu meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang.

- c. Pembayaran hutang pemerintah daerah pada pemerintah pusat yang telah jatuh tempo.

Tabel 3.7. memperlihatkan bahwa pembiayaan daerah sebagai pos yang diperuntukkan menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari realisasi pendapatan daerah pada tahun 2010 sebesar Rp338,421,473,628,21 dan realisasi belanja daerah sebesar Rp363,236,193,806,- terjadi defisit sebesar Rp.24,814,720,127,79 ditutup melalui realisasi pembiayaan sebesar Rp90.438.297.347,24. Realisasi pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp90.458.297.347,24 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20.000.000,-

Tabel 3.7.
Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2008 Rp	2009 Rp	2010 Rp
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	326,212,067,289.98	339,931,743,992.56	338,421,473,678.21
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	290,388,867,484.00	346,690,783,782.00	363,236,193,806.00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	969,144,207.14	4,542,717.13	20,000,000.00
A	Defisit Riil	34,854,055,598.84	(6,763,582,506.57)	(24,834,675,127.79)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	61,430,955,890.95	97,223,259,195.81	90,458,297,347.24
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	9,600,000.00	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
9.	Penerimaan Piutang Daerah	928,647,706.00	-	0.00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	62,369,203,596.95	97,223,259,195.81	90,458,297,347.24
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	97,223,259,195.79	90,459,676,689.24	65,623,577,219.45

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi, 2011

Tabel 3.8.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Bukittinggi

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2008 %	2009 %	2010 %
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	176.25	(1,437.45)	(364.24)
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	2.66	-	-
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	278.94	(1,337.45)	(264.24)

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi, 2011

Tabel 3.9.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Bukittinggi

No.	Uraian	2008		2009		2010		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1.	Jumlah SiLPA	97,223,259,195.79	100.00	90,459,676,689.24	100.00	65,623,577,219.45	100.00	17.21
2.	Pelampauan penerimaan PAD	6,137,931,181.97	6.31	5,156,387,726.56	5.70	(8,345,975,758.79)	(12.72)	(138.92)
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(3,386,630,716.00)	(3.48)	1,869,081,779.00	2.07	(13,193,774.00)	(0.02)	(127.95)
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	1,887,364,288.01	1.94	2,396,122,716.00	2.65	5,357,652,378.00	8.16	75.28
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	70,644,908,111.81	72.66	67,870,752,967.68	75.03	60,328,944,374.24	91.93	(7.52)
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	21,939,686,330.00	22.57	13,167,331,500.00	14.56	8,296,150,000.00	12.64	(38.49)

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi, 2011

Analisis berikutnya adalah untuk mengetahui realisasi sisa lebih perhitungan anggaran. Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran adalah merupakan sisa kelebihan dari realisasi penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib.

Hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa realisasi sisa lebih perhitungan anggaran daerah pada tahun 2010 cukup besar yaitu sebesar Rp65.623.577.219,45 (100%) dengan rata-rata pertumbuhan 17,21% tetapi diperkirakan pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Bukittinggi. Hal ini diupayakan dengan cara peningkatan penerimaan daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah dan memprioritaskan kepada belanja-belanja yang wajib dan mengikat.

Analisis dibawah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan tabel 3.10 sisa lebih riil perhitungan anggaran dapat mempengaruhi angka rata-rata pertumbuhan dikas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan, pada tahun 2008 sebesar Rp.75,329,317,229,81, tahun 2009 Rp. 77,339,545,364,24 dan tahun 2010 Rp. 57,374,550,926,45.

Tabel 3.10
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kota Bukittinggi

No.	Uraian	2008 Rp	2009 Rp	2010 Rp
1.	Saldo kas neraca daerah	97,269,003,559.81	90,506,876,864.24	65,670,700,926.45
2.	Dikurangi:			
3.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-
	Kegiatan lanjutan	21,939,686,330.00	13,167,331,500.00	8,296,150,000.00
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	75,329,317,229.81	77,339,545,364.24	57,374,550,926.45

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi, 2011

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika terjadi belanja modal berarti akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika terjadi pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika terjadi penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Tabel 3.11.
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Data tahun dasar (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	65,695,717,990.45	(17.18)	54,407,371,489.91	45,058,676,014.04	37,316,345,718.24	30,904,362,510.10	25,594,135,861.19
2.	Dikurangi: Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kegiatan lanjutan	8,296,150,000.00	(38.49)	5,103,028,044.32	3,138,913,257.48	1,930,770,584.14	1,187,632,388.28	730,522,155.91
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	57,399,567,990.45	(11.56)	50,765,958,533.60	44,898,988,547.52	39,710,058,291.44	35,120,807,406.17	31,061,931,559.23

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi, 2011

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang. Berdasarkan tabel 3.11. diperoleh proyeksi tahun 2011 sebesar Rp. 50,765,958,533.60 tahun 2012 sebesar Rp. 44,898,988,547.52 tahun 2013 sebesar Rp. 39,710,058,291.44 tahun 2014 sebesar Rp. 35,120,807,406.17 dan tahun 2015 sebesar Rp. 31,061,931,559.23 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 11,56 per tahun.

Tabel 3.12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1.	Pendapatan	359,146,589,788.00	387,654,256,953.39	418,424,752,474.43	451,637,690,913.70	487,486,943,942.97
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	50,765,958,533.60	44,898,988,547.52	39,710,058,291.44	35,120,807,406.17	31,061,931,559.23
	Total Penerimaan	409,912,548,321.61	432,553,245,500.90	458,134,810,765.87	486,758,498,319.87	518,548,875,502.20
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	213,845,363,576.00	251,574,967,305.45	295,961,357,854.02	348,179,019,085.16	409,609,653,807.91
5.	Pendapatan Asli Daerah	43,102,510,325.00	46,523,820,879.73	50,216,701,833.12	54,202,709,393.00	58,505,110,815.64
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	152,964,674,420.61	134,454,457,315.72	111,956,751,078.74	84,376,769,841.71	50,434,110,878.65

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi, 2011

Kebijakan keuangan daerah tidak saja ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat namun juga diperlukan untuk meningkatkan target pendapatan dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan untuk mendukung hal tersebut maka perlu dilakukan analisis kerangka pendanaan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat dan prioritas utama seperti yang disajikan pada tabel 3.12. diatas.

Tabel 3.13.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Bukittinggi (Rp.000)

No	Uraian	Tahun 2010	Proyeksi				
			Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah		152.933.269,06	134.418.475,87	111.917.672,04	84.335.790,93	50.392.194,22
1	Pendapatan Asli Daerah	33.847.174,75	43.102.510,32	46.523.820,87	50.216.701,83	54.202.709,39	58.505.110,81
2	Dana Perimbangan	279.481.878,17	311.594.079,46	336.327.212,28	363.023.565,52	391.838.972,03	422.941634,04
3	Lain-lain Penerimaan Yang Sah	25.092.420,75	4.450.000,00	4.803.223,78	5.184.485,11	5.596.009,48	6.040.199,07
II	Rencana Alokasi Pengeluaran	363.236.193,80	431.357.589,78	482.058.016,10	538.717.612,46	602.036.801,14	672.798.329,86
1	Belanja Tidak Langsung	232.783.921,53	232.428.073,16	259.746.944,27	290.276.790,32	324.395.019,30	362.523.398,55
2	Belanja Langsung	130.452.272,27	198.929.516,62	222.311.071,83	248.440.822,14	277.641.781,84	310.274.931,31
3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
III.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	90.458.297,34	75.000.000,00	44.863.007,11	39.670.979,26	35.079.828,50	31.020.014,90
III.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.000,00	2.789.000,00	2.550.000,00	2.601.000,00	2.653.020,00	2.706.080,40
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	65.623.577,21	50.765.958,53	44.898.988,55	39.710.058,29	35.120.807,41	31.061.931,56

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi, 2011

Berdasarkan tabel 3.13. dapat dihitung kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia maka dapat dihitung proyeksi sebagai berikut :

- Proyeksi tahun 2011 sesuai urutan prioritas termasuk prioritas III.
- Proyeksi tahun 2012 sesuai urutan prioritas termasuk prioritas II.
- Proyeksi tahun 2013 sesuai urutan prioritas termasuk prioritas II.
- Proyeksi tahun 2014 sesuai urutan prioritas termasuk prioritas II
- Prioritas tahun 2015 sesuai urutan prioritas termasuk prioritas I.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam perencanaan pembangunan akan meningkatkan kualitas perencanaan tersebut karena telah mengantisipasi fenomena yang berkembang ditengah masyarakat.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Selain identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga harus dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut terjadi ketimpangan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Mengatasi ketimpangan yang terjadi tersebutlah disusun perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan pembangunan.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pokok pembangunan daerah Kota Bukittinggi dapat digambarkan sebagai berikut:

4.1.1. Aspek Pemerintahan

Proses pembangunan akan berjalan dengan baik tentunya dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Goverment* dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang ini yang masih

dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya adalah belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip di atas. Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya adalah:

4.1.1.1. Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Kelembagaan Pemerintah Daerah merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah, selain elemen urusan pemerintahan dan kapasitas aparatur pemerintah daerah itu sendiri. Pengaturan terhadap kelembagaan atau sering disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi sekarang ini adalah belum maksimalnya Struktur Organisasi Tata Kerja dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangan pemerintah daerah. Pembentukan SOTK Kota Bukittinggi belum efektif dan efisien karena belum mampu menyentuh seluruh aspek pelayanan masyarakat. Selain itu, berkaitan dengan kelembagaan pemerintah daerah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum terlaksana dengan sempurna di Kota Bukittinggi.

4.1.1.2. Sumber daya aparatur

Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terlaksana optimal dikarenakan masih terbatasnya kompetensi aparatur dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu manajemen kepegawaian dalam hal penempatan aparatur belum merujuk sepenuhnya kepada kompetensi yang dimiliki oleh aparatur itu sendiri.

4.1.1.3. Pengelolaan Keuangan daerah

Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah masih menjadi permasalahan yang mendasar. Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah yang dihadapi saat ini antara lain adalah identifikasi aset yang murni milik daerah dan kelengkapan sertifikat tanah dan bangunan.

4.1.2. Aspek Sosial Budaya

4.1.2.1. Bidang Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu Negara ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan antara lain juga melewati

pendidikan yang berkualitas. Permasalahan yang dihadapi Kota Bukittinggi saat ini adalah belum terwujudnya masyarakat cerdas yang dibarengi dengan kematangan emosi yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat minangkabau. Permasalahan ini timbul karena belum meratanya akses dan kualitas pendidikan tersebut bagi seluruh masyarakat. Selain itu tingkat kompetensi tenaga pendidik juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan saat ini. Kemudian yang tidak kalah mempengaruhi akan kualitas pendidikan tersebut adalah manajemen pengelolaan lembaga pendidikan yang belum terkelola dengan baik.

4.1.2.2. Bidang Kesehatan

Pemerataan akses pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Pemerataan akses pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yaitu Indonesia Sehat. Saat ini Kota Bukittinggi masih dihadapi dengan permasalahan belum terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat berdasarkan indikator indonesia sehat tersebut. Pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat masih menjadi fokus saat ini selain peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta ketersediaan seluruh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Selain itu fokus terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat penciptaan lingkungan hidup yang sehat juga menjadi permasalahan saat ini.

4.1.2.3. Lingkungan hidup

Proses pembangunan yang pesat dewasa ini baik secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Sehingga pada akhirnya gagasan pembangunan yang berbasiskan lingkungan semakin mencuat dan menjadi perhatian tidak hanya skala daerah maupun nasional tetapi dunia juga telah menjadikan pembangunan ramah lingkungan menjadi agenda utama.

Pembangunan Kota Bukittinggi telah berkembang sangat maju, namun masih menyisakan perhatian terhadap aspek lingkungan hidup. Permasalahan sanitasi, kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat menjadi fokus sekarang ini dalam setiap aspek pembangunan. Sehingga ke depan diharapkan setiap aspek

pembangunan Kota Bukittinggi betul-betul mengkaji dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.

4.1.2.4. Sampah

Tingginya tingkat aktifitas masyarakat di Kota Bukittinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Kota. Hal ini juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna. Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Payakumbuh, yang Nota Kesepakatannya telah ditandatangani beberapa waktu yang lalu.

4.1.2.5. Air bersih

Ketersediaan air bersih guna melayani kebutuhan masyarakat merupakan salah satu penunjang dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Sampai saat ini ketersediaan air bersih belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Kota Bukittinggi, dikarenakan kurangnya sumber air yang ada. Hingga kini sumber air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat hanya bersumber dari satu tempat saja yakni daerah Sungai Tanang.

4.1.3. Aspek Ekonomi

Kota Bukittinggi sudah lama dikenal sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang memberikan kontribusi yang positif dalam pertumbuhan ekonomi Kota. Hanya saja pertumbuhan ekonomi tersebut masih menyisakan permasalahan mengenai belum terwujudnya ketangguhan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan potensi unggulan daerah.

4.1.3.1. Kualitas KUKM

Peranan KUKM dalam perekonomian sangatlah penting, hal ini terlihat sekali peranannya, karena dengan KUKM ini pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Selain itu KUKM juga dinilai tahan dalam menghadapi goncangan perekonomian, karena dianggap tidak berhubungan langsung dengan bank dan lebih banyak menggunakan input lokal.

Permasalahan yang dihadapi KUKM di Kota Bukittinggi pada dasarnya sama dengan permasalahan umum yang dihadapi, yakni permasalahan peningkatan kualitas yang erat kaitannya dalam pemakaian teknologi produksi yang kurang. Permasalahan modal usaha dalam kaitannya dengan kredit perbankan juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi. Selain itu masalah yang masih mendasar dari KUKM ini adalah manajemen

dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan itu semua akhirnya bermuara pada kurang kompetitifnya produk lokal baik skala nasional maupun internasional.

4.1.3.2. Sarana pendukung perekonomian

Sarana pendukung pengembangan perekonomian tentunya tidak bisa dilepaskan dari pentingnya keberadaan terminal sebagai tempat kedatangan dan keberangkatan dari suatu kota. Kota Bukittinggi dalam mendukung fungsi kota tentunya harus memiliki terminal yang representatif. Namun kenyataannya saat ini keberadaan terminal telah mengalami penyempitan dan dipandang tidak layak lagi guna mendukung peningkatan perekonomian daerah.

Selain keberadaan terminal, kebutuhan akan sarana gedung parkir yang mampu mengatasi kemacetan yang selalu terjadi juga menjadi permasalahan utama sekarang ini. Dalam pengembangan Kota Bukittinggi sebagai daerah tujuan wisata, sekarang ini sudah diberlakukan kawasan pedestrian di kawasan jam gadang, yang menambah indah kawasan landmark Kota Bukittinggi. Namun di satu sisi dengan adanya kawasan tersebut berdampak berkurangnya kawasan parkir di sekitar Jam Gadang. Kebutuhan akan gedung parkir sekarang ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan agar tidak mengurangi animo kunjungan wisatawan yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian Kota Bukittinggi.

Selain permasalahan yang mendasar di atas, permasalahan akan penduduk miskin, pengangguran masih menjadi perhatian dalam proses pembangunan Kota Bukittinggi ke depan.

4.2. Isu Strategis

Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut 1) Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan

tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; dan 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

4.2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan

Tatatan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance* mensyaratkan budaya organisasi yang memiliki kemampuan adaptasi dan penyesuaian terhadap berbagai perubahan paradigma maupun regulasi. Pemerintah daerah sebagai regulator, harus mampu menciptakan iklim sosial yang aman, nyaman dan tertib serta iklim ekonomi yang kondusif. Dalam fungsi sebagai fasilitator, pemerintah daerah di masa depan harus mampu menyusun kerangka regulasi yang dapat mewadahi tumbuh berkembangnya budaya partisipasi baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga dihadapkan pada permasalahan mengenai SDM aparatur. Oleh sebab itu tantangan strategis di masa depan adalah bagaimana pembangunan aparatur pemerintah mampu menghasilkan ketersediaan SDM aparatur yang secara kuantitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan secara kualitas memiliki kompetensi dan moralitas. Tantangan pemerintahan juga dihadapkan pada tuntutan pelayanan prima yang cepat, tanggap dan murah. Oleh juga diperlukan perubahan mekanisme kerja dari manual menuju pemanfaatan teknologi sistem informasi.

Pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan azas-azas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diakibatkan oleh neraca asset yang belum optimal. Dikaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan asset pemerintah daerah masih ditemukan permasalahan pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya asset-aset yang belum tersertifikasi.

4.2.2. Pendidikan

Upaya pembangunan pendidikan di Kota Bukittinggi tidak terlepas dari 3 (tiga) Pilar pendidikan yang terdiri dari aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, dan akuntabilitas.

Pada aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, yang menjadi isu utama adalah penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar.

Adapun dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, yang menjadi isu utama adalah pengembangan dan pengelolaan sekolah serta peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Peningkatan kualifikasi guru menjadi prasyarat bagi proses sertifikasi guru dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Untuk aspek tata kelola dan akuntabilitas, difokuskan pada upaya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan. Penerapan MBS dan PBM merupakan media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan proses pendidikan. Adapun standarisasi pelayanan pendidikan merupakan syarat bagi terlaksananya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Sedangkan penyediaan data dan informasi pendidikan yang akuntabel dan bersifat kekinian menjadi kebutuhan dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan.

Saat sekarang ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi adalah yang tertinggi di Sumatera Barat, namun itu saja tidak cukup tanpa dilandasi dengan kematangan emosi yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat minangkabau.

Seiring dengan isu penyelenggaraan pendidikan tersebut, perkembangan peradaban yang diikuti dengan perkembangan informasi dan teknologi telah banyak membawa pengaruh ke dalam sendi-sendi kehidupan, diantaranya penerapan nilai-nilai agama dan adat dewasa ini yang mulai menurun dan menjadi perhatian semua kalangan. Masyarakat Bukittinggi yang berbudaya Minangkabau dengan filosofi Adat Basyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang diakomodir dalam perwujudan visi Kota Bukittinggi tahun 2011-2015 "Masyarakat Bukittinggi Cerdas, Sehat dan Berekonomi Mapan yang dilandasi Nilai-nilai Agama dan Adat", dalam penyelenggaraan pendidikan diterapkan pendidikan berbasis akidah. Program pendidikan berbasis akidah dan berbasis karakter bangsa, tidak terlepas dari keseimbangan antara penguasaan ilmu dan teknologi serta kemapanan keimanan seorang anak di sebuah lembaga pendidikan karena tuntutan pendidikan yang sesungguhnya, setiap anak didik tidak hanya diberikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), namun juga keimanan dan ketaqwaan (imtaq).

4.2.3. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi angka kematian bayi dan ibu melahirkan melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Isu utama bidang kesehatan sekarang ini adalah meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan baik dari keberadaan sarana pelayanan kesehatan maupun dari aspek biaya. Kemudian peningkatan kualitas tenaga kesehatan dalam

memberikan pelayanan adalah hal mutlak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekarang ini.

Perkembangan peredaran Narkoba dewasa ini sangatlah memperihatinkan dan mencemaskan masyarakat. Dengan pesatnya peredaran Narkoba akan berdampak nantinya kepada peningkatan penderita HIV/AIDS. Karena penularan HIV/AIDS salah satunya adalah melalui penyalahgunaan pemakaian Narkoba.

Terkait dengan lingkungan hidup, dalam hal penciptaan sanitasi yang sehat, Kota Bukittinggi merupakan salah satu Kota yang tergabung dalam Asosiasi Kota Peduli Sanitasi yang akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dalam program permasalahan sanitasi. Kemudian sehubungan dengan permasalahan persampahan Kota Bukittinggi telah melakukan kerjasama dalam penyediaan Tempat Pembuangan Akhir Payakumbuh yang akan segera beroperasi guna menampung sampah yang berasal dari Kota Bukittinggi. Selain itu Kota Bukittinggi juga sedang menjajaki kerjasama dalam mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).

4.2.4. Ekonomi

Terbukanya pintu perdagangan bebas dunia menyebabkan lancarnya keluar masuk produk antar negara. Hal ini akan berdampak akan membanjirnya produk luar negeri di pasar dalam negeri apabila tidak diantisipasi dengan peningkatan kualitas dan persaingan harga, maka akan menyebabkan produk dalam negeri kalah bersaing. Hal ini tentu harus disikapi dengan serius oleh seluruh pihak, khususnya pelaku UKM agar tidak terkena dampak dari perdagangan bebas ini.

Infrastruktur merupakan sarana pendukung bagi aktivitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi, sehingga infrastruktur menjadi salah satu elemen utama dalam pembangunan wilayah. Isu strategis oleh bidang infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi adalah kehidupan criminal yang representatif. Saat ini telah dilakukan peninjauan untuk itu berupa pembangunan terminal baru ataupun pemekaran terminal yang ada. Selain infrastruktur terminal, perencanaan pembangunan gedung parkir juga menjadi isu strategis. Dalam waktu diktat pemda Bukittinggi membangun gedung parkir yang nantinya akan mampu menampung kendaraan wisatawan yang berkunjung ke Bukittinggi. Keberadaan gedung parkir ini diharapkan mampu mengurangi kesemrawutan perparkiran Kota Bukittinggi.

Beberapa daerah di Sumatera Barat saat ini mulai fokus mengembangkan industri pariwisatanya, dengan mengembangkan objek-objek wisata baru. Ini merupakan tantangan bagi industri wisata bukittinggi, karena pada akhirnya tantangan ini akan menjadi peluang baru akan berdampak kepada tingkat kunjungan ke Kota Bukittinggi. Hal ini tentunya harus disikapi dengan mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam

pengembangan objek wisata yang telah kota miliki, agar industri pariwisata Kota Bukittinggi tetap kompetitif.

Tujuan pembangunan adalah pengentasan kemiskinan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengentasan kemiskinan masih menjadi isu strategis dimana berdasarkan data BPS Kota Bukittinggi pada tahun 2008 diperoleh data keluarga miskin sebanyak 3.637 Rumah Tangga Sasaran. Selain pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran juga menjadi isu penting dalam pembangunan. Pada tahun 2010 di Kota Bukittinggi masih tercatat jumlah pencari kerja sebanyak 1.102 orang.

Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kota Bukittinggi yang rawan akan terjadi bencana merupakan salah satu isu yang perlu diantisipasi dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu setiap perencanaan pembangunan diwajibkan untuk memperhatikan aspek-aspek yang tanggap terhadap kebencanaan. Kemampuan pemerintah kota Bukittinggi menata isu ini akan sangat berpengaruh dalam memperhatikan kondisi eksisting kota dan mempertahankan sumber-sumber ekonomi masyarakat.

4.2.5. Pencapaian Sasaran Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015

Penelaahan tujuan pembangunan Millenium Goals (MDGs) juga merupakan salah satu instrument guna melihat sasaran-sasaran penting yang harus dicapai dan ditunjang oleh pemerintah daerah. Sasaran-sasaran yang tertuang dalam MDGs perlu diidentifikasi untuk melihat kemungkinan peluang, tantangan ataupun ancaman yang akan dihadapi Pemerintah Daerah dalam waktu lima tahun ke depan. Berikut telaahan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Millenium Goals (MDGs).

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Oleh karena itu, MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yaitu:

MDG 1 : Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

MDG 2 : Mencapai pendidikan dasar untuk semua

MDG 3 : Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

MDG 4 : Menurunkan angka kematian anak

MDG 5 : Meningkatkan kesehatan ibu

MDG 6 : Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya

MDG 7 : Memastikan kelsetarian lingkungan hidup

MDG 8 : Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Sampai dengan tahun 2010 ini, Indonesia telah mencapai berbagai sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: (1) sasaran yang telah dicapai; (2) sasaran yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2105 (on-track); dan (3) sasaran yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya.

Sasaran pembangunan MDGs secara nasional yang telah dicapai hingga tahun 2010 sebagai berikut :

1. **MDG 1** - Proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari USD 1 per hari telah menurun dari 20,6% pada tahun 1990 menjadi 5,9% pada tahun 2008;
2. **MDG 3** - Kesetaraan Gender dalam semua jenis dan jenjang pendidikan telah hampir tercapai yang ditunjukkan dengan rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki di SD/MI/Paket A dan SMP/MTS/Paket B berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99, dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 5 sd. 24 tahun sebesar 99,85 pada tahun 2009;
3. **MDG 6** - Prevelensi tuberculosis menurun dari 443 kasus pada tahun 1990 menjadi 224 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2009.

Sasaran dari tujuan pembangunan MDGs secara nasional telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (on track) adalah :

1. **MDG 1** - Prevalensi balita kekurangan gizi telah berkurang hampir setengahnya, dari 31% pada tahun 1989 menjadi 18,4% pada tahun 2007. Target 2015 sebesar 15,5% diperkirakan akan tercapai;
2. **MDG 2** - Angka partisipasi murni untuk pendidikan dasar mendekati 100% dan tingkat melek huruf penduduk melebihi 99,47% pada tahun 2009;
3. **MDG 3** - Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SM/MA/Paket C dan pendidikan tinggi pada tahun 2009 berturut-turut 96,16 dan 102,95. Dengan demikian maka target 2015 sebesar 100 diperkirakan akan tercapai;

4. **MDG 4** - Angka kematian balita telah menurun dari 97 per 1.000 kelahiran pada tahun 1991 menjadi 44 per 1.000 kelahiran pada tahun 2007 dan diperkirakan target 32 per 1.000 kelahiran pada tahun 2015 dapat tercapai;
5. **MDG 8** - Indonesia telah berhasil mengembangkan perdagangan serta sistem keuangan yang terbuka, berdasarkan aturan, bisa diprediksi dan non diskriminatif-ditunjukkan dengan adanya kecenderungan positif dalam indikator yang berhubungan dengan perdagangan dan system perbankan nasional. Pada saat yang sama, kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengurangi rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB dari 24,6% pada tahun 1996 menjadi 10,9% pada tahun 2009. Debt service ratio juga telah berkurang dari 51% pada tahun 1996 menjadi 22% pada tahun 2009.

Sasaran dari tujuan pembangunan Millenium (MDGs) secara nasional telah menunjukkan kecenderungan kemajuan yang baik namun masih memerlukan kerja keras untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015, mencakup :

1. **MDG 1** - Indonesia telah menaikkan ukuran untuk target pengurangan kemiskinan dan akan memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur terhadap garis kemiskinan nasional dari 13,33% pada tahun 2010 menjadi 8-10% pada tahun 2014;
2. **MDG 5** - Angka kematian ibu menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Diperlukan upaya keras untuk mencapai target pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup;
3. **MDG 6** - Jumlah penderita HIV/AIDS meningkat, khususnya diantara kelompok resiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks;
4. **MDG 7** - Indonesia memiliki tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi, namun tetap berkomitmen untuk meningkatkan tutupan huan, memberantas pembalakan liar dan mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida paling sedikit 26% selama 20 tahun kedepan. Selain itu, saat ini hanya 47,73% rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan 51,19% yang memiliki akses sanitasi yang layak. Diperlukan perhatian khusus, untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015.

Penelaahan kebijakan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dan kebijakan pembangunan Provinsi merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang

berhubungan dan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya ancaman bagi daerah selama kurun waktu lima tahun yang akan datang. Berikut telaahan terhadap RPJMN 2010-2014, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2011-2015 serta dokumen perencanaan terkait lainnya.

Secara umum capaian terhadap target MDGs tahun 2015, pemerintah kota Bukittinggi untuk indikator yang ditetapkan telah tercapai, namun tetap perlu didukung dan ditingkatkan terutama pada indikator yang rentan, seperti air minum terhadap kesakitan dan HIV/AIDS.

4.2.6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 memuat 3 Sasaran Utama, dengan uraian sebagai berikut, yaitu :

4.2.6.1 Sasaran Pembangunan Nasional

Sesuai dengan persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, pemerintah bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun ke depan. Dengan pulihnya perekonomian global dalam 1-2 tahun mendatang, capaian tertinggi yang pernah dicapai oleh laju pertumbuhan perekonomian Indonesia sebelum krisis sekitar 7 persen sudah dapat dipenuhi sebelum tahun terakhir masa 2010-2014.

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014, dan kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6 juta-10,7 juta pekerja selama periode 2010 - 2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014. Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan makro ekonomi yang terukur dan berhati hati, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 4-6 persen per tahun. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang

antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf; meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan dan berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Sementara itu, di bidang kesehatan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, antara lain, ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi, dan kematian ibu melahirkan.

Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2014 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan, membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan, terpelihara dan terus meningkatnya kemampuan swasembada beras dan komoditas pangan utama lainnya, menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah, menjaga nilai tukar petani agar dapat menikmati kemakmuran, dan meningkatkan daya tawar komoditas Indonesia dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari sektor pertanian Indonesia di kawasan regional Asia dan Global.

Bidang energi membangun ketahanan energi dengan mencapai diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda, meningkatkan penggunaan energi terbarukan (*renewable energy*) dan berpartisipasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan karbon secara global, meningkatkan efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi, dan memproduksi energi yang bersih dan ekonomis.

Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Selain itu terus dilakukan program reboisasi, penghutan kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon.

Dalam rangka mengatasi dampak pemanasan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia, pada tahun 2009, dalam pertemuan G 20 di Pittsburgh dan Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim di Copenhagen telah berinisiatif

memberikan komitmen mitigasi dampak perubahan iklim berupa penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dari kondisi tanpa rencana aksi (*business as usual* – *BAU*) dengan usaha sendiri serta penurunan sebesar 41% dengan dukungan internasional. Upaya penurunan emisi GRK tersebut terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan kehutanan, lahan gambut, limbah dan energi yang didukung oleh langkah-langkah kebijakan di berbagai sektor dan kebijakan fiskal.

Bidang infrastruktur meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.

Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah langkah-langkah yang dilakukan adalah, meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran, melaksanakan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.

4.2.6.2 Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi

Sasaran penegakan pilar demokrasi adalah membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi di Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif, dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Dengan demikian, fungsi checks and balances dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif sehingga penyelenggaraan negara tidak terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi, namun sebaliknya akan makin meningkat kualitas hasil dan akuntabilitasnya. Sasaran di bidang ini juga adalah untuk menjamin setiap lima tahun terselenggaranya proses pemilu yang memenuhi azas-azas demokrasi yang baik, yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara pemilih dapat melaksanakan hak memilihnya secara bebas dan bertanggung jawab.

4.2.6.3 Sasaran Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien, dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum. Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Dengan demikian, reformasi kepolisian dan kejaksaan, dan lembaga peradilan harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sasaran berupa muncul dan tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum karena mereka dipercaya akan selalu melindungi masyarakat berdasarkan azas keadilan dan kepatuhan pada aturan dan hukum tanpa pembedaan dan diskriminasi.

Selain berbagai bidang yang telah disebutkan di atas, pemerintah tetap mengembangkan sektor-sektor pembangunan lainnya secara konsisten, terkoordinasi dan terintegrasi. Dengan demikian, pada akhir RPJMN 2010 -2014 Indonesia berhasil mencapai berbagai sasaran pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Indikator dan target sasaran utama pembangunan nasional sebagaimana uraian diatas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJMN 2010-2014

NO.	PEMBANGUNAN	SASARAN	
I. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
1. Ekonomi			
a)	Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%	
b)	Inflasi	Rata-rata 4 - 6 persen pertahun	
c)	Tingkat Pengangguran (terbuka)	5 - 6 persen pada akhir tahun 2014	
d)	Tingkat Kemiskinan	8 - 10 persen pada akhir tahun 2014	
2. Pendidikan			
		Status Awal (Tahun 2008)	Target Tahun 2014
a)	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun)	7,5	8,25
b)	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas	5,97	4,18

NO.	PEMBANGUNAN	SASARAN	
	(persen)		
c)	Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A (persen)	95,14	96
d)	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen)	72,28	76
e)	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen)	64,28	85
f)	Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen)	21,26	30
g)	Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat		
3. Kesehatan			
		Status Awal (tahun 2008)	Target tahun 2014
a)	Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)	70,7	72
b)	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	228	118
c)	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	34	24
d)	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen)	18,4	< 15,0
4. Pangan			
a)	Produksi Padi	Tumbuh 3,22 persen per tahun	
b)	Produksi Jagung	Tumbuh 10,02 persen per tahun	
c)	Produksi Kedelai	Tumbuh 20,05 persen per tahun	
d)	Produksi Gula	Tumbuh 12,55 persen per tahun	
e)	Produksi Daging Sapi	Tumbuh 7,30 persen per tahun	
5. Energi			
a)	Peningkatan kapasitas pembangkit listrik	3.000 MW pertahun	
b)	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Pada tahun 2014 mencapai 80 persen	
c)	Meningkatnya produksi minyak bumi	Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel per hari	
d)	Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi	Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW	
6. Infrastruktur			
a)	Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua	Hingga tahun 2014 mencapai sepanjang 19.370 km	

NO.	PEMBANGUNAN	SASARAN
b)	Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda	Selesai tahun 2014
c)	Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur	Selesai sebelum tahun 2013
d)	Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan)	Selesai tahun 2014
II. SASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI		
1.	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	1) Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum;
		2) Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi, dengan indeks rata-rata 70 pada akhir tahun 2014;
		3) Menyelenggarakan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis, dengan tingkat partisipasi politik rakyat 75% dan berkurangnya diskriminasi hak dipilih dan memilih;
		4) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi
		Pada tahun 2014: ► Indeks Demokrasi Indonesia: 73
III. SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM		
1.	Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum.	1) Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum
		2) Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum
		3) Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien

NO.	PEMBANGUNAN	SASARAN
		Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 sebagaimana termuat dalam RPJMN adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga ` hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Prioritas Pembangunan Nasional

Visi dan Misi pemerintah Tahun 2010-2014 dijabarkan lebih operasional ke dalam sebelas Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

Prioritas 2: Pendidikan Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Prioritas 3: Kesehatan Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Prioritas 5: Ketahanan Pangan Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

Prioritas 6: Infrastruktur Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Prioritas 8: Energi Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik.

Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.

4.2.7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015

4.2.7.1 Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

1. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi pertama adalah: a) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, b) Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama, c) Meningkatnya kerukunan umat beragama, d) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya, e) Berkembangnya nilai-nilai seni dan sosial budaya, f) Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia pemangku adat, g) Berkurangnya tingkat konflik dalam masyarakat.
2. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kedua adalah: a) Meningkatnya kinerja aparatur daerah, b) Tersedianya data dan informasi statistik, c) Meningkatnya efektivitas peraturan daerah, d) Meningkatnya efektivitas pelayanan satu pintu, e) Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, f)

Meningkatnya kompetensi aparaturnya daerah, g) Berkurangnya temuan audit keuangan, h) Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, i) Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan.

3. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ketiga adalah: a) Meningkatkan angka partisipasi sekolah, b) Meningkatkan umur harapan hidup dan berkurangnya kematian bayi dan ibu melahirkan, c) Menurunnya persentase gizi buruk, d) Meningkatkan kualifikasi guru, e) Meningkatkan jumlah sekolah unggul dengan pendidikan berkarakter, f) Berkembangnya pendidikan bernuansa surau, g) Berkembangnya lembaga pendidikan kejuruan dan kewirausahaan, h) Meningkatkan jumlah wirausahawan yang profesional, i) Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat, j) Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi keempat adalah: a) Meningkatkan produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, b) Meningkatkan jumlah kawasan sentra produksi pertanian, c) Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, d) Meningkatkan industri unggulan daerah, e) Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, f) Meningkatkan jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya, g) Meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, h) Menurunnya persentase penduduk miskin, i) Menurunnya persentase pengangguran, j) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, k) Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat, l) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya air, m) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara, n) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik.
5. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kelima adalah: a) Tersedianya informasi wilayah rawan bencana, b) Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana, c) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, d) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, e) Meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem, f) Menurunnya jumlah illegal logging dan illegal fishing.

4.2.7.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Prioritas pembangunan adalah kumpulan program strategis yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari masing-masing agenda pembangunan,

sedangkan Program Strategis didasarkan pada visi, misi dan strategi pembangunan daerah. Agenda pembangunan Sumatera Barat tahun 2011-2015 dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas pembangunan, yaitu: 1) Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat, 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan, 3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, 4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, 5) Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan, 6) Pengembangan Industri Olahan dan perdagangan, 7) Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, 8) Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran 9) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat, 10) Mitigasi, Penanggulangan Bencana Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Prioritas 1: Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.

Prioritas pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat diarahkan kepada implementasi prinsip-prinsip agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan pengamalan ajaran agama yang baik dan penerapan adat dan budaya Minangkabau yang intensif diharapkan akan terwujud: 1) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 2) Terwujudnya pribadi masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia, 3) Tercerminnya nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Menurunkan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) Terwujudnya optimalisasi peran lembaga keagamaan dan lembaga adat, dan 7) Berkurangnya perbuatan maksiat.

Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan. Prioritas Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan terwujud: 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, 4) Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN, 6) Terwujudnya kepastian hukum 7) Terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 8) Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel 9) Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, Provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Prioritas 3: Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan. Prioritas peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan diarahkan pada penuntasan wajib belajar

9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan terwujud: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Meningkatnya angka partisipasi pendidikan, 4) Terwujudnya pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Indonesia Bagian Barat, 6) Terwujudnya pendidikan spesifik sesuai dengan bakat SDM, 7) Terwujudnya lembaga pendidikan penghasil SDM profesional, 8) Lahirnya wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Berkembangnya penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 2) Meningkatnya angka harapan hidup, 3) Menurunnya tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Menurunnya persentase masyarakat gizi kurang, 6) Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat, 7) Meningkatnya layanan rumah sakit berakreditasi internasional.

Prioritas 5: Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan. Prioritas pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan diarahkan untuk mengembangkan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan) yang mempunyai nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan: 1) Berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian, 2) Berkembangnya agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 3) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai Provinsi agraris dengan petani yang sejahtera, 4) Berkembangnya penerapan teknologi pertanian, 5) Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian, 6) Terwujudnya ketahanan pangan, 7) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai daerah penghasil pengusaha profesional, 8) Terwujudnya pola pembangunan berbasis kawasan, 9) Terwujudnya pola pembangunan berbasis komoditi unggulan dan prinsip *one village one product*.

Prioritas 6: Pengembangan Industri Olahan dan Perdagangan. Prioritas pengembangan industri olahan dan perdagangan diarahkan untuk mengembangkan industri skala kecil dan menengah dan jasa berbasis bahan baku dan potensi daerah.

Dengan pengembangan industri ini diharapkan: 1) Berkembang sentra industri dan jasa berdasarkan potensi lokal, 2) Penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 3) Meningkatnya daya saing produk industri dan jasa, 4) Meningkatnya jumlah ekspor produk industri, 5) Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 6) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai pelopor pertumbuhan UMKMK dan ekonomi kerakyatan, 7) Terwujudnya promosi dan pemasaran produk industri.

Prioritas 7: Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya. Prioritas pengembangan kawasan wisata alam dan budaya diarahkan untuk mengembangkan objek-objek wisata alam dan situs-situs budaya Minangkabau yang sudah ada menjadi objek wisata yang menarik. Dengan pengembangan pariwisata alam dan budaya ini diharapkan: 1) Berkembang objek-objek wisata alam yang potensial, 2) Berkembang objek-objek wisata budaya yang sudah ada pada setiap daerah, 3) Mewujudkan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya.

Prioritas 8: Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran. Prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif sehingga laju penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi dari periode RPJM sebelumnya. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur secara lebih tajam, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin secara lebih tajam, 3) Perluasan lapangan kerja, 4) Meningkatnya ketersediaan lembaga penanggulangan kemiskinan, 5) Meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro.

Prioritas 9: Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat. Prioritas pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat diarahkan untuk meningkatkan akses, jumlah, dan efisiensi distribusi produksi masyarakat, penataan ruang terpadu untuk usaha dan industri, sarana prasarana pertanian, dan perumahan rakyat. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) Meningkatnya akses transportasi penunjang ekonomi, 2) Lancarnya akses antar kota dan desa, 3) Meningkatnya akses jalan terhadap destinasi wisata, 4) Tersedianya akses jalan evakuasi penanggulangan bencana, 5) Tersedianya sarana prasarana irigasi pertanian, 6) Tersedianya sarana prasarana perekonomian masyarakat, 7) Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan pemukiman.

Prioritas 10: Mitigasi, Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Prioritas Penanggulangan Bencana alam diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana melalui penguatan kapasitas aparat, penguatan lembaga masyarakat, tersedianya tim gerak cepat, tersedianya sistem peringatan dini, dan program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana,

menjaga kelestarian dan daya dukung sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan potensi sumberdaya yang sudah ada untuk usaha ekonomi masyarakat. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) Terwujudnya kesiapan daerah untuk penanggulangan bencana, 2) Terwujudnya pemetaan daerah rawan bencana, 3) Tersedianya sistem peringatan dini yang siap siaga, 4) Pengurangan resiko bencana alam, 5) Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi, 6) Terwujud konservasi sumberdaya alam, 7) Penekanan laju deforestasi, 8) Pengendalian kerusakan lingkungan, 9) Penurunan pencemaran lingkungan, 10) Terpeliharanya kearifan lokal terhadap lingkungan.

4.2.8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi 2006 – 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 telah merumuskan

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan”.

2. Misi

1. Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradab berdasarkan Iman dan Taqwa;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
4. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan; serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan Sumatera;
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan menyenangkan.

3. Arah pembangunan jangka panjang

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang baik dan berkualitas
2. Mewujudkan pengembangan dan penerapan kebudayaan daerah

3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang maju dan mampu bersaing
6. Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Wisata
7. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan
8. Peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
9. Penataan kota dan pengaturan tata ruang wilayah
10. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan kota

4.2.9. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi

Dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030, dirumuskan beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bukittinggi, yaitu :

- a. Pembangunan Kota Bukittinggi berbasis kebencanaan;
- b. Pembangunan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara merata didasarkan pada kesesuaian fungsi pusat-pusat pelayanan, sebaran permukiman dan dukungan sistem transportasi;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana Kota Bukittinggi yang merata dan terpadu secara regional dan nasional;
- d. Peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan Kota Bukittinggi melalui kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat;
- f. Pengembangan sektor pariwisata alam dan pariwisata budaya Kota Bukittinggi agar memiliki peran yang strategis ditingkat regional, nasional dan internasional; dan
- g. Peningkatan fungsi dan kualitas perlindungan setempat dan cagar budaya di Kota Bukittinggi;
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Periode 2010 – 2015 adalah periode kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi 2006 – 2025. Pada periode pertama, 2006 – 2010, telah diletakkan dasar-dasar pembangunan untuk menuju cita-cita pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD dimaksud. Berangkat dari hasil capaian kinerja pembangunan periode 2006 – 2010, maka untuk kesinambungan pembangunan dan terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pada periode kedua RPJPD 2006 – 2025 ini, maka visi pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2010 – 2015 adalah :

“Masyarakat Bukittinggi Cerdas, Sehat Dan Berekonomi Mapan Dengan Dilandasi Nilai-Nilai Agama Dan Adat”

Makna pokok yang terkandung dari visi di atas, pada periode 2010 – 2015 Pemerintah Kota Bukittinggi akan mewujudkan :

1. Masyarakat Yang Cerdas
Kecerdasan adalah awal kesuksesan, yang akan mengeluarkan masyarakat dari belenggu kemiskinan, dan mampu bersaing dengan dunia global. Masyarakat Bukittinggi yang cerdas, adalah masyarakat yang berpendidikan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Masyarakat Yang Sehat
Masyarakat Bukittinggi yang sehat adalah masyarakat yang terbebas dari kesakitan serta memiliki status gizi yang baik.
3. Masyarakat Bukittinggi Yang Berekonomi Mapan
Masyarakat Bukittinggi yang berekonomi mapan adalah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak sesuai kebutuhan untuk mengikuti perkembangan dunia.
4. Nilai-nilai Agama dan Adat Harus Melandasi Perwujudan Masyarakat Yang Cerdas, Sehat dan Berekonomi Mapan. Nilai-nilai agama dan adat dengan filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dijadikan landasan dalam setiap proses pembangunan, sehingga lebih bermakna dan diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 4 misi yang akan dilakukan dan ingin dicapai yang mendasarinya kepada nilai-nilai agama dan adat. Misi tersebut yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*.
2. Meningkatkan mutu pendidikan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada semua level tingkatan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang layak, murah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang memenuhi standar kesehatan
4. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah (perdagangan dan jasa, pariwisata, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan)

5.2.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi diatas adalah :

1. Misi I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*.

Tujuan :

- 1) Berkurangnya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Jumlah kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, dengan target 0 (tidak ada kasus)
 - b. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Kewenangan/ Jabatan, dengan target 0 (tidak ada kasus)
 - c. Index Persepsi Korupsi Kota Bukittinggi, dengan target masuk Sepuluh Besar Terbaik
- 2) Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Index Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dengan target Sangat Memuaskan (5)
- 3) Tidak adanya kebijakan dan tindakan pemerintah yang bersifat diskriminatif terhadap seluruh masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Jumlah Gugatan Resmi yang terdaftar di lembaga Penegakan Hukum terhadap Kebijakan Pemerintah Kota, dengan target 0 (tidak ada gugatan)

Sasaran:

- 1) Peningkatan Kualitas Produk Hukum dan Pemahaman Masalah Hukum.
- 2) Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan.
- 3) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Auditor Inspektorat Daerah.
- 4) Peningkatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.
- 5) Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian.
- 6) Peningkatan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan Pegawai.
- 7) Peningkatan Kinerja Pegawai Daerah.
- 8) Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
- 10) Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah.
- 11) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Publik.

2. Misi II. Meningkatkan mutu pendidikan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada semua level tingkatan

Tujuan :

- 1) Terbukanya akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. APK SD/ SDLB/ MI/ Paket A, dengan target rata-rata 125%
 - b. APK SLTP/ SMPLB/ Paket B, dengan target rata-rata 145%
 - c. APK SLTA/ Paket C, dengan target rata-rata 135%
 - d. APM SD/ SDLB/ MI/ Paket A, dengan target rata-rata 110%
 - e. APM SLTP/ SMPLB/ Paket B, dengan target rata-rata 115%
 - f. APM SLTA/ Paket C, dengan target rata-rata 110%
 - g. Persentase Penduduk usia 15 - 44 th yang melek huruf, dengan target rata-rata 100%
 - h. Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke atas, dengan target 10 tahun
- 2) Menciptakan peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang berprestasi, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan sesuai dengan potensi yang dimiliki
Terbukanya akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase Lulusan SMK yang bekerja sesuai keahliannya, dengan target 60%
 - b. Tamatan SLTP melanjutkan pendidikan ke sekolah kejuruan, dengan target 40%

- c. Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Saint Tingkat Internasional pada setiap jenjang pendidikan, dengan target 1 (satu) perjenjang pendidikan
 - d. Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Saint Tingkat Nasional pada setiap jenjang pendidikan dengan target 2 (dua) perjenjang pendidikan
 - e. Persentase Kelulusan Tingkat SD/ MI, dengan target 100%
 - f. Persentase Kelulusan Tingkat SLTP, dengan target 100%
 - g. Persentase Kelulusan Tingkat SLTA, dengan target 100%
 - h. Peringkat Nasional Rata-rata Nilai Kelulusan Tingkat SD/MI, dengan target 10 besar
 - i. Peringkat Nasional Rata-rata Nilai Kelulusan Tingkat SLTP, dengan target 10 besar
 - j. Peringkat Nasional Rata-rata Nilai Kelulusan Tingkat SLTA, dengan target 10 besar
 - k. Persentase Lulusan SLTA yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri, dengan target 35%
- 3) Kecerdasan yang dihasilkan melalui sistem pendidikan yang ada harus dibarengi dengan kematangan emosi yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat minangkabau, dengan indikator sebagai berikut:
- a. Angka Kriminalitas Pelajar, dengan target 2
 - b. Angka Siswa Broken Home, dengan target 5
 - c. Angka Tawuran Pelajar, dengan target 2
 - d. Persentase siswa yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan 50%

Sasaran :

- 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah
- 2) Peningkatan Standar Isi Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan
- 3) Peningkatan Standar Proses Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan
- 4) Peningkatan Standar Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Peningkatan Standar Penilaian Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- 6) Peningkatan Muatan Aqidah dan Akhlaq dalam Proses Belajar Mengajar.
- 7) Peningkatan rasa empati siswa.
- 8) Peningkatan Pengelolaan Ekstra Kurikuler.

3. Misi III. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang layak, murah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat kesehatan serta menciptakan lingkungan yang memenuhi standar

Tujuan :

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang diukur dengan mortalitas, morbiditas dan status gizi, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, dengan target 9
 - b. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup, dengan target 3
 - c. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, dengan target 102
 - d. Angka harapan hidup waktu lahir, dengan target 70,1
 - e. Angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk, dengan target 0
 - f. Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +, dengan target 85
 - g. Prevalensi HIV (persentase kasus terhadap penduduk beresiko) dengan target 1
 - h. Angka "acute flaccid paralysis" (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000 anak, dengan target < 1
 - i. Angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) per 100.000 penduduk, dengan target 50
 - j. Persentase balita dengan gizi buruk, dengan target 2
 - k. Persentase kecamatan bebas rawan gizi, dengan target 100
- 2) Terciptanya Lingkungan Hidup yang Sehat, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase sumber air yang berada diatas standar baku mutu, dengan target 100%
 - b. Persentase air limbah yang berada di atas standar baku mutu, dengan target 100%
 - c. Index Pencemaran Udara, dengan target 0,1
 - d. Indeks Gangguan, dengan target 0,2

Sasaran:

- 1) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
- 2) Peningkatan pelayanan kesehatan
- 3) Peningkatan sumberdaya kesehatan.
- 4) Peningkatan manajemen kesehatan.
- 5) Terciptanya sanitasi lingkungan yang layak dan memadai.

- 6) Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat.
- 7) Terciptanya pemukiman yang sehat.
- 8) Terkelolanya limbah usaha/kegiatan/ industri sesuai dengan standar lingkungan.
- 9) Terpeliharanya lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam dan pencadangan sumber daya alam.

4. Misi IV. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah (perdagangan & jasa, pariwisata, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan)

Tujuan :

- 1) Berkembangnya Koperasi, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi, dengan target 2%
 - b. Persentase Jumlah Koperasi yang sehat, dengan target 100%
 - c. Persentase Peningkatan Modal Usaha Koperasi, dengan target 15%
 - d. Persentase Peningkatan Simpanan Anggota, dengan target 15%
 - e. Persentase Peningkatan Jumlah Anggota, dengan target 25%
- 2) Berkembangnya Usaha mikro kecil dan menengah, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase Peningkatan Jumlah UMKM, dengan target 2%
 - b. Persentase Peningkatan Produk UMKM berdasarkan jenis:
 - Kelompok Usaha pakaian, dengan target 2%
 - Kelompok Usaha makanan, dengan target 15%
 - Kelompok Usaha jasa, dengan target 25%
 - Kelompok Usaha lainnya, dengan target 10%
- 3) Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase pengurangan angka kemiskinan, dengan target 60%
 - b. Persentase pengurangan angka pengangguran, dengan target 50%
- 4) Kemajuan ekonomi yang diperoleh bukanlah melalui cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Kegiatan ekonomi masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat seperti; hiburan malam, rentenir, dll. Angka Kriminalitas Pelajar, dengan target 0

Sasaran :

- 1) Peningkatan Kinerja Kelembagaan Koperasi.
- 2) Peningkatan Pemahaman Pengurus Koperasi tentang Manajemen Koperasi.
- 3) Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kredit/ Pembiayaan Bank bagi Koperasi.
- 4) Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kredit/ Pembiayaan Bank bagi UMKM.
- 5) Pengembangan/ Perluasan Pasar Ekspor UMKM.
- 6) Pengembangan Sarana Pemasaran UMKM.
- 7) Pengembangan Desain Produk UMKM.
- 8) Peningkatan peluang berusaha bagi penduduk miskin.
- 9) Peningkatan peluang mengikuti pendidikan secara formal dan informal.
- 10) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.
- 11) Peningkatan jaminan sosial bagi penduduk miskin (fakir/ papa).
- 12) Peningkatan keterampilan ketenagakerjaan.
- 13) Meningkatnya akses peluang kerja dan pasar kerja.
- 14) Peningkatan akses seluruh masyarakat terhadap Lembaga ekonomi yang berbasis syaria'ah.
- 15) Tidak ada tempat usaha ekonomi masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat.

Tabel 5.1
Hubungan Hirarkhis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

VISI "Masyarakat Bukittinggi Cerdas, Sehat Dan Berekonomi Mapan Dengan Dilandasi Nilai-Nilai Agama Dan Adat"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good governance and clean government.	1. Berkurangnya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proses penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel 3. Tidak adanya kebijakan dan tindakan pemerintah yang bersifat diskriminatif terhadap seluruh masyarakat	1. Peningkatan Kualitas Produk Hukum dan Pemahaman Masalah Hukum. 2. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan. 3. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Auditor Inspektorat Daerah. 4. Peningkatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah. 5. Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian. 6. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan Pegawai.

MISI	TUJUAN	SASARAN
		7. Peningkatan Kinerja Pegawai Daerah. 8. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. 10. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah. 11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan mutu pendidikan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada semua level tingkatan pendidikan	1. Terbukanya akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat 2. Menciptakan peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang berprestasi, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan sesuai dengan potensi yang dimiliki 3. Kecerdasan yang dihasilkan melalui sistem pendidikan yang ada harus dibarengi dengan kematangan emosi yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat minangkabau	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah 2. Peningkatan Standar Isi Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Peningkatan Standar Proses Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan 4. Peningkatan Standar Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. 5. Peningkatan Standar Penilaian Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. 6. Peningkatan Muatan Aqidah dan Akhlaq dalam Proses Belajar Mengajar. 7. Peningkatan rasa empati siswa. 8. Peningkatan Pengelolaan Ekstra Kurikuler.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang layak, murah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang diukur dengan mortalitas, morbiditas dan status gizi 2. Terciptanya Lingkungan Hidup yang Sehat	1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. 2. Peningkatan pelayanan kesehatan 3. Peningkatan sumberdaya kesehatan. 4. Peningkatan manajemen kesehatan. 5. Terciptanya sanitasi lingkungan yang layak dan memadai. 6. Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat. 7. Terciptanya pemukiman yang sehat. 8. Terkelolanya limbah usaha/kegiatan/ industri sesuai dengan standar

MISI	TUJUAN	SASARAN
		lingkungan. 9. Terpeliharanya lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam dan pencadangan sumber daya alam.
4. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah (perdagangan dan jasa, pariwisata, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan)	1. Berkembangnya Koperasi 2. Berkembangnya Usaha mikro kecil dan menengah 3. Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi masyarakat 4. Kemajuan ekonomi yang diperoleh bukanlah melalui cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat	1. Peningkatan Kinerja Kelembagaan Koperasi. 2. Peningkatan Pemahaman Pengurus Koperasi tentang Manajemen Koperasi. 3. Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kredit/ Pembiayaan Bank bagi Koperasi. 4. Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kredit/ Pembiayaan Bank bagi UMKM. 5. Pengembangan/ Perluasan Pasar Ekspor UMKM. 6. Pengembangan Sarana Pemasaran UMKM. 7. Pengembangan Desain Produk UMKM. 8. Peningkatan peluang berusaha bagi penduduk miskin. 9. Peningkatan peluang mengikuti pendidikan secara formal dan informal. 10. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. 11. Peningkatan jaminan sosial bagi penduduk miskin (fakir/ papa). 12. Peningkatan keterampilan ketenagakerjaan. 13. Meningkatnya akses peluang kerja dan pasar kerja. 14. Peningkatan akses seluruh masyarakat terhadap Lembaga ekonomi yang berbasis syaria'ah. 15. Tidak ada tempat usaha ekonomi masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat.

Selanjutnya indikator tujuan dan indikator sasaran ditampilkan dalam matrik tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015, seperti terlihat berikut.

1. Penerapan ajaran agama dan adat pada setiap aspek kehidupan
Prioritas penerapan ajaran agama dan adat pada setiap aspek kehidupan diarahkan pada peningkatan pengamalan prinsip-prinsip agama dan adat pada setiap aspek kehidupan di dalam masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan terjaganya warisan nilai-nilai adat Minangkabau.
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik diarahkan dalam pengimplementasian prinsip-prinsip *good governance* and *clean government* dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan profesional.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan diarahkan kepada seluruh usia wajib belajar baik pendidikan negeri, swasta maupun luar biasa serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan pendidikan agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan pendidikan yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Bukittinggi.
4. Peningkatan pemerataan dan derajat kesehatan
Seluruh masyarakat dapat menikmati fasilitas kesehatan, pelayanan yang layak, murah terjangkau bagi semua lapisan masyarakat Kota Bukittinggi.
5. Penanggulangan Kemiskinan
Percepatan penanggulangan kemiskinan antara lain dilakukan melalui penguatan lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), peningkatan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan baik Nasional, Provinsi maupun Daerah.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Peningkatan kualitas lingkungan hidup pada saat ini sangatlah mendesak untuk menjadi perhatian dikarenakan kondisi saat ini kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dapat mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh – sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan (KUKM)
Pengembangan ekonomi kerakyatan (KUKM) Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, diarahkan untuk berkembangnya koperasi, Usaha Mikro Kecil &

Menengah (UMKM) sehingga tercipta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai – nilai agama dan adat.

8. Peningkatan kuantitas & kualitas infrastruktur

Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahun yang bertujuan untuk menunjang perekonomian rakyat.

Persandingan prioritas nasional, Provinsi Sumatera Barat dan kota Bukittinggi terlihat pada table berikut.

Tabel 5.2 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Bukittinggi

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROPINSI SUMATERA BARAT		PRIORITAS KOTA BUKITTINGGI	
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.	1	Pengamalan Agama dan ABS SBK dalam Kehidupan Masyarakat	1	Penerapan ajaran agama dan adat pada setiap aspek kehidupan (-- / 1)
2	Pendidikan	2	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	2	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik (1 – 2)
3	Kesehatan	3	Peningkatan pemerataan dan Kualitas pendidikan	3	Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan (2 – 3)
4	Penanggulangan Kemiskinan	4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	4	Peningkatan pemerataan dan derajat kesehatan (3 – 4)
5	Ketahanan Pangan	5	Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan	5	Penanggulangan Kemiskinan (4 – 8)
6	Infrastruktur	6	Pengembangan Industri Olahan dan Perdagangan	6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup (9 – 10)
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	7	Pengembangan Wisata Alam dan Budaya	7	Pengembangan ekonomi kerakyatan (KUKM) (7, - 5,6,7)
8	Energi	8	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	8	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur (6 – 9)
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	9	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat		
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	10	Mitigasi, Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup		
11	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi				

*) Nomor di belakang prioritas menunjukkan nomor prioritas Nasional dan Provinsi yang terkait dengan prioritas Kota.

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2015
MISI I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN								
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET							
						2011	2012	2013	2014	2015			
1	Berkurangnya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proses penyelenggaraan pemerintahan daerah	a	Jumlah kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani aparat penegak hukum	0	1	Peningkatan Kualitas Produk Hukum dan Pemahaman Masalah Hukum	a	Persentase Produk Hukum yang disusun sesuai Peraturan Perundang-undangan	20%	40%	60%	80%	100%
					b	Persentase Produk Hukum Daerah yang lolos evaluasi pemerintah tingkat atas		20%	40%	60%	80%	100%	
		b	Jumlah Kasus Penyalahgunaan Kewenangan/ Jabatan	0	2	Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan	a	Jumlah Kasus/ Temuan Hasil Pemeriksaan lembaga pengawasan internal dan eksternal yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
		c	Index Persepsi Korupsi Kota Bukittinggi	10 besar			b	Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan lembaga pengawasan internal dan eksternal	100%	100%	100%	100%	100%
					3	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Auditor Inspektorat Daerah	a	Rasio Auditor terhadap seluruh Program dan Kegiatan pada seluruh SKPD	1 : 145	1 : 140	1 : 130	1 : 115	1 : 100
							b	Persentase Auditor yang Bersertifikasi Nasional	75%	80%	85%	90%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN							
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET						
						2011	2012	2013	2014	2015		
2	Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel	a	Index Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Sangat Memuaskan (5)	1 Peningkatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	a	Persentase Struktur Kelembagaan Perangkat Daerah disusun berdasar Analisis Jabatan dan Beban Kerja	30%	70%	80%	100%	100%
						b	Persentase Ketersediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai Ketentuan	10%	40%	60%	80%	100%
					2 Peningkatan Kompetensi dan Relevansi SDM pada SKPD	a	Persentase pegawai yang direkrut dan ditempatkan sesuai formasi	20%	40%	60%	80%	100%
						b	Persentase Penempatan Pejabat Struktural/ Fungsional sesuai Kompetensi Jabatan	10%	25%	70%	80%	100%
					3 Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian	a	Persentase Administrasi Kepegawaian dikelola berbasis Informasi Teknologi	20%	40%	60%	80%	100%
					4 Peningkatan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan Pegawai	a	Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan sudah berdasarkan <i>Need Assesment Analysis</i>	5%	20%	40%	75%	100%
					5 Peningkatan Kinerja Pegawai Daerah	a	Persentase Pegawai yang Melanggar Aturan Disiplin Kepegawaian	20%	18%	15%	10%	5%
					6 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	b	Opini BPK terhadap Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN					
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET				
						2011	2012	2013	2014	2015
				7 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	a Persentase Elemen dan Pemangku Kepentingan dalam Masyarakat terkait yang terlibat dalam pembangunan	70%	75%	80%	85%	90%
					b Persentase Kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat	20%	25%	30%	40%	50%
3	Tidak adanya kebijakan dan tindakan pemerintah yang bersifat deskriminatif terhadap seluruh masyarakat	a Jumlah Gugatan Resmi yang terdaftar di lembaga Penegakan Hukum terhadap Kebijakan Pemerintah Kota	0	1 Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	a Persentase Kebijakan Pemerintah daerah disusun dan direview melibatkan Elemen dan Pemangku Kepentingan dalam Masyarakat	50%	55%	60%	65%	70%
				2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Publik	a Persentase Ketersediaan Standar Operating Procedure (SOP) Pelayanan Publik	50%	60%	70%	80%	100%
					b Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan Minimal/ Nasional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	10%	20%	40%	70%	100%

**MATRIK TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2015**
MISI II : Meningkatkan mutu pendidikan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada semua level tingkatan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN					
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET				
						2011	2012	2013	2014	2015
1	Terbukanya akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat	1 APK SD/ SDLB/ MI/ Paket A	100%	1 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	1 Persentase SD/ SDLB/ MI yang telah memiliki sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan	45%	48%	53%	57%	60%
		2 APK SLTP/ SMPLB/ Paket B	100%		2 Persentase SLTP/ SMPLB/ yang telah memiliki sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan	45%	50%	55%	60%	65%
		3 APK SLTA/ Paket C	100%		3 Persentase SLTA yang telah memiliki sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan	50%	55%	60%	65%	70%
		4 APM SD/ SDLB/ MI/ Paket A	100%		4 Persentase Paket A yang telah memiliki sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan	30%	40%	50%	60%	75%
		5 APM SLTP/ SMPLB/ Paket B	100%		5 Persentase Paket B yang telah memiliki sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan	30%	40%	50%	60%	75%
					Persentase Paket C yang telah memiliki sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan	40%	50%	60%	70%	85%
		6 APM SLTA/ Paket C	100%	2 Peningkatan Tenaga Pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan	1 Persentase SD/ SDLB/ MI yang telah memiliki Tenaga Pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan	57%	66%	75%	86%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN					
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET				
						2011	2012	2013	2014	2015
		7 Persentase Penduduk usia 15 - 44 th yang melek huruf	100%		2 Persentase SLTP/ SMPLB/ yang telah memiliki Tenaga Pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan	30%	40%	50%	60%	100%
		8 Rata-rata Lama sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	10 tahun		3 Persentase SLTA yang telah memiliki Tenaga Pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan	40%	50%	60%	80%	100%
					4 Persentase Paket A yang telah memiliki Tenaga Pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan	95%	100%	100%	100%	100%
					5 Persentase Paket B yang telah memiliki Tenaga Pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan	60%	70%	80%	90%	100%
					6 Persentase Paket C yang telah memiliki Tenaga Pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan	75%	80%	90%	95%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN					
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET				
						2011	2012	2013	2014	2015
2	Menciptakan peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang berprestasi, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.	1 Persentase Lulusan SMK yang bekerja sesuai keahliannya	60%	1 Peningkatan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah	a Persentase PAUD yang memiliki Sarana Parasarana sesuai Standar Pendidikan Usia Dini	60%	75%	85%	95%	100%
		2 Tamatan SLTP melanjutkan pendidikan ke sekolah kejuruan	40%		b Persentase Lembaga Pendidikan Informal yang memiliki Sarana Parasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan	50%	65%	75%	85%	100%
		3 Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Saint Tingkat Internasional pada setiap jenjang pendidikan	1		c Persentase PAUD yang memiliki Tenaga Pendidik sesuai Standar Pendidikan Usia Dini	75%	90%	100%	100%	100%
		4 Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Saint Tingkat Nasional pada setiap jenjang pendidikan	2		d Persentase Lembaga Pendidikan Informal yang memilikiTenaga Pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan	50%	50%	50%	50%	50%
		5 Persentase Kelulusan Tingkat SD/ MI	100%	2 Peningkatan Standar Isi Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	a Persentase SD/MI memenuhi standar isi sesuai Standar Nasional Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%
		6 Persentase Kelulusan Tingkat SLTP	100%		Persentase SLTP memenuhi standar isi sesuai Standar Nasional Pendidikan	40%	50%	60%	80%	100%
		7 Persentase Kelulusan Tingkat SLTA	100%		Persentase SLTA memenuhi standar isi sesuai Standar Nasional Pendidikan	50%	60%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN					
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET				
						2011	2012	2013	2014	2015
		8 Peringkat Nasional Rata-rata Nilai Kelulusan Tingkat SD/MI	50 besar	3 Peningkatan Standar Proses Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Persentase SD/MI memenuhi Standar Proses sesuai Standar Nasional Pendidikan	85%	86%	87%	88%	90%
		9 Peringkat Nasional Rata-rata Nilai Kelulusan Tingkat SLTP	50 besar		Persentase SLTP memenuhi Standar Proses sesuai Standar Nasional Pendidikan	40%	50%	60%	80%	100%
		¹⁰ Peringkat Nasional Rata-rata Nilai Kelulusan Tingkat SLTA	50 besar		Persentase SLTA memenuhi Standar Proses sesuai Standar Nasional Pendidikan	50%	60%	100%	100%	100%
		¹¹ Persentase Lulusan SLTA yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri	35%	4 Peningkatan Standar Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Persentase SD/MI memenuhi Standar Pengelolaan sesuai Standar Nasional Pendidikan	65%	70%	80%	90%	100%
					Persentase SLTP memenuhi Standar Pengelolaan sesuai Standar Nasional Pendidikan	80%	100%	100%	100%	100%
					Persentase SLTA memenuhi Standar Pengelolaan sesuai Standar Nasional Pendidikan	80%	90%	100%	100%	100%
				5 Peningkatan Standar Penilaian Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Persentase SD/MI memenuhi Standar Penilaian sesuai Standar Nasional Pendidikan	92%	94%	96%	98%	100%
					Persentase SLTP memenuhi Standar Penilaian sesuai Standar Nasional Pendidikan	50%	100%	100%	100%	100%
					Persentase SLTA memenuhi Standar Penilaian sesuai Standar Nasional Pendidikan	50%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN					
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET				
						2011	2012	2013	2014	2015
3	Kecerdasan yang dihasilkan melalui sistem pendidikan yang ada harus dibarengi dengan kematangan emosi yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat minangkabau	a Angka Kriminalitas Pelajar	2	1 Peningkatan Muatan Aqidah dan Akhlaq dalam Proses Belajar Mengajar	a Persentase kurikulum pendidikan yang sudah bermuatan akidah dan akhlak	40%	45%	50%	55%	60%
		b Angka Siswa Broken Home	5	2 Peningkatan rasa empati siswa	a Persentase siswa yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan	20%	25%	30%	40%	60%
		c Angka Tawuran Pelajar	2							
		d Persentase siswa yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan	50%	3 Peningkatan Pengelolaan Ekstra Kurikuler	a Persentase Siswa pada setiap Jenjang Pendidikan yang mengikuti Ekstra Kurikuler	80%	85%	90%	95%	100%

MISI III : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang layak, murah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang memenuhi standar

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN					
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET				
						2011	2012	2013	2014	2015
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang diukur dengan mortalitas, morbiditas dan status gizi	A. Mortalitas		1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	a. Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	60%	100%	125%	150%	200%
		1. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	9		b. Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	100%	125%	150%	200%	300%
		2. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup			c. Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	102		d. Persentase rumah sakit / puskesmas yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Angka harapan hidup waktu lahir	70,1		e. Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat	68,22%	78%	85%	90%	100%
		B. Morbiditas		2. Peningkatan pelayanan kesehatan	a. Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	90%	93%	96%	99%	100%
		1. Angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk	0		b. Persentase kelurahan yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI)	85%	90%	90%	90%	90%
		2. Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	85		c. Persentase kelurahan terkena kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Prevalensi HIV (persentase kasus terhadap penduduk beresiko)	1							

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN					
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET				
						2011	2012	2013	2014	2015
		4. Angka "acute flaccid paralysis" (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000 anak	< 1		d. Persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe	95%	96%	97%	98%	99%
					e. Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif	65%	70%	75%	80%	85%
		5. Angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) per 100.000 penduduk	50		f. Persentase murid SD/MI yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut	85%	90%	90%	100%	100%
					g. Persentase pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan kerja	50%	60%	70%	80%	100%
					h. Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
				3. Peningkatan sumberdaya kesehatan						
		C. Status Gizi			a. Rasio dokter per 100.000 penduduk	77	77	77	77	77
		1. Persentase balita dengan gizi buruk	2		b. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	65	75	80	90	100
		2. Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100		c. Rasio dokter keluarga per 1.000 keluarga	17	30	50	75	100
					d. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	15	30	50	75	100
					e. Rasio apoteker per 100.000 penduduk	23	23	23	23	23
					f. Rasio bidan per 100.000 penduduk	158	158	158	158	158
					g. Rasio perawat per 100.000 penduduk	667	667	667	667	667
					h. Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk	23	30	50	75	100
					i. Rasio ahli sanitasi per 100.000 penduduk	15	30	50	75	100
					j. Rasio ahli kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk	60	60	60	60	60

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN					
		URAIAN	TARGET							
			2011		2012	2013	2014	2015		
					k. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
					l. Rata-rata persentase anggaran kesehatan dalam APBD Kota	7.5	10	11	12	15
					m. Persentase Alokasi anggaran belanja langsung kesehatan	7%	7,5%	8%	8,5%	9%
				4. Peningkatan manajemen kesehatan	a. Dokumen Sistem Kesehatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
					b. Contingency Plan untuk masalah kesehatan akibat bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
					c. Profil kesehatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Terciptanya Lingkungan Hidup yang Sehat	1. Persentase sumber air yang berada diatas standar baku mutu	100%	1. Terciptanya sanitasi lingkungan yang layak dan memadai	a. Jumlah wilayah/ kawasan yang mengalami genangan air	8 titik	4 titik	0 titik	0 titik	0 titik
	2. Persentase air limbah yang berada di atas standar baku mutu	30%	b. Persentase rumah tangga dan jenis usaha yang telah menerapkan 3R		20%	50%	60%	70%	75%	
	3. Index Pencemaran Udara	0,1	c. Persentase jumlah sampah yang terangkut		65%	85%	100%	100%	100%	
	4. Indeks Gangguan	0,2	d. Persentase jumlah sampah yang telah diproses di tempat pemrosesan akhir sampah		16%	50%	60%	70%	75%	

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN					
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET				
						2011	2012	2013	2014	2015
					e. Persentase rumah tangga yang telah memiliki jamban dengan tangki septik dan bidang resapan sesuai standar SNI	15%	30%	40%	50%	60%
			f. Persentase rumah tangga yang menggunakan sistem pengelolaan air limbah rumah tangga secara komunal		10%	20%	30%	40%	50%	
			g. Persentase rumah tangga yang telah mengelola lumpur tinja melalui IPLT		5%	10%	15%	40%	60%	
			h. Persentase rumah tangga yang berperilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)		20%	15%	10%	5%	0%	
		2. Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat	a. Persentase rumah tangga yang telah mendapatkan layanan/menggunakan air bersih	60%	65%	70%	80%	85%		
			b. Persentase penduduk perokok pasif	45%	40%	35%	30%	25%		
			c. Jumlah kawasan bebas asap rokok / dilarang merokok	10%	20%	30%	40%	50%		
		3. Terciptanya pemukiman yang sehat	a. Persentase rumah tangga yang melakukan pemberantasan jentik seminggu sekali	60%	70%	80%	90%	100%		

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN					
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET				
						2011	2012	2013	2014	2015
					b. Persentase rumah yang tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gel tsunami, daerah gempa, dll	80%	85%	90%	95%	100%
					c. Persentase perumahan yang memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan	5%	10%	15%	20%	25%
				4. Terkelolanya limbah usaha/kegiatan/ industri sesuai dengan standar lingkungan	a. Persentase industri yang telah memiliki dokumen Amdal/UPL/UKL	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase rumah sakit/klinik/sarana kesehatan yang telah memiliki IPAL	97%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase hotel/restoran yang telah memiliki IPAL	40%	50%	60%	80%	100%
					d. Persentase industri yang telah memilik IPAL	0%	5%	10%	15%	30%
					e. Persentase industri yang menghasilkan limbah B3 yang telah mengolahnya sesuai standar lingkungan	0%	5%	10%	15%	30%
				5. Terpeliharanya lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam dan pencadangan sumber daya alam	a. Persentase luas wilayah konservasi sumber daya alam	10%	15%	20%	25%	30%
					b. Persentase luas taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	3,78%	4,16%	4,57%	5,03%	5,54%

**MATRIK TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2015**

MISI IV : Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah (perdagangan & jasa, pariwisata, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan)

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN								
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET							
						2011	2012	2013	2014	2015			
1	Berkembangnya Koperasi	a	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi	2%	1	Peningkatan Kinerja Kelembagaan Koperasi	a	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	80%	85%	90%	95%	100%
		b	Persentase Jumlah Koperasi yang sehat	100%			b	Persentase Jumlah Koperasi Aktif yang melakukan RAT	60%	70%	80%	90%	100%
		c	Persentase Peningkatan Modal Usaha Koperasi	15%			c	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	10%	11%	12%	13%	15%
		d	Persentase Peningkatan Simpanan Anggota	15%	2	Peningkatan Pemahaman Pengurus Koperasi tentang Manajemen Koperasi	a	Persentase Pengurus yang telah mengikuti Pelatihan tentang Manajemen Koperasi	50%	60%	70%	80%	90%
		e	Persentase Peningkatan Jumlah Anggota	25%	3	Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kredit/ Pembiayaan Bank bagi Koperasi	a	Persentase Koperasi yang dapat mengakses Kredit/ Pembiayaan Bank melalui <i>Linkage</i>	50%	60%	70%	80%	90%
							b	Persentase Koperasi yang melakukan Kerjasama Pembiayaan dengan Bank	50%	60%	70%	80%	90%
2	Berkembangnya Usaha mikro kecil dan menengah	a	Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	2%	1	Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kredit/ Pembiayaan Bank bagi UMKM	a	Persentase UMKM yang telah melakukan Kerjasama Pembiayaan yang melibatkan Bank dan Lembaga Keuangan/ Pembiayaan lainnya	70%	75%	80%	85%	90%

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN					
		URAIAN	TARGET		URAIAN	TARGET				
						2011	2012	2013	2014	2015
		b Persentase Peningkatan Produk UMKM berdasarkan jenis:		2 Pengembangan/ Perluasan Pasar Ekspor UMKM	a Persentase UMKM yang telah melakukan Ekspor	10%	12%	15%	20%	25%
		- Kelompok Usaha pakaian	10%	3 Pengembangan Sarana Pemasaran UMKM	a Jumlah sarana pemasaran UMKM	4 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	7 lokasi	8 lokasi
		- Kelompok Usaha makanan	15%	4 Pengembangan Desain Produk UMKM	a Persentase UMKM yang telah mendapatkan sentuhan industri kreatif	60%	65%	70%	80%	90%
		- Kelompok Usaha jasa	25%		b Persentase Peningkatan Market Share usaha UMKM	1,5%	2%	2,5%	3%	4%
		- Kelompok Usaha lainnya	10%							
3	Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi masyarakat	a Persentase pengurangan angka kemiskinan	60%	1 Peningkatan peluang berusaha bagi penduduk miskin	a Persentase Peningkatan Jumlah lapangan usaha	5%	7%	10%	13%	16%
					b Persentase Pemberian Subsidi	2%	2,5%	3%	4%	5%
				2 Peningkatan peluang mengikuti pendidikan secara formal dan informal	a Persentase Penduduk Miskin yang menerima Beasiswa Pendidikan	2,7%	3%	3,5%	4%	5%
				3 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	b Persentase Penduduk Miskin yang mendapat Jaminan Sosial Kesehatan	85%	100%	100%	100%	100%
				4 Peningkatan jaminan sosial bagi penduduk miskin (fakir/ papa)	a Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh Jaminan Sosial					
					- Bantuan Langsung Tunai	85%	100%	100%	100%	100%
					- Asuransi/ Jaminan Kesehatan	85%	100%	100%	100%	100%
					b Persentase Penduduk Miskin (fakir) yang ditampung di Panti Sosial	2%	4%	6%	8%	10%

		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN
--	--	--------------------------	--	---------------------------

NO	TUJUAN	URAIAN	TARGET	SASARAN	URAIAN	TARGET				
						2011	2012	2013	2014	2015
		b Persentase pengurangan angka pengangguran	50%	1 Peningkatan keterampilan ketenagakerjaan	a Persentase work shop/ pelatihan bagi tenagakerja	70%	75%	80%	90%	90%
					b Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	0	0	1 lbg	1 lbg	1 lbg
				2 Meningkatnya akses peluang kerja dan pasar kerja	a Persentase penyediaan lapangan kerja baru	5%	7%	10%	13%	16%
						2011	2012	2013	2014	2015
4	Kemajuan ekonomi yang diperoleh bukanlah melalui cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat	a Jumlah Kegiatan ekonomi masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat seperti; hiburan malam, rentenir, dll.	0	1 Peningkatan akses seluruh masyarakat terhadap Lembaga ekonomi yang berbasis syari'ah	a Jumlah Perbankan Syari'ah	8 Bank	9 Bank	10 Bank	11 Bank	12 Bank
					b Jumlah Lembaga ekonomi dan Keuangan Mikro Berbasis Syari'ah	2 lbg	3 lbg	5 lbg	8 lbg	10 lbg
				2 Tidak ada tempat usaha ekonomi masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat	a Jumlah tempat usaha masyarakat yang menyediakan layanan hiburan pada malam hari	16 tempat	10 tempat	5 tempat	3 tempat	0 tempat

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berangkat dari analisis permasalahan dan isu-isu strategis di atas, maka perlu disusun strategi pembangunan kota untuk lima tahun kedepan secara efektif dan efisien, sehingga betul-betul dapat mengantarkan untuk pencapaian visi misi dan tujuan yang telah dirumuskan. Strategi untuk masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi I : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip *Good Governance and Clean Government*.

Pencapaian misi tersebut dilakukan dengan strategi berikut:

- 1) Memperkuat kepemimpinan kelembagaan pemerintah kota mulai dari *top manager* sampai *low manager*
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, baik dari segi teknis maupun mental.
- 3) Menata kelembagaan organisasi pemerintah kota secara efektif dan efisien dan berorientasi kepada visi.
- 4) Meningkatkan pengawasan internal dan bekerjasama dengan lembaga pengawas eksternal untuk selalu mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundangan yang ada.
- 5) Mengintegrasikan dan mensinkronkan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- 6) Kajian keagamaan dan adat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam setiap proses pengambilan kebijakan

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi II : Meningkatkan mutu pendidikan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada semua level tingkatan pendidikan

Pencapaian misi tersebut dilakukan dengan strategi berikut:

- 1) Melengkapi sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
- 2) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar (guru), baik melalui pendidikan formal maupun diklat teknis
- 3) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas manajemen sekolah

- 4) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.
- 5) Menjalin kerjasama antar daerah dan dengan luar negeri untuk sharing informasi dan pengalaman terutama dalam hal kurikulum dan manajemen sekolah.
- 6) Menjadikan kegiatan keagamaan serta adat dan budaya dalam kegiatan ekstrakurikuler di setiap sekolah.

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi III : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang layak, murah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat

Pencapaian misi tersebut dilakukan dengan strategi berikut:

- 1) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendirikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pusat Kesehatan Kelurahan (Puskeskel).
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan (tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) sesuai dengan kebutuhan Kota Bukittinggi
- 3) Meningkatkan manajemen kesehatan mulai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi langsung terhadap urusan kesehatan serta unit pelaksana teknis yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Puskesmas, Pustu dan Puskeskel).
- 4) Meningkatkan pelayanan pada unit pelaksana teknis dengan melengkapi sarana prasarana yang memenuhi standar.
- 5) Menciptakan sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan melalui Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang telah ditetapkan.

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV : Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah (perdagangan & jasa, pariwisata, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan)

Pencapaian misi tersebut dilakukan dengan strategi berikut:

- 1) Membina industri mikro, kecil dan menengah yang ada sehingga dapat memproduksi barang-barang yang mempunyai daya saing global melalui pelatihan-pelatihan serta menjalin kerjasama dengan daerah lain dan bahkan dengan luar negeri.

- 2) Menata dan mengembangkan ketiga pasar yang ada menjadi pasar tradisional yang modern.
- 3) Membina para pedagang sehingga dapat melayani para tamu yang datang dengan konsep sapta pesona.
- 4) Menata infrastruktur jalan dan transportasi yang disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada.
- 5) Membenahi dan menata objek wisata yang ada (wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya dan wisata belanja/kuliner) sehingga menimbulkan kenyamanan bagi para pengunjung serta meningkatkan kualitas dan kuantitas atraksi-atraksi adat dan budaya.
- 6) Menciptakan arena permainan dan atraksi yang menarik, tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk orang dewasa.
- 7) Mengembangkan Bukittinggi sebagai Kota Konferensi dan Konvensi.
- 8) Menjadikan pusat Kota Bukittinggi (Jam Gadang, Pasar Atas dan sekitarnya) sebagai daerah pedestrian (pejalan kaki).
- 9) Mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi untuk mempromosikan pariwisata Bukittinggi serta meningkatkan kualitas dan kualitas pameran dan atraksi budaya, baik yang dilaksanakan di dalam daerah, luar daerah bahkan luar negeri.
- 10) Menciptakan kondisi yang nyaman, aman dan tentram di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan.
- 11) Memfasilitasi pengembangan lembaga pendidikan sesuai kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah
- 12) Menciptakan kondisi yang nyaman, aman dan tentram di lingkungan rumah sakit (pelayanan kesehatan)
- 13) Memfasilitasi pengembangan rumah sakit sesuai kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah
- 14) Meningkatkan intensifikasi pemanfaatan lahan produktif dengan komoditi unggulan dalam mendukung potensi unggulan daerah.
- 15) Meningkatkan usaha tani secara intensif untuk mendukung peningkatan produksi dan pendapatan petani.
- 16) Menerapkan teknologi dan inovasi di bidang pertanian melalui penyuluhan guna meningkatkan kemandirian masyarakat petani.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Selama tahun 2010 – 2015, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab V dokumen ini, Pemerintah Kota Bukittinggi akan melaksanakan kebijakan daerah dengan program, indikator kinerja program yang dirumuskan berdasarkan pengelompokan pencapaian misi daerah.

1. Misi I Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government

Mewujudkan misi ini dengan pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Produk hukum yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Penyimpangan/ Pelanggaran Aturan oleh Aparatur/ Kebijakan Kepala Daerah yang ditangani penegak hukum
3. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Aparatur Pengawasan/ Auditor Daerah yang Profesional di Bidang Pengawasan
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan
5. Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi dan tata laksana kelembagaan
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Sarana dan Prasarana Aparatur yang telah disediakan sesuai aturan

7. Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Administrasi Pembangunan yang diterbitkan sesuai aturan
8. Program Pendidikan Kedinasan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat fungsional
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang Memiliki Kemampuan Teknis dan Manejerial sesuai Bidang Tugasnya
10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Pengelolaan dan Pengembangan Aparatur sudah sesuai ketentuan
11. Program Peningkatan Kinerja Dan Kesejahteraan PNS
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Adanya Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai diikuti Reward and Punishment
12. Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Pegawai Pensiun/ Purna Tugas terfasilitasi sesuai ketentuan
13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Pegawai mematuhi aturan kedisiplinan kepegawaian
14. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Dokumen Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keuangan diterbitkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah
15. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kota
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Seluruh SKPD telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan
16. Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan daerah yang terlatih

17. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD telah disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan
18. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan melibatkan masyarakat/ pemangku kepentingan terkait
19. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Persentase kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam pembangunan
20. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang direview sesuai perkembangan dan ketentuan perundang-undangan
21. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Jumlah SOP Pelayanan Publik dan SPM Urusan Pemerintahan
22. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Persentase Pelayanan Perizinan Terpadu yang diterbitkan sesuai standar yang ditetapkan
23. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Persentase Fakir Miskin dan PMKS yang mendapatkan Jaminan Sosial
24. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Persentase Kelembagaan Sosial yang Mandiri

2. Misi II Meningkatkan mutu pendidikan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada semua level tingkatan

Mewujudkan misi ini dengan pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah :
 - a. Anak usia 7 - 15 tahun menamatkan di SD/MI dan SLTP

- b. Kurikulum pendidikan dasar 9 tahun sudah sesuai SNP
 - c. Proses Pembelajaran pada pendidikan dasar 9 tahun sudah sesuai SNP
 - d. Pendidikan Dasar 9 tahun telah menerapkan kurikulum pendidikan berbasis aqidah
 - e. Pendidikan Dasar 9 tahun telah mengarahkan siswa untuk memiliki rasa empati terhadap sesama
 - f. Anak yang mengikuti Pendidikan di Pendidikan Dasar 9 Tahun telah mengikuti Kegiatan Ekstra Kurikuler
2. Program Pendidikan Menengah
- Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah :
- a. Anak usia 16 - 18 tahun menamatkan di SLTA
 - b. Kurikulum Pendidikan Menengah sudah sesuai SNP
 - c. Proses Pembelajaran pada Pendidikan Menengah sudah sesuai SNP
 - d. Pendidikan menengah telah menerapkan kurikulum pendidikan berbasis aqidah
 - e. Pendidikan Menengah telah mengarahkan siswa untuk memiliki rasa empati terhadap sesama
 - f. Anak yang mengikuti Pendidikan Menengah telah mengikuti Kegiatan Ekstra Kurikuler
3. Program Pendidikan Non Formal
- Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah :
- a. Anak yang tidak menyelesaikan pendidikan di jenjang non formal dapat menyelesaikan di pendidikan non formal
 - b. Pendidikan non formal telah menerapkan kurikulum pendidikan berbasis aqidah
 - c. Pendidikan Non Formal telah mengarahkan siswa untuk memiliki rasa empati terhadap sesama
 - d. Anak yang mengikuti Pendidikan Non Formal telah mengikuti Kegiatan Ekstra Kurikuler
4. Program Pendidikan Luar Biasa
- Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah :
- a. Anak yang berkebutuhan khusus dapat menamatkan pendidikan luar biasa
 - b. Pendidikan luar biasa telah menerapkan kurikulum pendidikan berbasis aqidah

- c. Pendidikan Luar Biasa telah mengarahkan siswa untuk memiliki rasa empati terhadap sesama
- d. Anak yang mengikuti Pendidikan Luar Biasa telah mengikuti Kegiatan Ekstra Kurikuler
- 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah
 - a. Tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualifikasi sesuai SNP
 - b. Tenaga pendidik telah melaksanakan penilaian siswa pada seluruh jenjang pendidikan sesuai SNP
- 6. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah :
 - a. Anak Usia 3 - 6 tahun menamatkan PAUD
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini telah menerapkan kurikulum pendidikan berbasis aqidah
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini telah mengarahkan siswa untuk memiliki rasa empati terhadap sesama.
- 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan sudah dikelola sesuai SNP

3. Misi III Meningkatkan pelayanan kesehatan yang layak, murah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat kesehatan serta menciptakan lingkungan yang memenuhi standar

Mewujudkan misi ini dengan pelaksanaan program sebagai berikut :

- 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Kebutuhan obat dan Perbekalan Kesehatan masyarakat telah terpenuhi
- 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Lembaga Pelayanan Kesehatan Masyarakat telah memberikan pelayanan dasar dan spesialis tertentu sesuai standar
- 3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Penduduk miskin mendapatkan layanan kesehatan tertentu

4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Ibu dan anak selamat dalam persalinan
5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Puskesmas dan Pustu telah memiliki sarana prasarana sesuai standar
6. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Masyarakat mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
7. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Obat dan makanan yang dikonsumsi tersedia, terjangkau dan aman secara medis
8. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Obat Tradisional yang memenuhi persyaratan medis dikonsumsi oleh masyarakat
9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Masyarakat telah terpenuhi kebutuhan gizinya sesuai standar
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Penyakit Menular dapat ditanggulangi dalam waktu tertentu sesuai jenis penyakit.
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Anak Balita memiliki derajat kesehatan sesuai pertambahan umur
12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Lansia memiliki derajat kesehatan sesuai kondisi medis
13. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Makanan yang dikonsumsi masyarakat telah memenuhi standar kesehatan
14. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Remaja yang memiliki kesehatan reproduksi sesuai standar

15. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Tenaga medis dan para medis memiliki kemampuan sesuai kualifikasi nasional
16. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya telah dilaksanakan sesuai standar nasional
17. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Pemerintah telah memiliki kesepakatan dan kerjasama pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan lembaga pelayanan kesehatan pemerintah tingkat atas dan swasta
18. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Informasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh Pemerintah diketahui oleh masyarakat
19. Program Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Pelayanan Kesehatan telah menggunakan IT Kesehatan
20. Program Pengendalian Banjir
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Kawasan Bebas Banjir
21. Program Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Drainase/ gorong-gorong
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Jaringan saluran drainase mampu menampung debit air
22. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Trotoar
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Jaringan Jalan dan trotoar tersedia sesuai kebutuhan dan kelasnya
23. Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Bangunan Sosial Kemasyarakatan dan Fasilitas Umum
24. Program Perencanaan Tata Ruang
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Tata Ruang Kota Mampu Mengatasi Permasalahan lingkungan kota
25. Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Wilayah strategis kota yang dikembangkan sesuai kebutuhan pembangunan

26. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan tempat umum yang dikelola dengan prinsip 3 R
27. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Kawasan lingkungan sehat yang berakar di masyarakat
28. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Kawasan Perumahan yang telah memenuhi standar kesehatan lingkungan
29. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Kawasan yang memiliki sambungan air minum yang lancar
30. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Kawasan yang memiliki akses transportasi lancar
31. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Kawasan yang telah memiliki pengolahan air limbah
32. Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Kawasan DAS yang dikonservasi
33. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Kawasan yang memiliki kualitas lingkungan hidup sesuai standar
34. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Masyarakat mengetahui kondisi lingkungan hidup dan SDA
35. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Berkurangnya polusi udara, air tanah dan lingkungan lainnya
36. Program Pengelolaan RTH
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Kawasan RTH yang dikelola sesuai standar

4. Misi IV : Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah (perdagangan & jasa, pariwisata, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan)

Mewujudkan misi ini dengan pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program Penciptaan Iklim yang Kondusif bagi KUMKM
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah UMKM yang dinaungi oleh Koperasi
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Koperasi yang aktif dan berbadan hukum
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Koperasi yang memiliki jaringan permodalan dan pemasaran
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan
5. Program Pengembangan Kompetitif KUMKM
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah UMKM yang mengekspor produksinya
6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Sarana Pemasaran UMKM yang memiliki sistem pengawasan dan Perlindungan Konsumen
7. Program Penciptaan UKM yang kondusif
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah UMKM yang memiliki jaringan pemasaran nasional dan internasional
8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Objek Wisata yang dapat Menunjang Pertumbuhan UMKM
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Pengunjung yang datang ke Bukittinggi nyaman dalam layanan transportasi
10. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Pelanggaran/ Kecelakaan Lalu lintas

11. Program Pengembangan komunikasi informasi dan media masa
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Potensi Unggulan Kota Terinformasikan secara luas (nasional dan internasional)
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah UMKM yang memiliki spesifikasi dan kualitas mutu
13. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Lapangan kerja yang tersedia bagi penduduk miskin
14. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Pendidikan
15. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Penduduk miskin mendapatkan layanan kesehatan tertentu
16. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Persentase Fakir Miskin dan PMKS yang mendapatkan Jaminan Sosial
17. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Lembaga tenaga kerja yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja
18. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Tenaga kerja yang memiliki keterampilan kerja sebelum masuk ke dunia kerja
19. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Peluang kerja yang disediakan sesuai kebutuhan pencari kerja

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah diuraikan sebelumnya, disusun program prioritas pembangunan beserta kerangka pendanaan yang diharapkan dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan dari misi-misi yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD 2010 -2015.

Dalam pelaksanaannya program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan SKPD terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SKPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab SKPD dan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi yang telah ditetapkan.

Program yang disertai dengan indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan pendanaan tersebut dikelompokkan ke dalam 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Urusan wajib adalah: (1).Pendidikan, (2).Kesehatan, (3).Pekerjaan Umum, (4).Perumahan Rakyat, (5).Penataan Ruang, (6).Perencanaan Pembangunan, (7).Perhubungan, (8).Lingkungan Hidup, (9).Pertanahan, (10).Kependudukan dan Catatan Sipil, (11).Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (12).Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, (13).Sosial, (14).Ketenagakerjaan, (15).Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, (16).Penanaman Modal, (17).Kebudayaan, (18).Kepemudaan dan Olah Raga, (19).Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, (20).Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, (21).Ketahanan Pangan, (22).Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (23).Statistik, (24).Kearsipan, (25).Komunikasi dan Informatika, (26).Perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan adalah: (1).Pertanian, (2). Kehutanan (3).Pariwisata, (4). Kelautan dan Perikanan, (5).Perdagangan, dan (6).Perindustrian.

Untuk lebih lengkap mengenai indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KOTA BUKITTINGGI

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th. 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung jawab		
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
PENDIDIKAN																				
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Anak usia 7 - 15 tahun menamatkan di SD/MI dan SLTP	%		95.00%	19,973,825,000	95.00%	20,972,516,250	96.00%	22,021,142,063	98.00%	23,122,199,166	100.00%	24,278,309,124	100.00%	110,367,991,602.031	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Menengah	Anak usia 16 - 18 tahun menamatkan di SLTA	%		90.00%	12,578,680,000	92.00%	13,207,614,000	94.00%	13,867,994,700	96.00%	14,561,394,435	100.00%	15,289,464,157	100.00%	69,505,147,292	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Non Formal	Anak yang tidak menyelesaikan pendidikan di jenjang non formal dapat menyelesaikan di pendidikan non formal	%		90.00%	256,612,100	92.00%	269,442,705	94.00%	282,914,840	97.00%	297,060,582	100.00%	311,913,611	100.00%	1,417,943,838	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Luar Biasa	Anak yang berkebutuhan khusus dapat menamatkan pendidikan luar biasa	%		90.00%	250,000,000	92.00%	262,500,000	94.00%	275,625,000	97.00%	289,406,250	100.00%	303,876,563	100.00%	1,381,407,813	DISDIKPORA
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tenaga pendidikdan kependidikan yang memiliki kualifikasi sesuai SNP	%		80.00%	850,000,000	90.00%	892,500,000	100.00%	937,125,000	100.00%	983,981,250	100.00%	1,033,180,313	100.00%	4,696,786,563	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Anak Usia 3 -6 Tahun menamatkan PAUD	%		100.00%	750,000,000	100.00%	787,500,000	100.00%	826,875,000	100.00%	868,218,750	100.00%	911,629,688	100.00%	4,144,223,438	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Dasar 9 Tahun	Kurikulum Pendidikan Dasar 9 Tahun sudah sesuai SNP	%		90.00%	800,000,000	93.00%	840,000,000	96.00%	882,000,000	98.00%	926,100,000	100.00%	972,405,000	100.00%	4,420,505,000	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Menengah	Kurikulum Pendidikan Menengah sudah sesuai SNP	%		90.00%	750,000,000	93.00%	787,500,000	96.00%	826,875,000	98.00%	868,218,750	100.00%	911,629,688	100.00%	4,144,223,438	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Dasar 9 Tahun	Proses Pembelajaran pada Pendidikan Dasar 9 Tahun sudah sesuai SNP	%		90.00%	650,000,000	93.00%	682,500,000	96.00%	716,625,000	98.00%	752,456,250	100.00%	790,079,063	100.00%	3,591,660,313	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Menengah	Proses Pembelajaran pada Pendidikan Menengah sudah sesuai SNP	%		90.00%	750,000,000	93.00%	787,500,000	96.00%	826,875,000	98.00%	868,218,750	100.00%	911,629,688	100.00%	4,144,223,438	DISDIKPORA
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan sudah dikelola sesuai SNP	%		90.00%	550,000,000	93.00%	577,500,000	96.00%	606,375,000	98.00%	636,693,750	100.00%	868,528,438	100.00%	3,239,097,188	DISDIKPORA
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tenaga pendidik telah melaksanakan penilaian siswa pada seluruh jenjang pendidikan sesuai SNP	%		90.00%	525,000,000	93.00%	551,250,000	96.00%	578,812,500	98.00%	607,753,125	100.00%	638,140,781	100.00%	2,900,956,406	DISDIKPORA

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th. 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung jawab	
								2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Program Pendidkan Dasar 9 Tahun	Pendidikan dasar 9 tahun telah menerapkan kurukulum berbasis aqidah	%		95.00%	85,000,000	95.00%	89,250,000	96.00%	93,712,500	98.00%	98,398,125	100.00%	103,318,031	100.00%	469,678,656	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Menengah	Pendidikan menengah telah menerapkan kurikulum pendidikan berbasis aqidah	%		90.00%	75,000,000	92.00%	78,750,000	94.00%	82,687,500	96.00%	66,821,875	100.00%	91,162,969	100.00%	394,422,344	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan non formal telah menerapkan kurukulum pendidikan berbasis aqidah	%		90.00%	45,000,000	92.00%	47,250,000	94.00%	49,612,500	97.00%	52,093,125	100.00%	54,697,781	100.00%	248,653,406	DISDIKPORA
				Program Pendidkan Luar Blasa	Pendidikan luar biasa telah menerapkan kurikulum pendidikan berbasis aqidah	%		90.00%	40,000,000	92.00%	42,000,000	94.00%	44,100,000	97.00%	46,305,000	100.00%	48,620,250	100.00%	221,025,250	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan anak usia dini telah menerapkan kurikulum pendidikan berbasis aqidah	%		90.00%	30,000,000	92.00%	31,500,000	94.00%	33,075,000	97.00%	34,728,750	100.00%	36,465,188	100.00%	165,768,938	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pendidikan dasar 9 tahun telah mengarahkan siswa untuk memiliki rasa empati terhadap sesama	%		95.00%	75,000,000	95.00%	78,750,000	96.00%	82,687,500	98.00%	86,821,875	100.00%	91,162,969	100.00%	414,422,344	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Menengah	Pendidikan menengah telah mengarahkan siswa untuk memiliki rasa empati terhadap sesama	%		90.00%	80,000,000	92.00%	84,000,000	94.00%	88,200,000	96.00%	92,610,000	100.00%	97,240,500	100.00%	442,050,500	DISDIKPORA
				Program Pendidkan Non Formal	Pendidikan Non Formal telah mengarahkan siswa untuk memiliki rasa empati terhadap sesama	%		90.00%	80,000,000	92.00%	84,000,000	94.00%	88,200,000	96.00%	92,610,000	100.00%	97,240,500	100.00%	442,050,500	DISDIKPORA
				Program Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Luar Biasa telah mengarahkan siswa untuk memiliki rasa empati terhadap sesama	%		90.00%	37,500,000	92.00%	39,375,000	94.00%	41,343,750	97.00%	43,410,938	100.00%	45,581,484	100.00%	207,211,172	DISDIKPORA
				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Lembaga kemasyarakatan bidang keagamaan dan adat yang aktif dalam pembinaan masyarakat sesuai bidangnya	%		50.00%	400,000,000	60.00%	420,000,000	70.00%	441,000,000	80.00%	463,050,000	85.00%	486,202,500	85.00%	2,210,252,500	DISDIKPORA
				Program Pengembangan Nilai Budaya	Aktivitas kebudayaan yang lestari di masyarakat	%		50.00%	500,000,000	60.00%	525,000,000	70.00%	551,250,000	80.00%	578,812,500	85.00%	607,753,125	85.00%	2,762,815,625	DISDIKPORA

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th. 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
								2011		2012		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Lembaga Pengembangan Budaya yang aktif di masyarakat	%		50.00%	150,000,000	60.00%	157,500,000	70.00%	165,375,000	80.00%	173,643,750	85.00%	182,325,938	85.00%	828,844,688	DISDIKPORA
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Temu aktivitas kebudayaan dalam perkuatan kebudayaan daerah	%		50.00%	200,000,000	60.00%	210,000,000	70.00%	220,500,000	80.00%	231,525,000	85.00%	243,101,250	85.00%	1,105,126,250	DISDIKPORA
				Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Tindak Kriminal	Kasus Kriminal yang terjadi di masyarakat	%		10.00%	600,000,000	8.00%	630,000,000	6.00%	661,500,000	4.00%	694,575,000	2.00%	729,303,750	2.00%	3,315,378,750	DISDIKPORA
KESEHATAN																				
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kebutuhan obat dan Perbekalan Kesehatan masyarakat telah terpenuhi	%		100.00%	1,000,000,000	100.00%	1,020,000,000	100.00%	1,040,400,000	100.00%	1,061,208,000	100.00%	1,082,432,160	100.00%	5,204,040,160	DINKES
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Lembaga Pelayanan Kesehatan Masyarakat telah memberikan pelayanan dasar dan spesialis tertentu sesuai standar	%		80.00%	1,000,000,000	85.00%	1,050,000,000	90.00%	1,102,500,000	95.00%	1,157,625,000	100.00%	1,215,506,250	100.00%	5,525,631,250	DINKES
				Program Pengawasan Obat dan Makanan	Obat dan makanan yang dikonsumsi tersedia, terjangkau dan aman secara medis	%		80.00%	75,000,000	85.00%	78,750,000	90.00%	82,687,500	93.00%	86,821,875	95.00%	91,162,969	95.00%	414,422,344	DINKES
				Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Obat Tradisional yang memenuhi persyaratan medis dikonsumsi oleh masyarakat	%		10.00%	50,000,000	14.00%	52,500,000	16.00%	55,125,000	18.00%	57,881,250	20.00%	60,775,313	20.00%	276,281,563	DINKES
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Informasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh Pemerintah diketahui oleh masyarakat	%		60.00%	390,000,000	65.00%	409,500,000	70.00%	429,975,000	75.00%	451,473,750	80.00%	474,047,438	80.00%	2,154,996,188	DINKES
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Masyarakat telah terpenuhi kebutuhan gizinya sesuai standar	%		90.00%	390,000,000	93.00%	409,500,000	96.00%	429,975,000	98.00%	451,473,750	100.00%	474,047,438	100.00%	2,154,996,188	DINKES
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyakit Menular dapat ditanggulangi dalam waktu tertentu sesuai jenis penyakit	%		100.00%	960,000,000	100.00%	1,008,000,000	100.00%	1,058,400,000	100.00%	1,111,320,000	100.00%	1,166,886,000	100.00%	5,304,606,000	DINKES
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya telah dilaksanakan sesuai standar nasional	%		50.00%	200,000,000	60.00%	210,000,000	65.00%	220,500,000	70.00%	231,525,000	75.00%	243,101,250	75.00%	1,105,126,250	DINKES
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Penduduk miskin mendapatkan layanan kesehatan tertentu	%		100.00%	600,000,000	100.00%	612,000,000	100.00%	624,240,000	100.00%	636,724,800	100.00%	649,459,296	100.00%	3,122,424,096	DINKES
				Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Puskesmas dan Pustu telah memiliki sarana prasaranan sesuai standar	%		100.00%	1,900,000,000	100.00%	1,995,000,000	100.00%	2,094,750,000	100.00%	2,199,487,500	100.00%	2,309,461,875	100.00%	10,498,699,375	DINKES

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th. 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab			
								2011		2012		2013		2014		2015				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Pemerintah telah memiliki kesepakatan dan kerjasama pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan lembaga pelayanan kesehatan pemerintah tingkat atas dan swasta	%		10.00%	75,000,000	20.00%	78,750,000	30.00%	82,687,500	40.00%	86,821,875	50.00%	91,162,969	50.00%	414,422,344	DINKES	
				Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Anak Balita memiliki derajat kesehatan sesuai pertambahan umur	%		95.00%	50,000,000	96.00%	52,500,000	97.00%	55,125,000	98.00%	57,881,250	100.00%	60,775,313	100.00%	276,281,563	DINKES	
				Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Lansia memiliki derajat kesehatan sesuai kondisi medis	%		80.00%	75,000,000	83.00%	78,750,000	86.00%	82,687,500	88.00%	86,821,875	90.00%	91,162,969	90.00%	414,422,344	DINKES	
				Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Makanan yang dikonsumsi masyarakat telah memenuhi standar kesehatan	%		80.00%	50,000,000	85.00%	52,500,000	90.00%	55,125,000	93.00%	57,881,250	95.00%	60,775,313	95.00%	276,281,563	DINKES	
				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Ibu dan anak selamat dalam persalinan	%		85.00%	100,000,000	87.00%	105,000,000	90.00%	110,250,000	95.00%	115,762,500	97.00%	121,550,625	97.00%	552,563,125	DINKES	
Pekerjaan Umum																					
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terwujudnya Pembangunan Jalan dan Jembatan				7,510,000,000		8,647,500,000		14,994,625,000		29,113,818,750		42,830,891,563		103,096,835,313	DPU	
				Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terwujudnya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				6,750,003,680		7,650,000,000		8,797,500,000		11,417,125,000		12,934,693,750		47,549,322,430	DPU	
				Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Terwujudnya Pembangunan Turap/Talud/Bronjong				1,090,488,000		650,000,000		850,000,000		700,000,000		900,000,000		4,190,488,000	DPU	
				Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				7,181,787,000		7,894,217,550		9,078,350,183		10,440,102,710		12,006,118,116		46,600,575,559	DPU	
				Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya				1,162,965,000		1,337,409,750		1,538,021,213		1,550,000,000		1,782,500,000		7,370,895,963	DPU	
				Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				1,690,204,500		1,196,235,175		3,875,670,451		4,082,021,019		4,319,324,172		15,163,455,317	DPU	
				Program pengendalian banjir	Terwujudnya Pengendalian Banjir				127,750,000		146,912,500		168,949,375		994,291,781		1,023,435,548		2,461,339,205	DPU	
				Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terwujudnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				1,207,921,000		1,260,500,000		1,442,075,000		1,650,886,250		1,891,019,188		7,452,401,438	DPU	
Perumahan																					
				Program Pengembangan Perumahan	meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman				0		0		250,000,000		250,000,000		250,000,000		750,000,000	DPU	
				Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan				449,750,000		1,037,262,500		1,192,851,875		1,371,779,656		1,577,546,605		5,629,190,636	DPU	
				Program pengelolaan areal pemakaman	terlaksananya pengelolaan areal pemakaman	%	100	80.00%	612,715,000	80.00%	105,012,000	80.00%	1,128,853,000	80.00%	141,480,000	80.00%	157,128,000	80.00%	2,145,188,000	DINAS SOSNAKER	
Penataan Ruang																					

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th. 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung jawab	
								2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya Perencanaan Penatan Ruang				1,262,364,225		1,111,914,000		833,951,100		692,043,765		901,350,330		4,801,623,420	DPU
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang				61,920,000		439,760,000		300,224,000		312,257,600		326,096,240		1,440,257,840	DPU
Perencanaan Pembangunan																				
				Program Pengembangan data/informasi	Optimalisasi data dan informasi dalam perencanaan pembangunan	%	60	70%	228,692,600	70%	265,000,000	75%	125,000,000	80%	165,000,000	85%	124,600,000	90%	908,292,600	BAPPEDA & PM
				Program Kerjasama Pembangunan	terciptanya kerjasama pembangunan yang sinergis	%	0	100.00%	54,409,000	100.00%	265,000,000	100.00%	285,000,000	100.00%	315,000,000	100.00%	345,000,000	100.00%	1,264,409,000	BAPPEDA & PM
				Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar		%			0	100.00%	588,345,000	100.00%	403,712,000	100.00%	450,398,000	100.00%	447,418,000	100.00%	1,889,873,000	BAPPEDA & PM
				Program perencanaan pembangunan daerah	tersedianya dokumen arah pembangunan daerah	%	100.00%	100.00%	633,504,000	100.00%	935,000,000	100.00%	819,000,000	100.00%	970,500,000	100.00%	807,000,000	100.00%	4,165,004,000	BAPPEDA & PM
				Program perencanaan pembangunan ekonomi	tersedianya dokumen arah pembangunan ekonomi			100.00%	650,000,000	100.00%	105,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%	115,000,000	100.00%	115,000,000	100.00%	1,045,000,000	BAPPEDA & PM
				Program perencanaan sosial budaya	tersedianya dokumen arah pembangunan sosial budaya				0	100.00%	130,000,000	100.00%	215,000,000	100.00%	145,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	565,000,000	BAPPEDA & PM
				Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	tersedianya dokumen arah pembangunan daerah rawan bencana				0	100.00%	50,000,000	100.00%	255,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%	65,000,000	100.00%	430,000,000	BAPPEDA & PM
Perhubungan																				
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang baik	%	80	85.00%	327,000,000	90.00%	395,000,000	90.00%	7,340,000,000	95.00%	5,347,000,000	95.00%	355,000,000	95.00%	13,764,000,000	DINAS HUBKOMINFO
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	prasarana dan fasilitas perhubungan dapat berfungsi dengan baik	%	85	90.00%	208,000,000	90.00%	215,000,000	95.00%	225,000,000	95.00%	230,000,000	100.00%	245,000,000	100.00%	1,123,000,000	DINAS HUBKOMINFO
				Program peningkatan pelayanan angkutan	meningkatnya pelayanan jasa angkutan umum	%	85	85.00%	45,000,000	90.00%	192,000,000	90.00%	55,000,000	95.00%	83,000,000	95.00%	65,000,000	95.00%	440,000,000	DINAS HUBKOMINFO
				Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	persentase keterbiban berlalu lintas	%	85	85.00%	713,000,000	90.00%	1,994,000,000	90.00%	1,712,000,000	95.00%	1,839,000,000	95.00%	1,970,000,000	95.00%	8,228,000,000	DINAS HUBKOMINFO
				Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	optimalisasi kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	%	85	85.00%	146,000,000	85.00%	200,000,000	90.00%	200,000,000	95.00%	220,000,000	100.00%	250,000,000	100.00%	1,016,000,000	DINAS HUBKOMINFO
Lingkungan Hidup																				
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					2,240,204,000		5,742,608,850		6,453,269,735		6,338,846,709		5,441,423,729		26,216,353,023	DKP
				Pelayanan pencegahan pencemaran air	persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	%	10	60.00%	596,804,000	80.00%	100,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	1,246,804,000	KLH
				pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber bergerak	persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis ambang batas emisi gas buang	%	0	40.00%	518,517,000	50.00%	150,000,000	60.00%	180,000,000	70.00%	200,000,000	80.00%	200,000,000	90.00%	1,248,517,000	KLH

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th. 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
								2011		2012		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Peningkatan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan				63,300,000		119,000,000		121,000,000		128,000,000		128,000,000		559,300,000	KANTOR PP & KB
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Peningkatan penguatan kelembagaan PUG dan anak				39,700,000		45,000,000		40,000,000		30,000,000		30,000,000		184,700,000	KANTOR PP & KB
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan				32,900,000		20,000,000		20,000,000		0		30,000,000		102,900,000	KANTOR PP & KB
				Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan					48,810,000		20,000,000		25,000,000		50,000,000		50,000,000		193,810,000	KANTOR PP & KB
				Program Keluarga Berencana					566,000,000		412,000,000		434,000,000		469,000,000		474,000,000		2,355,000,000	KANTOR PP & KB
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja					15,670,000		38,020,000		40,000,000		40,000,000		45,000,000		178,690,000	KANTOR PP & KB
				Program pelayanan kontrasepsi					100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		500,000,000	KANTOR PP & KB
				Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR					18,850,000		35,000,000		43,000,000		45,000,000		25,000,000		166,850,000	KANTOR PP & KB
				Sosial																
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	terlaksananya pelayanan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	%	100	100.00%	85,781,600	100.00%	120,094,700	100.00%	132,105,000	100.00%	145,314,000	100.00%	159,845,900	100.00%	643,141,200	DINAS SOSNAKER
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial	%	109	100.00%	884,649,000	100.00%	1,029,118,000	100.00%	1,132,029,900	100.00%	1,245,232,700	100.00%	1,369,756,800	100.00%	5,660,786,400	DINAS SOSNAKER
				Program pembinaan anak terlantar	Anak terlantar yang mendapatkan pembinaan	%	0	90.00%	61,100,000	90.00%	67,210,000	90.00%	73,931,000	90.00%	81,324,100	90.00%	89,556,350	90.00%	373,121,450	DINAS SOSNAKER
				Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Penyandang cacat yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu yang dilakukan pembinaan	%	0	100.00%	228,104,000	100.00%	273,425,000	100.00%	281,022,500	100.00%	309,125,000	100.00%	341,036,500	100.00%	1,432,713,000	DINAS SOSNAKER
				Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Jumlah panti asuhan yang mendapatkan pembinaan	%	100	100.00%	293,000,000	100.00%	322,300,000	100.00%	354,530,000	100.00%	389,983,000	100.00%	428,981,300	100.00%	1,788,794,300	DINAS SOSNAKER
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	jumlah organisasi sosial yang mandiri	%	100	100.00%	226,400,000	100.00%	565,040,000	100.00%	563,944,000	100.00%	601,338,400	100.00%	641,472,200	100.00%	2,598,194,600	DINAS SOSNAKER
				Tenaga Kerja																
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja	%	100	80.00%	109,376,000	80.00%	169,900,000	80.00%	113,744,000	80.00%	267,549,000	80.00%	203,414,200	80.00%	863,983,200	DINAS SOSNAKER
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	meningkatnya kesempatan kerja bagi pegawai kerja di Kota	%	100	80.00%	79,000,000	80.00%	110,000,000	80.00%	121,000,000	80.00%	133,100,000	80.00%	146,410,000	80.00%	589,510,000	DINAS SOSNAKER
				Program peningkatan kualitas SDM pegawai teknis ketenagakerjaan	pegawai teknis yang mendapatkan penambahan keilmuan di bidang ketenagakerjaan	%	100	100.00%	19,000,000	100.00%	116,900,000	100.00%	120,990,000	100.00%	123,289,000	100.00%	127,817,900	100.00%	507,996,900	DINAS SOSNAKER
				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	teraksananya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	%	100	100.00%	185,902,150	100.00%	856,373,800	100.00%	698,210,000	100.00%	636,031,800	100.00%	635,034,600	100.00%	3,011,552,350	DINAS SOSNAKER
				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																
				Program penciptaan iklim Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang kondusif	terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM	%	0	55	538,000,000	60	430,000,000	65	532,000,000	70	489,000,000	75	601,000,000	75%	2,590,000,000	DINAS KOPERINDAG
				Program peningkatan kualitas SDM	meningkatnya kualitas pembina UMKM	orang	0	0	88,260,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	488,260,000	DINAS KOPERINDAG

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th. 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
								2011		2012		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Program Pengembangan Kewirausahaan	tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan dikalangan UMKM	unit	25	50.00%	135,000,000	100.00%	220,000,000	100.00%	230,000,000	100.00%	190,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	975,000,000	DINAS KOPERINDAG
				Program Pengembangan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	meningkatnya daya saing KUMKM	unit	110	384	1,294,000	517	2,250,000	517	2,200,000	517	2,275,000	517	2,300,000	517	10,319,000	DINAS KOPERINDAG
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	KUMKM yang bisa mengakses sumber modal	unit	84	134	591,000,000	164	1,600,000,000	164	1,630,000,000	164	1,145,000,000	164	1,654,000,000	164	6,620,000,000	DINAS KOPERINDAG
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	tertatanya kelembagaan koperasi	unit	121	183	315,000,000	224	462,000,000	224	510,000,000	224	558,000,000	224	605,000,000	224	2,450,000,000	DINAS KOPERINDAG
Penanaman Modal Daerah																				
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Keikutsertaan pengusaha kecil dan menengah mengikuti pameran promosi	kegiatan	40	40.00%	10,000,000	50	15,000,000	60	15,000,000	70	17,000,000	80	17,500,000	80	74,500,000	BAPPEDA & PM, KEC MKS
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	meningkatnya realisasi investasi				71,500,000		475,000,000		215,000,000		125,000,000		140,000,000		1,026,500,000	BAPPEDA & PM
Kebudayaan																				
				Program Pengembangan Nilai Budaya	terpeliharanya nilai - nilai budaya				262,555,000		297,000,000		334,000,000		364,000,000		371,000,000		1,628,555,000	DINAS BUDPAR
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan	%	50%	50.00%	10,000,000	55.00%	15,000,000	60.00%	15,000,000	65.00%	17,000,000	75.00%	17,500,000	80.00%	74,500,000	DINAS BUDPAR
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya				53,880,000		1,620,000,000		1,685,000,000		1,750,000,000		1,775,000,000		6,883,880,000	DINAS BUDPAR
				Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	terciptanya kerjasama pengelolaan kekayaan budaya				53,725,000		530,000,000		785,000,000		685,000,000		940,000,000		2,993,725,000	DINAS BUDPAR
Pemuda dan Olah Raga																				
				Program peningkatan peran serta kepemudaan	persentase keikutsertaan pemuda dan pengembangan organisasi kepemudaan	kegiatan	50%	50.00%	10,000,000	55.00%	15,000,000	65.00%	15,000,000	75.00%	17,000,000	85.00%	17,500,000	90.00%	74,500,000	DISDIKPORA, KEC MKS
				Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	persentase minat pemuda dalam mengikuti kewirausahaan	kegiatan	30%	40.00%	10,000,000	50.00%	15,000,000	60.00%	15,000,000	70.00%	17,000,000	80.00%	17,500,000	90.00%	74,500,000	DISDIKPORA, KEC MKS
				Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase pengetahuan pelajar diwilayah Kec. MKS yang mengetahui dampak pemakaian NAPZA	kegiatan	50%	55.00%	10,000,000	60.00%	15,000,000	65.00%	15,000,000	70.00%	17,000,000	80.00%	17,500,000	90.00%	74,500,000	DISDIKPORA, KEC MKS
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																				
				Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					244,755,250		270,000,000		291,000,000		327,000,000		358,500,000		1,491,255,250	KANTOR KESBANGPOL - KANTOR POL PP
				Program Pemeliharaan Kententrman dan Ketertiban Masyarakat					661,050,000		861,050,000		949,100,000		1,042,100,000		962,100,000		4,475,400,000	KANTOR POL PP
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	tercapainya pengembangan wawasan kebangsaan	%	100	100.00%	78,743,000	100.00%	92,175,000	100.00%	101,392,500	100.00%	111,532,000	100.00%	122,685,000	100.00%	506,527,500	KANTOR KESBANGPOL
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah pos kamling dan yang aktif	kegiatan	50%	55.00%	10,000,000	60.00%	15,000,000	65.00%	15,000,000	70.00%	17,000,000	80.00%	17,500,000	90.00%	74,500,000	KANTOR KESBANGPOL
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terjaganya ketertiban dan keamanan masyarakat	%	80%		5,000,000		14,490,000		15,700,000		16,500,000		18,000,000	100.00%	69,690,000	KEC GP

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th. 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
								2011		2012		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	tercapainya pengembangan wawasan kebangsaan	%	100	100.00%	78,743,000	100.00%	92,175,000	100.00%	101,392,500	100.00%	111,532,000	100.00%	122,685,000	100.00%	506,527,500	DINAS SOSNAKER
				Program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase penanganan masyarakat tentang bencana alam	kegiatan	50%	55.00%	10,000,000	60.00%	15,000,000	65.00%	15,000,000	70.00%	17,000,000	80.00%	17,500,000	90.00%	74,500,000	KANTOR P. BENCANA DAERAH, KEC. MKS
Pemerintahan Umum																				
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Berkurangnya tingkat penyimpangan aparatur pemerintah				1,241,100,000		1,365,210,000		1,501,731,000		1,651,904,100		1,817,094,510		7,577,039,610	INSPEKTORAT
				Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	SDM mampu melaksanakan tugasnya dengan baik				130,000,000		143,000,000		157,300,000		173,030,000		190,333,000		793,663,000	INSPEKTORAT
				Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase terselesaikannya masalah yang ada di kecamatan	%	70%	75.00%	10,000,000	80.00%	15,000,000	85.00%	15,000,000	90.00%	17,000,000	90.00%	17,500,000	90.00%	74,500,000	INSPEKTORAT, KEC. MKS
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pedoman pelayanan perizinan telah ditetapkan dengan peraturan daerah	%				100.00%	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	200,000,000	KPPT
				Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah	perizinan yang dikelola KPPT sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	%				100.00%	10,000,000			100.00%	12,500,000			100.00%	22,500,000	KPPT
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase peningkatan pelaksanaan Inpres No 5 tahun 2004				50,681,000		62,625,000		67,486,000		69,907,000		72,058,000		322,757,000	SETDA
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persentase penggunaan dana yang telah dianggarkan di masing-masing kelurahan	%	75%	75.00%	360,000,000	80.00%	360,000,000	85.00%	450,000,000	90.00%	450,000,000	95.00%	450,000,000	100.00%	2,070,000,000	KEC. MKS
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	%	80%	7 Kelurahan	259,000,000		280,000,000	100.00%	280,000,000	100.00%	315,000,000	100.00%	315,000,000	100.00%	1,449,000,000	KEC GP
Kepegawaian																				
				Program Pendidikan Kedinasan	meningkatnya jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM II, PIM III, dan IV diklat teknis dan fungsional	Otrang	4500 Orang		2,300,000,000		1,800,000,000		2,350,000,000		7,850,000,000		2,650,000,000		16,950,000,000	BKD
				Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya jumlah PNS yang lulus uji kompetensi	%	70%		2,292,035,000		2,712,000,000		14,167,000,000		2,112,000,000		3,320,000,000		24,603,035,000	BKD
				Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan PNS	Terwujudnya program reward dan punishment bagi PNS	%	80%		3,490,000,000		3,610,000,000		3,610,000,000		3,610,000,000		3,610,000,000		17,930,000,000	BKD
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya program pengembangan karir dan pelayanan PNS	%	70%		481,780,000		445,000,000		445,000,000		445,000,000		445,000,000		2,261,780,000	BKD
				Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terlaksananya pengurusan pensiun dan pemberian bantuan pemulangan PNS yang memasuki usia pensiun	%	100%		2,290,000,000		2,390,000,000		2,490,000,000		2,590,000,000		2,690,000,000		12,450,000,000	BKD
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	terlaksananya program peningkatan keberdayaan masyarakat	%	20%	20.00%	1,894,587,000	20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%	1,894,587,000	KANTOR PM & PEMKEL - KECAMATAN
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan	%	90%		101,235,300		116,300,000		127,000,000		141,700,000		157,500,000	100.00%	643,735,300	KEC GP

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th. 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
								2011		2012		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase pengetahuan SDM yang mengelola tentang hubungan masyarakat	kegiatan	50	55.00%	5,000,000	60	5,000,000	65	5,000,000	70	7,000,000	80	7,500,000	80	29,500,000	DINAS HUBKOMINFO, KECAMATAN MKS
				Program kerjasama informsi dan media massa	Persentase penyampaian informasi masyarakat	kegiatan	50	55.00%	5,000,000	60	5,000,000	65	5,000,000	70	7,000,000	80	7,500,000	80	29,500,000	DINAS HUBKOMINFO, KECAMATAN MKS
				Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Terciptanya penyebaran informasi di masyarakat	%	90%		13,231,000		14,500,000		15,700,000		16,900,000		18,000,000	100.00%	78,331,000	KEC GP
Pertanian																				
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein serta penguatan cadangan pangan				118,733,200		526,000,000		446,000,000		411,500,000		446,500,000		1,948,733,200	KANTOR KETAHANAN PANGAN
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat							50,000,000								50,000,000	DINAS PERTANIAN
				Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Tercapainya Peningkatan dan keamanan pangan	%	30	40	14,000,000	50	81,000,000	60	95,000,000	65	109,000,000	75	28,000,000	75	327,000,000	DINAS PERTANIAN
				Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	%	40	45	48,046,500	50	82,917,000	60	65,000,000	65	80,000,000	70	78,500,000	70	354,463,500	DINAS PERTANIAN
				Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	%	50	55	121,385,000	58	139,700,000	60	178,900,000	65	194,600,000	70	169,500,000	70	804,085,000	DINAS PERTANIAN
				Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	%	50	55	149,815,300	60	127,500,000	65	141,000,000	70	148,150,000	75	170,515,000	75	736,980,300	DINAS PERTANIAN
				Program pencegahan dan penanggulangan penyakit zoonosis	Tercapainya pencegahan dan penanggulangan penyakit zoonosis	%	45	60	127,453,500	65	218,025,000	70	194,000,000	75	262,000,000	80	239,000,000	80	1,040,478,500	DINAS PERTANIAN
				Program peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan produksi hasil peternakan	%	20	22	47,619,000	25	50,000,000	27	55,000,000	30	60,000,000	32	65,000,000	32	277,619,000	DINAS PERTANIAN
				Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	%	25	30	172,275,700	35	163,000,000	40	179,500,000	45	197,250,000	50	217,375,000	50	929,400,700	DINAS PERTANIAN
				Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan	%	50	60	15,229,000	65	31,850,000	70	34,500,000	75	39,000,000	80	41,000,000	80	161,579,000	DINAS PERTANIAN
Pariwisata																				
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	terpromosikannya potensi pariwisata Kota Bukittinggi				576,294,500		671,036,500		860,000,000		1,076,000,000		559,000,000		3,742,331,000	DINAS BUDPAR
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	tercapainya pengembangan destinasi pariwisata				906,068,000		3,652,000,000		3,843,200,000		2,974,400,000		2,806,600,000		14,182,268,000	DINAS BUDPAR
				Program Pengembangan Kemitraan	terciptnya kemitraan dengan stakeholder lain dalam pengembangan pariwisata				105,170,000		262,000,000		162,000,000		262,000,000		312,000,000		1,103,170,000	DINAS BUDPAR
Kelautan dan Perikanan																				
				Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Pengembangan Budidaya Perikanan	%	50	55	225,844,000	60	355,000,000	65	570,000,000	70	610,000,000	75	805,000,000	75	2,565,844,000	DINAS PERTANIAN
Perdagangan																				
				Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	efektifitas kebijakan perlindungan konsumen	%	40	55	369,406,000	60	389,319,000	65	406,319,000	70	425,065,000	75	452,565,000	75	2,042,674,000	DINAS KOPERINDAG
				Program Pengembangan Peningkatan Kerjasama Perdagangan	terbukanya peluang pasar bagi pelaku usaha	perusahaan	50	35	517,746,000	50	618,320,000	55	590,000,000	60	690,000,000	65	690,000,000	65	3,106,066,000	DINAS KOPERINDAG
				Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	peningkatan kualitas usaha yang sehat dan menunjang	%	50	53	51,102,000	55	87,000,000	60	90,000,000	70	65,000,000	75	65,000,000	75	358,102,000	DINAS KOPERINDAG

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th. 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
								2011		2012		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Tersedianya pasar tradisional yang modern	%		15.00%	90,000,000	30.00%	90,000,000	45.00%	11,625,000,000	65.00%	12,850,000,000	65.00%	13,915,000,000	65.00%	38,570,000,000	DINAS PENG. PASAR
				Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Dapat memenuhi kebutuhan tempat-tempat usaha bagi para pedagang khususnya pedagang ekonomi lemah	%	60	65.00%	97,175,500	70.00%	306,893,050	75.00%	117,582,355	80.00%	129,340,591	85.00%	142,274,650	85.00%	793,266,146	DINAS PENG. PASA
					Dapat meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan	%	10	15.00%		25.00%	175,000,000	35.00%		45.00%		55.00%		55.00%	175,000,000	
					Dapat mewujudkan kedisiplinan para pedagang	%	60	65.00%		70.00%		75.00%		80.00%		85.00%		85.00%	0	
				Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tersedianya sarana dan prasarana pasar yang representatif	%	65	70.00%	1,743,000,000	75.00%	4,901,544,000	80.00%	1,373,900,000	85.00%	258,100,000	90.00%	151,620,000	90.00%	8,428,164,000	DINAS PENG. PASAR
					Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana pasar	%	80	83.00%		86.00%		89.00%		92.00%		95.00%		95.00%	0	
					Pengembangan pasar tradisional yang modern	%		15.00%	90,000,000	30.00%	90,000,000	45.00%	11,625,000,000	55.00%	12,850,000,000	65.00%	13,915,000,000	65.00%	38,570,000,000	
				Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	peningkatan kualitas kelembagaan pelaku usaha	orang	167	200	108,956,000	250	122,000,000	300	130,000,000	350	145,000,000	400	145,000,000		650,956,000	
				Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Terlaksananya pengawasan dan penertiban pasar	%	60	65.00%	209,841,100	70.00%	385,839,000	75.00%	396,922,900	80.00%	436,615,190	85.00%	480,276,709	85.00%	1,909,494,899	DINAS PENG. PASAR
					Memberdayakan pedagang pasar	%	50	55.00%	116,600,000	60.00%	128,260,000	65.00%	141,086,000	70.00%	155,194,600	75.00%	170,714,060	75.00%	711,854,660	
				Program Peningkatan Penerimaan PAD	Tercapainya target PAD di bidang retribusi pasar	%	82	87.00%	75,633,000	90.00%	383,196,300	93.00%	91,515,930	97.00%	100,667,523	100.00%	110,734,275	100.00%	761,747,028	DINAS PENG. PASAR
				Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya database bidang pasar yang lengkap	%	82	87.00%	25,000,000	90.00%	27,500,000	93.00%	30,250,000	97.00%	33,275,000	100.00%	36,602,500	100.00%	152,627,500	DINAS PENG. PASAR
Perindustrian																				
				Program perkuatan struktur IKM Kota Bukittinggi	meningkatnya IKM formal	%	5	5.00%		5.00%	300,000,000	5.00%	350,000,000	5.00%	100,000,000	5.00%	100,000,000	5.00%	850,000,000	DINAS KOPERINDAG
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	meningkatnya omset IKM	%	5	5	600,000,000	5	900,000,000	5	1,525,000,000	5	1,825,000,000	5	2,325,000,000	5	7,175,000,000	DINAS KOPERINDAG
				Program perkuatan kelembagaan industri	kuatnya kelembagaan industri	bh/ asosiasi	2	33	50,000,000	33	150,000,000	33	150,000,000	33	150,000,000	33	150,000,000	33	650,000,000	
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	selera pasar terpenuhi	jenis produk	3	3	625,000,000	4	1,500,000,000	5	600,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000	6	3,925,000,000	DINAS KOPERINDAG
				Program penciptaan usaha baru	Tumbuhnya IKM baru	%	5	5	230,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	0	5	0	5	730,000,000	
				Program Penataan Struktur Industri	tertatanya kelompok industri	kelompok	1	1	130,000,000	3	130,000,000	3	130,000,000	3	130,000,000	3	130,000,000	3	650,000,000	DINAS KOPERINDAG
				Program penunjang operasional dan pengelolaan UPTD	tingkat pelayanan UPTD terhadap IKM	%	35	40	49,050,000	45	66,000,000	50	63,000,000	55	65,000,000	60	73,000,000	60	316,050,000	DINAS KOPERINDAG
				Program dukungan produksi terhadap industri kecil dan IKM	Jumlah dan kualitas produksi tinggi	jenis	2	2	15,000,000	3	15,000,000	3	16,000,000	4	16,000,000	4	16,000,000	4	78,000,000	DINAS KOPERINDAG
				Program Pengembangan kompetensi SDM	Kompetensi SDM pembina inudstri dibidang manajemen dan teknik produksi tinggi	orang	11	11	56,500,000	11	80,000,000	15	92,000,000	15	39,000,000	18	116,000,000	18	383,500,000	DINAS KOPERINDAG
				Program dukungan prasarana dan layanan bisnis lainnya terhadap Industri Kecil dan IKM	jaringan pasar luas	%	5	5	1,028,500,000	7	65,000,000	7	67,000,000	9	164,000,000	9	86,000,000	9	1,410,500,000	DINAS KOPERINDAG
				Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	kuatnya kampung bordir dan kampung industri	buah	1	1	200,000,000	1	200,000,000	2	100,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	900,000,000	DINAS KOPERINDAG

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th. 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
								2011		2012		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingginya hasil kerja	orang	11	11	22,000,000	11	24,000,000	15	6,000,000	15	6,000,000	18	29,000,000	18	87,000,000	DINAS KOPERINDAG
				Program Pengembangan Sentra-sentra potensial	KUB sebagai pemasok utama di Propinsi Sumatera Barat	kub	30	11	100,000,000	27	100,000,000	37	0	37	0	37	0	37	200,000,000	DINAS KOPERINDAG

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah Kota Bukittinggi guna melihat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Bukittinggi

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pertumbuhan Penduduk	%	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
2	Penduduk Miskin	KK	3.124	3.000	2.964	2.864	2.735	2.611
	PENDIDIKAN							
3	Angka Buta Aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas	%	0.79	0.50	0.25	0	0	0
4	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	119.38	125	125	125	125	125
5	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	143.44	145	145	145	145	145
6	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C	%	134.50	135	135	135	135	135

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	104.60	110	110	110	110	110
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	110.76	115	115	115	115	115
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	104	110	110	110	110	110
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI/Paket A		1:211	1:195	1:180	1:175	1:160	1:150
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs/Paket B		1:308	1:285	1:270	1:255	1:245	1:230
12	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA/Paket C		1:254	1:230	1:215	1:200	1:185	1:155
13	Rasio guru/murid SD/MI/Paket A		1:19	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
14	Rasio guru/murid SMP/MTs/Paket B		1:18	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
15	Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA/Paket C		1:8	1:12	1:15	1:17	1:20	1:20
16	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	80	85	90	95	100	100
17	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100	100
18	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	80	85	90	95	100	100
19	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.05	0	0	0	0	0
20	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.14	0	0	0	0	0
21	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	1.27	0	0	0	0	0

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
22	AngkaKelulusan:							
23	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100
24	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.77	100	100	100	100	100
25	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	98.32	100	100	100	100	100
26	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100
27	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100	100
28	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	75	80	85	90	95	100
	KESEHATAN							
29	Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	%	90.1	90.2	90.3	90.5	90.6	91
30	Persentase Kelurahan Yang Mencapai "Universal Child Immunization" (UCI)	%	79.17	83	87	91.6	95.8	100
31	Persentase Kelurahan Terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani < 24 jam	%	Tidak ada kasus	100	100	100	100	100
32	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Fe	%	93.5	95	95	95	95	95
33	Persentase Bayi Yang Mendapat ASI Eksklusif	%	58	65	70	75	80	85
34	Persentase Murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Yang Mendapat Pemeriksaan Gigi dan Mulut	%	100	100	100	100	100	100
35	Persentase Keluarga Miskin Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
36	Rasio posyandu per satuan balita		12.25	12.5	13	13.5	14	14.5

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
37	Rasio puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk	Sarana/ 1000 penduduk	1.3	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32
38	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	RS/ 1000 penduduk	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
39	Rasio Dokter Per 100.000 penduduk	Dokter/ 1000 penduduk	11	11	16	22	26	30
40	Rasio Dokter Spesialis Per 100.000 penduduk	Dr. spesialis/ 1000 penduduk	65	65	75	80	90	100
41	Rasio Dokter Keluarga Per 1.000 keluarga	Dr. spesialis/ 1000 penduduk	17	17	30	50	75	100
42	Rasio Dokter Gigi Per 100.000 penduduk	Drg/ 100.000 penduduk	15	30	30	30	30	30
43	Rasio Apoteker Per 100.000 penduduk	Apt/ 100.000 penduduk	23	23	23	23	23	23
44	Rasio Perawat Per 100.000 penduduk	Perawat/ 100.000 penduduk	667	667	667	667	667	667
45	Rasio Ahli Gizi Per 100.000 penduduk	Ahli gizi/ 100.000 penduduk	23	23	23	23	23	23
46	Rasio Ahli Sanitasi Per 100.000 penduduk	Ahli sanitasi/ 100.000 penduduk	15	15	20	25	30	35
47	Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Per 100.000 penduduk	Ahli kesmas/ 100.000 penduduk	60	60	60	60	60	60
48	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
49	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	50	70	72.5	75	77.5	80
50	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%	78.7	79.5	80.3	81.1	81.9	82.7

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
51	Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Puskemas	%	20	20	20	20	20	20
52	Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Rumah Sakit	%	15.5	15	15	15	15	15
53	Persentase Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Laboratorium Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
54	Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan 4 Pelayanan Kesehatan Spesialis Dasar	%	16	29	38	50	75	100
55	Persentase Obat generik Berlogo Dalam Persediaan Obat	%	100	100	100	100	100	100
56	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup		7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76
57	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup		1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
58	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup		48.5	97	97	97	97	97
59	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir		70.1	70.5	70.9	71.4	71.8	72.3
60	Angka Kesakitan Malaria Per 1.000 Penduduk		0	0	0	0	0	0
61	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	93.8	86	87	87	88	88
62	Prevalensi HIV (Persentase Kasus Terhadap Penduduk Beresiko)		0.07	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
63	Angka "Acute Flaccid Paralysis" (AFP) Pada Anak Usia < 15 Tahun Per 100.000 Anak		0	0	0	0	0	0
64	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) Per 100.000 Penduduk	%	83	54	53	52	51	50
65	Persentase Balita Dengan Gizi Buruk	%	2	2	1.8	1.5	1.2	09
66	Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi	%	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	PEKERJAAN UMUM							
67	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	75,20	78,96	82,91	87,05	91,41	95,98
68	Rasio Jaringan Irigasi	%	0,72	0,78	0,83	0,86	0,89	0,92
69	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
70	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	59,11	62,06	65,17	68,43	71,85	75,44
71	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	0	0	1/111.392	1/113.230	1/115.098	1/116.997
72	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 1	%	16,66	17,49	18,37	19,28	20,25	21,26
73	Rasio rumah layak huni	%	20,25	21,26	22,32	23,44	24,61	25,84
74	Rasio permukiman layak huni	%	72,00	75,60	79,38	83,35	87,52	91,89
75	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	km	46.613,60	47.545,87	48.496,79	49.466,73	50.456,06	51.465,18
76	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	km	38,63	42,49	46,35	50,22	54,08	57,94
	PERUMAHAN							
77	Rumah tangga pengguna air bersih	%	44,63	49,10	54,01	59,41	65,35	71,88
78	Rumah tangga pengguna listrik	Kva	27,00	27,00	27,00	29,00	29,00	29,00
79	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	59,11	65,02	71,52	78,67	86,54	95,19
80	Rumah layak huni	unit	85,00	87,00	90,00	92,00	94,00	95,00
	PENATAAN RUANG							
81	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
82	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00
83	Luas RTH dan taman kota	Ha	892,95	892,95	892,95	892,95	892,95	892,95
83	Ketaatan terhadap RTRW	%	70,00	73,50	77,18	81,03	85,09	89,34
85	Luas wilayah produktif	Ha	385,45	385,45	385,45	385,45	385,45	385,45
86	Luas wilayah industri	%	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
87	Luas wilayah banjir	Ha	3,39	3,56	3,74	3,92	4,12	4,33
88	Luas wilayah perkotaan	Ha	4.631,80	4.631,80	4.631,80	4.631,80	4.631,80	4.631,80
	PERHUBUNGAN							
89	Rasio ijin trayek		24:110.954	24:113.051	24:115.188	24:117.365	24:119.583	24:121.843
90	Jumlah uji kir angkutan umum		1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
91	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		5	5	5	5	5	5
92	Angkutan darat	Unit	555	555	555	555	555	555
93	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	86	90	95	100	100	100
94	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	12	12	12	12	12	12
95	Pemasangan Rambu-rambu	%	90	90	95	95	100	100
	LINGKUNGAN HIDUP							
96	Persentase penanganan sampah	%	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8
97	Persentase Penduduk berakses air minum	%	43	43	43	43	43	43
98	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	%	10	60	80	100	100	100
99	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
100	Penegakan ecto lingkungan	%	100	70	80	90	100	100
	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							
101	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	29	75	100	100	100	100
102	Kepemilikan KTP	%	29	75	100	100	100	100
103	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		0	0	ada	ada	ada	Ada
104	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	29	75	100	100	100	100
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
105	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	36,41	37,56	40	41,9	43	45
106	Penurunan kasus KDRT	%	60	50	40	30	20	10
107	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	100	100	100
108	Peserta akseptor KB baru	orang	3.664	3.895	3.700	3.600	3.800	3.700
109	Cakupan peserta KB aktif	%	65,81	72,35	72,49	72,92	73	73,4
110	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	20,43	18,50	17,1	15,6	14,3	12
111	Sarana ector seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	panti	4	4	4	4	4	4
112	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	orang	238	250	250	250	250	250
113	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	orang	325	335	385	415	445	475

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	KETENAGAKERJAAN							
114	Angka partisipasi angkatan kerja	orang	55.020	60.522	66.024	71.526	77.028	82.530
115	Tingkat partisipasi angkatan kerja	orang	55.020	60.522	66.024	71.526	77.028	82.530
116	Pencari kerja yang ditempatkan	orang	239	432	625	818	1.011	1.204
117	Tingkat pengangguran terbuka	orang	64.218	63.576	62.934	62.292	61.650	61.008
118	Keselamatan dan perlindungan	orang	173	175	177	179	181	183
119	Rasio lulusan S1/S2/S3	orang	1.128	1.328	1.528	1.728	1.928	2.128
120	Rasio ketergantungan	%	42	43	44	45	46	47
121	Persentase koperasi aktif	%	70.7	70.8	70.8	71	71	71.5
122	Usaha Mikro dan Kecil	%	94.6	94.5	94.4	94.3	94.2	94.1
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
123	Jumlah organisasi pemuda	buah	67	70	75	80	85	90
124	Jumlah organisasi olahraga	buah	160	170	175	180	185	190
125	Jumlah kegiatan kepemudaan	buah	65	75	80	84	89	95
126	Jumlah kegiatan olahraga	buah	45	50	55	60	65	70
127	Lapangan olahraga	buah	4	4	4	4	4	4
128	Kegiatan pembinaan politik daerah		4	3	5	5	6	6
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
129	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	orang	9	9	10	13	14	15

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
130	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	orang	48	49	50	51	52	53
131	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		6	7	7	7	8	8
132	Penegakan PERDA		84	166	176	191	206	228
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
133	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	100	100	100	100	100	100
134	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	100	100	100	100	100	100
135	LPM Berprestasi	%	13	25	38	50	63	100
136	PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100
137	Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100
138	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	-	-	55	65	75	85
	STATISTIK							
139	Buku "Kota dalam angka"		ada	ada	ada	ada	ada	Ada
140	Buku "PDRB Kota"		ada	ada	ada	ada	ada	Ada
141	Buku IPM (Indeks Pembangunan Manusia)		Belum ada	Belum ada	ada	ada	ada	ada
142	Buku Indeks Gini		Belum ada	Belum ada	ada	ada	ada	ada
	KEARSIPAN							
143	Pengelolaan arsip secara baku	%	17.24	34.48	51.72	68.97	86.21	100

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
144	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	0	0	2	2	2	2
	PERPUSTAKAAN							
145	Jumlah perpustakaan	buah	1	0	0	0	0	0
146	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	203.622	94.900	99.645	107.616	118.377	130.215
147	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	24.6	24.6	24.59	24.61	24.61	24.43
	PERDAGANGAN							
148	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	8	10	12	15	20	25
	PERINDUSTRIAN							
149	Pertumbuhan Industri.	%	5.6	5.5	5.6	5.4	5.5	5.4
150	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	82.5	84	86	88	89	90
151	Jenis dan jumlah bank dan cabang	bank	16	16	16	16	16	16
152	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	unit	10	10	10	10	10	10
153	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	unit	7	7	7	8	8	9
154	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	unit	57	57	57	58	58	59
155	Lama proses perijinan	hari	15	15	15	15	15	15

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015 merupakan penjabaran lima tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006 – 2025, yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2010 – 2015 dan mengacu kepada RPJM Nasional Tahun 2009 – 2013. Agar implementasi RPJMD ini dapat diwujudkan dalam rangka pencapaian visi dan misi termuat dalam dokumen ini, maka diperlukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

10.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 ini disusun seiring dengan Walikota terpilih. Dalam hal akhir masa jabatan Walikota dan belum tersusun RPJMD tahap berikutnya, maka RPJMD Tahun 2010-2015 ini dapat menjadi dasar, khususnya pada program-program pembangunan yang relative strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan rakyat. Hal ini berlaku sampai disusun kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

Penyusunan program transisi ini tidak harus dilakukan secara tersendiri untuk tahun 2016 pada bagian ini, ataupun dokumen tersendiri sebagai RPJMD Transisi, tetapi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Mengambil dari RPJM 2010 - 2015 ini program-program pembangunan yang belum dapat dilaksanakan pada periode perencanaan tersebut dan menjadikannya sebagai program pembangunan untuk tahun 2016;
2. Mengisi program transisi dengan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, tetapi masih perlu dilanjutkan pada tahun 2016 mendatang.

10.2. Kaidah Pelaksanaan dan Konsistensi Penyusunan Renstra SKPD, RKPd, dan Renja SKPD dengan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 adalah pedoman bagi pemerintah Kota Bukittinggi dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Bagi pemerintah Kota Bukittinggi, dokumen ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode tersebut. Bagi masyarakat dan stakeholders, dokumen ini menjadi pedoman dan rujukan dalam menyatukan gerakan dalam rangka membangun Kota Bukittinggi.

Keberhasilan pencapaian pembangunan dapat dicapai apabila didukung dengan:

- a) Komitmen kepemimpinan daerah;
- b) Konsentrasi;
- c) Kerja keras dan kesungguhan segenap aparat pemerintah;
- d) Pelaksana *Good Governance*;
- e) Keberpihakan kepada rakyat;
- f) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta;
- g) Kedisiplinan, ketertiban masyarakat dan kehidupan bermasyarakat.

Kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Unsur pemerintah, masyarakat serta dunia usaha berkewajiban melaksanakan atau mendukung program-program dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015 dengan sebaik-baiknya;
2. SKPD menyusun Rencana Strategis yang kemudian digunakan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD);
3. Pemerintah Kota Bukittinggi berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut;
4. Pemerintah Kota Bukittinggi berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tersebut.

10.3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pencapaian Program RPJMD dan Penguatan Kemampuan dan Kapasitas DPRD dan Stakeholder Non-Pemerintah.

Pencapaian kinerja terhadap implementasi RPJMD Kota Bukittinggi dipantau, dievaluasi setiap tahunnya dan dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun laporan tahunan tersebut terdiri dari:

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota kepada DPRD;
2. Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah;
3. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Masyarakat disampaikan melalui media cetak dan elektronika.

DPRD dan stakeholders non Pemerintah dapat mengevaluasi penyelenggaraan RPJMD ini dan menyampaikannya kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dan Pemerintah akan mereview RPJMD ini minimal sekali dalam masa RPJMD ini berdasarkan evaluasi internal dan DPRD serta stakeholders non pemerintah. Untuk itu Pemerintah kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai kemampuan pemerintah kota agar pemantauan, evaluasi dan penyampaian kepada pemerintah dapat ditampung, dan masyarakat dapat mengakses serta memiliki informasi yang memadai untuk dapat berperan serta.

BAB XI PENUTUP

RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 merupakan amanah konstitusi yang di susun seiring dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota periode 2010-2015. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang menjadi pedoman bagi setiap SKPD untuk menyusun Renstra SKPD dan menyusun RKPD.

Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi. Sehingga dapat dirumuskan tujuan, strategi dan arah kebijakan dan program pembangunan daerah guna pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Demikianlah RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah Kota Bukittinggi selama lima tahun kedepan oleh seluruh pemangku kepentingan di pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat Kota Bukittinggi. Semoga pencapaian visi dan misi Kota Bukittinggi ini dapat menghantarkan masyarakat Kota Bukittinggi lebih sejahtera dalam ridho Allah Subhanahu Wata'ala.

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ISMET AMZIS